

Bangkit untuk Maju

Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini mengambil tema Indonesia maju. Momentum untuk bangkit dari situasi pandemi.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PANDEMI covid-19 yang melanda hampir seluruh penjuru dunia telah memorakporandakan segala segi kehidupan. Tak hanya menyebabkan kematian, virus korona juga menggoyahkan sendi perekonomian. Kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah membuat mobilitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, menjadi terbatas. Industri pariwisata, penerbangan, hotel, dan hiburan bahkan nyaris lumpuh.

Fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain, termasuk yang tergolong maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Tentu tidak ada negara yang siap menghadapi wabah ini, termasuk Tiongkok, negara tempat bermulanya penyebaran covid-19. Namun, bukan berarti mereka pasrah dan berpangku tangan. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kondisi dari keterpurukan ini. Begitu pula yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Indonesia maju menjadi tema peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI yang dicanangkan pemerintah. Peringatan kemerdekaan kali ini menjadi momentum yang pas untuk bangkit dari situasi pandemi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, misalnya, selalu mengingatkan bahwa situasi pandemi memberi kita kesempatan untuk melihat lagi apa yang perlu diperbaiki dan dipulihkan, terutama di sektor kesehatan dan perekonomian.

Belajar dari negara lain, pemerintah misalnya mulai meningkatkan rasio tempat tidur di rumah-rumah sakit. Hal itu penting sebab rasio tempat tidur di rumah sakit kita rendah, hanya 1,2 per 1.000 penduduk Indonesia. Sebagai perbandingan, India memiliki rasio tempat tidur di rumah sakit sebesar 2,7 per 1.000 penduduknya. Tiongkok memiliki rasio tempat tidur di rumah sakit sebesar 4,3 per 1.000 penduduk. Bahkan Jepang lebih tinggi lagi, 13 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien covid-19, pemerintah menyulap Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit. Surya Paloh, pengusaha yang juga Ketua Umum Partai NasDem, ikut meminjamkan hotel bintang 5 miliknya sebagai rumah sakit.

Selain sektor kesehatan, kata Presiden, pandemi juga membuka mata kita akan ketahanan pangan. Apalagi Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah memperingatkan akan terjadi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden meminta kesiapan produksi pangan, industri pengolahan pascapanen, serta efisiensi rantai pasok dan distribusi ditingkatkan. “Semua harus kita lihat lagi dan kita harus siapkan strategi besar untuk menghadapi itu ke depan,” tegas Jokowi.

Menurut Presiden, dalam setiap krisis, termasuk akibat pandemi covid-19, senantiasa terbuka peluang. Pandemi, kata Jokowi, tidak menghalangi anak bangsa berkreasi. Keterbatasan justru mendorong bangsa ini untuk tetap berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang. “Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan covid-19, kita telah berhasil mengembangkan PCR *test kid*, *rapid diagnostic test* atau RDT, kemudian ventilator dan *mobile* BSL 2. Kita tidak tergantung lagi kepada produk impor,” ujar Presiden.

Tidak hanya itu, Indonesia pun bakal memproduksi vaksin sendiri untuk penanganan covid-19. Selasa (10/8) lalu, Presiden bahkan hadir di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, demi melihat langsung pelaksanaan penyuntikan perdana imunisasi kepada 1.620 sukarelawan.

Presiden menyampaikan uji klinis tahap III terhadap vaksin ini diharapkan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Diharapkan, pada Januari

2021 Indonesia sudah bisa memproduksi sekaligus nantinya apabila produksi sudah siap, vaksin dapat segera diberikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Air.

Vaksin yang disuntikkan kepada 1.620 relawan ini merupakan vaksin yang dikembangkan Indonesia melalui PT Bio Farma bersama perusahaan vaksin asal Tiongkok, Sinovac. Menurut Presiden, dalam tiga bulan terakhir, pengembangan vaksin juga dilakukan sendiri oleh Lembaga Eijkman, BPPT, LIPI, Badan POM, Kemenristek/BRIN, dan sejumlah universitas. Dia optimistis dengan segera ditemukannya vaksin ini, vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan.

Naik kelas

Di tengah pandemi, Indonesia mendapat kabar baik karena Bank Dunia pada 1 Juli lalu menaikkan status negara ini dari *lower middle income country* menjadi *upper middle income country*. Kenaikan status itu tentu harus disyukuri dan diperlakukan sebagai sebuah peluang agar Indonesia bisa terus melakukan lompatan kemajuan yang lebih jauh lagi. Hal itu, kata Presiden, bisa dicapai jika kita mengaplikasikan cara kerja yang cepat dan kompetitif dengan berorientasi pada hasil.

“Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan covid-19, kita telah berhasil mengembangkan PCR *test kid*, *rapid diagnostic test* atau RDT, kemudian ventilator dan *mobile* BSL 2. Kita tidak tergantung lagi kepada produk impor.”

Joko Widodo
Presiden RI

Selain itu, kata dia, Indonesia juga butuh sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan kompetitif. “Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh elemen bangsa harus bekerja sama. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri,” ujar Jokowi.

Urusan kesehatan dan ekonomi, kata Presiden, adalah dua hal yang sama-sama penting. Tak bisa hanya mengurus covid-19, tapi urusan ekonominya tidak diurus. Itu nanti akan menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat. “Oleh sebab itu, berulang saya menyampaikan kepada para menteri, gubernur, bupati, wali kota, gas dan remnya betul-betul harus dikendalikan dengan ketepatan yang baik. Bantuan sosial harus dicek betul, jangan sampai kekurangan.”

Pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan sosial, baik berupa sembako, uang tunai, subsidi tarif listrik, maupun Kartu Prakerja kepada masyarakat golongan menengah dan bawah. Selain itu, ada stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha berupa restrukturisasi kredit dan penambahan modal.

Program-program bantuan tersebut melengkapi berbagai kebijakan reguler yang telah lama dijalankan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Nontunai.

“Sebentar lagi kita juga akan mengeluarkan bansos produktif untuk UMKM serta subsidi upah bagi pekerja aktif. Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harap stimulus itu bisa mendongkrak daya beli, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan begitu, konsumsi domestik kita akan naik sehingga kita harap pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin (kuartal II),” tegas Jokowi. (M-4)

Laksanakan Pilkada dengan Protokol Ketat

Berkaca dari negara lain, pemerintah percaya diri pilkada bisa tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com

SEMPAT ditunda karena pandemi covid-19, pemerintah dan Komisi II DPR sepakat melanjutkan kembali tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 27 Mei di Gedung DPR, pelaksanaan pilkada ditetapkan pada 9 Desember 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan tahapan Pilkada Serentak 2020 akan berbeda dengan tahapan pilkada serentak sebelumnya. Setiap tahapan pilkada akan menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19 yang sangat ketat dan wajib diikuti semua pihak, dari penyelenggara, peserta, hingga para pemilih.

“Protokol kesehatan mesti dipahami semua pihak, apa, mengapa, dan bagaimana menerapkannya. Apa yang kita minta atau apa yang kita atur bagi peserta pemilu, misalnya,” tutur Arief kepada *Media Indonesia*, beberapa pekan silam.

Guna menjamin keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pilkada, Arief menuturkan KPU sudah mengatur protokol keamanan dan kesehatan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. “Petugas

penyelenggaraan pemilu itu kami lengkapi semuanya dengan alat pelindung diri (APD), menggunakan masker, sarung tangan, *face shield*. Jadi, kami tentu mengatur regulasi agar penyelenggaraan pemilu tidak menjadi faktor penyebaran virus ini,” ungkap Arief lebih lanjut. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 diprediksi menurunkan jumlah partisipan dari tahun lalu. Namun, Arief memaparkan KPU tetap menargetkan jumlah partisipasi pemilih sebesar 77,5% atau jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya.

Anggaran

Dengan penerapan protokol itu, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp4,7 triliun. Anggaran tambahan itu dibutuhkan KPU untuk menyiapkan dan membeli kebutuhan APD bagi para penyelenggara dan pemilih yang akan datang menggunakan hak pilih di TPS.

Anggaran tambahan juga diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp478 miliar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) senilai Rp39 miliar. Sebelum covid-19, KPU bersama pemerintah daerah di 270 wilayah menyepakati besaran anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.

“Pemilih, ketika masuk ke TPS, kita sediakan sarana cuci tangan. Ketika mau masuk pintu TPS, juga dicek suhu tubuhnya. Kemudian kita lengkapi sarung tangan supaya nanti ketika bersentuhan dengan banyak benda di dalam TPS ia akan terlindungi. Keluar dari TPS pun kita sediakan tempat cuci tangan. Jadi, masuk dan keluar TPS tentu kami harap cucui tangan, ada juga *hand sanitizer*,” jelasnya.

Tantangan lain, kata Arief, ialah hoaks dan ujaran kebencian pada Pilkada Serentak 2020. Ketimbang



ANTARA/NOVA WAHYUDI

SIMULASI PILKADA 2020: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Ketua Bawaslu Abhan saat meninjau simulasi pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Pemilu 2019, penggunaan media massa mendapat porsi lebih besar. “Tahun 2019 salah satunya dipicu meningkatnya penggunaan media sosial. Terus 2020 ada pilkada, saya membayangkan penggunaan media sosial, penggunaan media elektronik, penggunaan lembaga penyiaran, itu akan meningkat karena pertemuan fisik akan dikurangi,” kata Arief.

Tatanan hidup baru

Sementara itu, Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito

Karnavian menyebut keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum adaptasi dengan kehidupan produktif yang aman dari covid-19 pada bidang demokrasi dan pemerintahan. Pilkada saat ini, kata Tito, saat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menekan angka penyebaran covid-19 dengan menggaungkan tema peran kepala daerah dalam mengatasi covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya.

Menurut Tito, penerapan tatanan

hidup baru dapat diterapkan di semua sektor, tidak terkecuali kepemiluan. “Kalau terjadi adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau *new normal* dalam semua sektor kehidupan, mengapa tidak dalam dunia politik,” ujarnya.

Tito mengungkapkan beberapa negara sukses menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Berkaca dari mereka, ia meyakini pemerintah bisa melakukan hal serupa dan melahirkan pemimpin yang kuat dan tangguh.

“Ketiga, justru bisa memilih

pemimpin yang kuat. Karena pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang bukan lahir di masa damai, di masa aman. Lahir di masa krisis, dialah seorang pemimpin yang kuat,” paparnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember telah dipikirkan dengan bijak.

Pemerintah sulit mengundurkan pilkada setelah 2020 dengan alasan harus memulai tahapan dari awal.

“Misal kalau diundur, saya katakan kalau kita undur 6-9 bulan, itu namanya bukan penundaan, tapi itu mulai dari awal lagi karena semua harus *di-update*,” kata Doli.

Belum ada jaminannya kapan pandemi covid-19 akan berakhir membuat DPR menilai pelaksanaan pilkada tetap harus dilanjutkan. Oleh karena itu, dengan berbagai macam pertimbangan, pemerintah dan DPR sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tahun yang sama.

“Salah satu yang menguatkan kita, WHO mengatakan virus ini akan terus ada selama 2-5 tahun, yang kemudian dikoreksi, yang mungkin selama-lamanya bersama kita,” ujar Doli.

Selain tidak ada jaminan kapan pandemi selesai, Doli mengungkapkan Februari 2021 ada 208 kepala daerah yang habis masa jabatan sehingga pilkada harus dilakukan. Pasalnya sulit bagi pemerintah mencari ratusan pejabat daerah yang akan ditugaskan sebagai pelaksana tugas (PLT) kepala daerah.

Di samping isu banyak kepala daerah yang tak bisa menjamin ketersediaan anggaran yang cukup jika pilkada ditunda lebih lama lagi. “Saya kira hampir 80%-90% NPHD sudah *di-deliver* ke KPU dan Bawaslu,” tukasnya. (P-5)

75

INDONESIA
MAJU

Kolaborasi adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang di tengah pandemi. Mari, terus jaga semangat berkontribusi dalam diri kita.

Bersama, kita bersatu, demi Indonesia maju.

DIRGAHAYU
INDONESIA

75

INDONESIA
MAJU

BANGGA BUATAN
INDONESIA

Fm

PT FREEPORT INDONESIA

*foto diambil sebelum pandemi COVID-19

www.ptfi.co.id

f

freeport indonesia

t

IDfreeport

@

Freeport Indonesia

y

Freeport Indonesia

Satu Data Indonesia: Kunci Pertajam Strategi dan Fokus Pembangunan

SEJAK terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI pun dibidik sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Portal SDI di data.go.id, sebagai media bagi-pakai data di tingkat nasional, menjadi rumah bagi-pakai data untuk Data Statistik, Data Geospasial, Data Keuangan Negara, dan Data Lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap data yang ditampilkan dalam laman tersebut, selain disajikan dengan Standar Data tertentu, juga memiliki Metadata atau informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan dan menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Untuk mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP), terpilih sejumlah data yang diklasifikasikan sebagai Data Prioritas.

Perbaikan tata kelola data tentu tidak lepas dari peran instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai Penyelenggara SDI tingkat pusat dan daerah. Sesuai amanat Perpres tersebut, Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat terdiri atas Dewan Pengarah yang diketuai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan enam instansi pusat lainnya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Selain Dewan Pengarah, ada pula Pembina Data yang dibagi menjadi tiga, yakni BPS sebagai Pembina Data bagi Data Statistik, BIG sebagai Pembina Data untuk Data Geospasial, serta Kemkeu sebagai Pembina Data bagi Data Keuangan Negara, serta penyelenggara di kementerian dan lembaga



FOTO-FOTO: DOK. MUCHLIS JR/BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN (DIAMBIL SEBELUM PANDEMI COVID-19).

TINJAU LOKASI: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meninjau pelaksanaan Flexiwork dan Integrated Digital Workplace (IDW) di Gedung Bappenas, Kamis (16/1/2020).

instansi pusat masing-masing, yaitu Walidata dan Produsen Data tingkat pusat. Beragamnya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SDI menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai maksud, tujuan, proses, serta kejelasan pembagian dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan kebijakan SDI.

“Sebagai Dewan Pengarah, tugas Bappenas untuk memastikan SDI mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakai antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Harmonisasi dan penyeragaman empat komponen tersebut perlu dilakukan untuk mempermudah bagi-pakai data atau interoperabilitas lintas instansi pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Peran SDI dalam RKP 2021

Finalisasi Rancangan RKP 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional



HIMPUN DATA: Flexiwork dan IDW menjadi salah satu strategi Kementerian PPN/Bappenas untuk tetap produktif dalam proses penghimpunan data bagi portal Satu Data Indonesia.

pasca pandemi Covid-19 yang adaptif dan responsif kini tengah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas. Merujuk pada tema tersebut, pembangunan di 2021 dijabarkan menjadi empat fokus utama, yaitu Pemulihan Ekonomi untuk Mendukung Pengembangan Sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

RKP 2021 juga mencakup tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dari ketujuh PN dalam RKP 2021, pelaksa-

naan pembangunan 2021 akan menekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; serta PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

“Peran Satu Data Indonesia atau SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,

Reformasi Sistem Perlindungan Nasional dan penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, sinergi antar kementerian/ lembaga, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan SDI adalah sangat penting untuk memastikan kontribusi nyata penyelenggaraan SDI dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” tambah Suharso.

Dalam Webinar Sosialisasi Satu Data Indonesia 2020 yang diselenggarakan 3-4 Agustus 2020 melalui konferensi video, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indone-

sia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa seluruh unsur penyelenggara SDI yaitu Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data baik tingkat pusat maupun daerah harus melaksanakan SDI sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. “Webinar Sosialisasi Satu Data Indonesia 2020 ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mewujudkan penerapan SDI untuk memperbaiki tumpang tindih data, pengertian data yang berbeda-beda, data yang tidak dapat dibagi-pakai, dan permasalahan lainnya mengenai data pembangunan Indonesia. Bappenas siap memfasilitasi kegiatan koordinasi Satu Data Indonesia yang melibatkan lintas instansi,” terangnya.

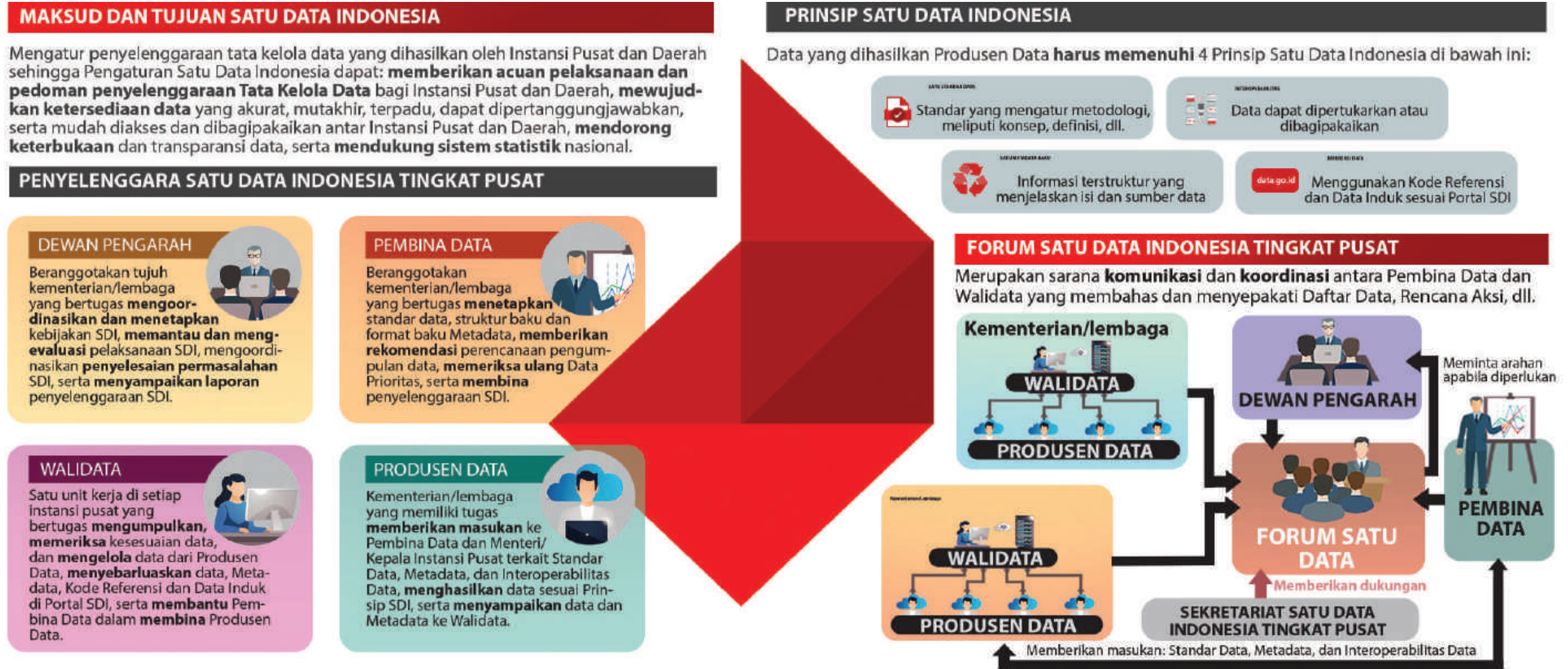
Pembahasan mengenai SDI tidak luput dari peran Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan selaku Pembina Data. Ketiganya turut menyampaikan perkembangan penyusunan Standar Data dan Metadata yang merupakan dua dari empat prinsip SDI yang harus dipenuhi sebagai syarat integrasi data ke dalam Portal SDI. Dalam penerapannya, data yang berkualitas tentu mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang

berkualitas. Hingga saat ini, tim koordinasi SPBE Nasional terus mengupayakan sinergi program dengan kebijakan SDI. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu instansi yang telah menerapkan kebijakan ini melalui standarisasi Data Induk dan Data Transaksi yang terhubung dengan portal Satu Data KKP.

Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Dewan Pengarah. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat informasi mengenai Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, serta Informasi Pemerintahan Daerah lainnya turut diselaraskan dengan penerapan SDI. Adapun untuk data kependudukan, saat ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan integrasi data dengan beberapa instansi dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan pada program pembangunan. Di sisi lain, untuk menunjang penyelenggaraan SDI, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia Pusat Data Nasional tengah mengarahkan pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional terintegrasi sehingga nantinya masing-masing instansi baik di tingkat pusat maupun daerah tidak perlu memiliki pusat data atau ruang server.

Sementara itu, dari segi keamanan data, Badan Siber dan Sandi Negara selaku koordinator domain arsitektur keamanan dalam SPBE yang berkaitan erat dengan ruang lingkup SDI, menggaris bawahi pentingnya tata kelola keamanan informasi SDI sebagai wujud kesiagaan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang hanya bisa diwujudkan dengan dukungan dari segala aspek yang terkait dan sinergi antar pemangku kepentingan.

“Sinergi antara pemerintah, instansi dan masyarakat luas merupakan kunci dalam percepatan dan implementasi kebijakan SDI. Upaya penguatan sinergi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia dengan mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian oleh kelompok kerja. Selanjutnya, permasalahan yang ditemukan dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama,” ungkap Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi.



Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Berkontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi

PEREKONOMIAN Indonesia pada kuartal kedua cukup terpukul akibat pandemi covid-19. Meski begitu sejumlah sektor mencatatkan pergerakan pertumbuhan positif di tengah situasi pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,32% secara *year on year*.

Namun, sejumlah sektor mampu menunjukkan performa. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,88%, pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 4,56%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan 2,19%.

Data tersebut menunjukkan gambaran bahwa kegiatan daur ulang serta pengelolaan sampah dan limbah memiliki nilai ekonomi yang besar dalam skala perekonomian nasional. Bahkan, di tengah kondisi pandemi, sektor ini mampu menunjukkan *resilience* (tangguh) dan tetap tumbuh positif.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengakui tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah pun, menurutnya, dalam setahun sekitar 67,8 juta ton, dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Untuk itu salah satu pendekatan yang harus dikembangkan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dengan pendekatan *circular economy* (ekonomi melingkar). Hal itu membuat pengelolaan sampah termasuk daur ulang sampah plastik menjadi solusi penting dalam mengurangi sampah plastik.

“Pengelolaan berkelanjutan membuat siklus pakai plastik tidak lagi berakhir pada tempat pembuangan sampah serta dapat kembali dimanfaatkan dalam bentuk bahan daur ulang, listrik, dan bahan bakar,” kata Siti Nurbaya, beberapa waktu lalu.

Ia mengemukakan dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan. Siti juga menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik dan dipandang sangat penting guna menangani masalah sampah.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien menuturkan, Kementerian LHK menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100%. Pada masa itu, ditetapkan target masyarakat memilah sampah mencapai 50% untuk semua jenis sampah plastik.

“Karena itu, pemilahan sampah dari sektor hulu me-



PENGLOLAAN BANK SAMPAH: Pegawai Bank Sampah memasukkan sampah plastik sedekah dari warga di Gudang Bank Sampah Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (20/6).

ANTARA/ADENG BUSTOMI

mainkan peran penting dalam upaya mendaur ulang sampah dengan prinsip 3R yakni *reduce, reuse* serta *recycle*,” tutur Vivien.

Kementerian LHK, terus melakukan edukasi pemilahan sampah dengan prinsip 3 R kepada masyarakat. “Melalui konsep *circular economy*, sampah plastik dapat diolah jadi plastik kembali dan produk lain yang bermanfaat. Untuk melakukannya pun tidak sulit, cukup pilah sampah Anda dari rumah. Pisahkan mana sampah organik dan nonorganik,” kata dia.

Tabungan

Sampah sampah yang dipilah tersebut nantinya dapat dikumpulkan dan dikelola bank-bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri LH No 13 tahun 2012, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Bank Sampah terdiri dari Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU adalah satuan bank sampah terkecil di tingkat masyarakat, RT/RW, komunitas, beranggotakan perseorangan, didirikan dengan SK

Lurah/Kepala Desa, Camat.

Adapun BSI merupakan bank sampah tingkat kab/kota, beranggotakan BSU, didirikan dengan SK kepala dinas atau bupati/wali kota.

Sampah yang terkumpul nantinya akan dipisah, sampah organik dibuat menjadi kompos sedangkan sampah plastik (PET botol) dapat dijual kembali untuk di daur ulang.

Masyarakat mendapatkan uang dari penjualan sampah plastik mereka dan disimpan layaknya tabungan. Nantinya masyarakat dapat mengambil uang tersebut untuk kebutuhan mereka.

Bila merujuk data KLHK, keberadaan bank sampah di masyarakat terus meningkat, baik secara jumlah, nasabah, maupun pengelolaan kapasitas sampahannya.

Sejak 2014, bank sampah hanya berjumlah 1.172 unit dengan peserta sebanyak 99.634. Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada 2019 jumlahnya mampu mencapai 8434 unit bank dengan peserta sebanyak 259.224 orang.

Secara sebaran wilayah bank sampah masih didominasi di Pulau Jawa dengan 6.215 unit bank sampah. Untuk luar Jawa ialah di daerah Sulawesi dan Maluku sebanyak 740 unit, Sumatra

652, Kalimantan 545, Bali dan Nusa Tenggara 180 serta Papua 102.

Pada 2019, jumlah sampah yang diolah telah mencapai 3,38 juta ton per tahun. Omsetnya pun tidak sedikit, per bulannya mencapai Rp3,8 miliar dan secara tahunan mencapai Rp45,8 miliar per tahun.

Menyikapi angka pertumbuhan pengelolaan sampah sebagai sektor yang tumbuh positif di kuartal II 2020, Wilda selaku pelaku dari bank sampah melihat adanya sejumlah faktor yang mendorong hal tersebut.

Salah satunya karena ada kesadaran dunia usaha maupun masyarakat akan sampah seiringantisipasi dalam hal kesehatan. Ia pun menilai jasa pengelolaan sampah terus bergerak selama pandemi.

Dalam hal pengelolaan sampah nonorganik, seperti plastik, logam, kaca dan kertas dapat menjadi sumber daya alternatif yang bisa diandalkan mengantisipasi keterbatasan impor bahan baku.

Begitu juga pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak yang dapat menjadi alternatif dengan harga terjangkau di tengah kesulitan bahan baku impor.

Terdampak covid-19

Terlepas dari pertumbuhan pengelolaan sampah, sektor ini pun tidak lepas dari dampak pandemi covid-19.








Para pekerja di persampahan, seperti pemulung, bank sampah, industri kecil daur ulang dan lainnya dapat dikategorikan sebagai bidang padat karya sampah.

Sektor padat karya sampah ini telah menyerap tenaga kerja yang besar yang terus

mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ekonomi sirkular baik itu dalam hal edukasi maupun mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Secara total, terdapat lebih dari 3,9 juta kepala keluarga dan pekerja UKM persampahan yang memerlukan dukungan selama pandemi covid-19. Sayangnya, saat ini oleh Kementerian Koperasi dan UKM sektor ini masih belum masuk sebagai target

Sektor-Sektor yang Tetap Tumbuh Positif pada Triwulan II 2020

Sektor	Tw II 2019 (%)	Tw II 2020 (%)
 Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,33	2,19
 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	8,33	4,56
 Informasi dan komunikasi	9,60	10,88
 Jasa keuangan dan asuransi	4,49	1,03
 Real estat	5,71	2,30
 Jasa pendidikan	6,31	1,21
 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,13	3,71
PDB triwulan II 2020 (tahunan): -5,32%		
Keterangan: Tw: triwulan		
Sumber: BPS/Kemenkeu/Riset MI-NRC		



TINJAU LOKASI: Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati (ketiga dari kanan), melakukan peninjauan saat Peresmian Plant RDF Pengolahan Sampah di Kabupaten Cilacap, 22 Juli 2020.

DOK KLHK

Dari Sampah jadi Substitusi Batubara

SAMPAH masih menjadi persoalan, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan manusia. Seiring terus bertumbuhnya populasi manusia di suatu wilayah, sebesar itu juga sampahannya bertumbuh.

Untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir, dengan memilah sampah sebagai langkah pertama di hulu.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pengolahan sampah di hilir tidak lagi sekadar di bakar, kini bisa diolah menjadi energi.

Salah satu teknologi yang kini digunakan adalah Teknologi RDF (*refused derived fuel*). Pada teknologi ini mengolah sampah melalui proses *homogenizers* menjadi ukuran yang lebih kecil atau bio masa. Produk akhir

ini nantinya akan digunakan sebagai *co-firing* batu bara di Plant Industri Semen dan Plant PLTU.

Proyek ini sudah dimulai sejak 2017, yang dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare. Pada proyek ini melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kedutaan Besar Denmark-DANIDA, Pemprov Jateng, Pemkab Cilacap, dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien mengemukakan penggunaan RDF pengolahan sampah di Cilacap dengan kapasitas 120 ton per hari sebagai tonggak sejarah penting dalam upaya implementasi

teknologi pengolahan sampah berskala kota di Indonesia.

“Teknologi ini, telah melengkapi kemajuan teknologi Waste to Electricity (PSEL) sebelumnya pada 12 Kota yang telah ditetapkan Presiden, serta Teknologi Landfill (Sanitary dan Control landfill) pada kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” terang Vivien.

Ia juga menjelaskan teknologi RDF memiliki potensi pengolahan yang besar dengan *off taker* Plant Industri Semen dan PLTU. Menurutnya, potensinya sangat besar, apalagi di Indonesia ada 34 titik pabrik semen dan 50 lebih PLTU. Dalam satu hari, ada 28 ribu ton sampah yang dapat diolah.

“Kami sangat meyakini pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan 100%, sebagaimana Perpres No 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas

group dari penerima manfaat bantuan pemerintah bagi pihak yang terdampak covid-19.

Kondisi pandemi ini pun secara tidak langsung memukul kondisi para pemulung. Para pemulung saat ini tidak dapat mendapatkan hasil sebagaimana sebelumnya karena berbagai pembatasan.

“Akibat pandemi harga botol plastik sempat jatuh, meski saat ini sudah mulai membaik. Tetapi hanya bisa untuk menyambung hidup saja,” kata Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Pris Polly Lengkong

Sedangkan untuk kertas, menurutnya, saat ini permintaan dari industri memang tinggi. Kertas bekas menjadi penyelamat bagi para pemulung di saat harga plastik botol jatuh.

Namun, Pris menuturkan untuk mendapatkan suplai kertas bekas saat ini cukup susah. Hal itu lantaran banyak pembatasan untuk aktivitas mereka.

Misalnya, akibat covid-19 perumahan kelas atas yang umumnya bisa dimasuki pemulung kini aksesnya tertutup. Begitu pula di perkampungan yang akibat covid tidak banyak yang memiliki kegiatan ekonomi.

Kesulitan lain dalam memulung kertas disebutkan Pris, kertas bekas lebih sulit di sortir. Hal itu membuat para pemulung lebih memilih menjual secara glondongan atau kertas campur.

“Harga kertas HVS tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan kardus. Namun mengumpulkannya pun tidak bisa banyak,” ungkap Pris.

Ia pun berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi dari para rekan-rekan pemulung yang terdampak langsung pandemi covid-19. (Dro/S1-25)

Kerja Bersama Selamatkan Hutan

Pendekatan masyarakat berkesadaran hukum (paralegal) merupakan tahapan penting dalam jalan panjang memantapkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen.

FERDIAN ANANDA MAJNI

ferdian@mediaindonesia.com

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 memberi banyak pembelajaran bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk melakukan berbagai aksi korektif. Salah satunya dengan menguatkan kerja sama.

“Kita bangun bersama orkestra menjaga alam agar tidak terjadi karhutla,” tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, belum lama ini.

Menurutnya, kerja sama itu dilakukan antaranggota satgas yang melibatkan Manggala Agni, pemerintah daerah, Polri, TNI, BNPB, Masyarakat Peduli Api (MPA), Swasta, dan kelompok masyarakat lainnya.

Selain dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis, kata Siti, nantinya MPA juga akan dibekali pengetahuan *paralegal*. “Jadi, ini bukan langkah baru, melainkan penyempurnaan pola kerja satgas yang sudah berjalan bagus. Dengan MPA-*paralegal* ini, kita sekaligus membangun sistem pembinaan



Pengendalian Karhutla di Lapangan selama Pandemi Covid-19

- 1. Monitoring**
Sipongi, cuaca/iklim, dan *thermal camera*.
- 2. Groundcheck**
Groundcheck titik panas dilakukan menindaklanjuti informasi titik panas/*hotspot* dan informasi dari masyarakat.
- 3. Pemadaman darat**
 - Dilakukan sedini mungkin secara mandiri atau gabungan antarlembaga.
 - Satgas Korem 044/Garuda Dempo membantu tim gabungan siaga karhutla dalam ketaatan pelaku/konsesi, Rabu (12/8).



SUMBER: KLHK/ANTARA/RISET MI-NRC/FOTO: ANTARA

masyarakat,” sebut Siti.

Dari pengalaman berat karhutla pada 2015-2019, Menteri Siti membeberkan 3 klaster utama yang menjadi strategi pencegahan karhutla. Klaster pertama diawali dengan pengendalian operasional dalam sistem Satgas Terpadu yang sudah berlangsung serta terpola.

Sistem Satgas Terpadu yang telah berjalan operasinya pada 4-5 tahun ini secara intensif ada dalam kontrol gubernur, pangdam, dan kapolda di tingkat wilayah. “Ke depan, satgas perlu diperkuat operasi

lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla dengan peran utama masyarakat atau dalam sistem kerja MPA-*paralegal*,” imbuh Siti.

Klaster kedua, lanjut Siti, dilakukan dengan analisis iklim dan rekayasa hari hujan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) sebagai terobosannya. Sementara itu, klaster ketiga ialah pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan

gambut.

Siti menyebut Riau sebagai contoh karena telah memiliki sistem *dashboard* pemantau karhutla yang baik sehingga mampu berjalan bersama Manggala Agni, BPBD, dan instansi terkait lainnya untuk mengendalikan karhutla.

Modifikasi

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Ruandha Agung Sugadirman menyatakan *monitoring* karhutla di masa pandemi dilakukan dengan

memodifikasi sejumlah kegiatan di lapangan sesuai protokol kesehatan covid-19.

“Kami melakukan deteksi dini, melakukan patroli, kemudian mengurangi risiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakar, kita menggunakan teknologi tepat guna produksi asam cuka dari kayu-kayu bekas yang bahannya bisa kita peroleh di lapangan,” kata Ruandha dalam seminar daring upaya pencegahan karhutla di tengah pandemi covid-19. Khusus teknologi modifikasi

“Ke depan, satgas perlu diperkuat operasi lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla dengan peran utama masyarakat atau dalam sistem kerja MPA-*paralegal*,”

Siti Nurbaya

Menteri LHK

cuaca dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, yakni BNPB, BPPT, TNI-AU, dan para mitra. Sejauh ini, kata Ruandha, TMC yang bertujuan membasahi gambut itu berhasil menekan potensi karhutla di Provinsi Riau.

Namun, sambungnya, pelaksanaan TMC sangat bergantung dari keberadaan potensi awan hujan di suatu wilayah. Selain itu, juga dipengaruhi kecepatan dan arah angin agar air hujan jatuh tepat pada wilayah yang ditentukan. “Mudah-mudahan tahun ini kita lebih siap menghadapi karhutla ini,” sahnya.

Terkait dengan kondisi karhutla Riau, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Basar Manullang menjelaskan, sejak 24 Juli-8 Agustus 2020 telah dilakukan 9 sorti penerbangan TMC di sana, dengan total bahan semai NaCl sebanyak 7,2 ton. Upaya itu sukses mendatangkan volume air hujan yang turun mencapai 14,4 juta meter kubik. (H-2)

Gerak Cepat, Tepat, dan Terukur Kemendagri Hadapi Covid-19

TIDAK ada yang menyangka pandemi covid-19 memberikan dampak begitu luas, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi berbagai negara di dunia lainnya. Namun, pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat, tepat, dan terukur dalam menghadapi pandemi covid-19.

Dalam kaitan tersebut, tugas dan peran Kementerian Dalam Negeri yang dikomandani Tito Karnavian tidak dapat dikatakan mudah. Lantaran Mendagri harus membina seluruh pemerintah daerah agar tanggap dalam menghadapi situasi pandemi sekaligus memastikan tata kelola birokrasi tetap berjalan dengan baik tanpa halangan sesuai dengan protokol kesehatan.

Langkah pertama mantan Kapolri ini ialah menyesuaikan sistem kerja dan kegiatan di Kemendagri agar sesuai dengan protokol kesehatan seperti mengubah pola kerja aparat sipil negara (ASN) dengan memberlakukan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) sekaligus menyesuaikan sistem daftar hadir dari electronic finger print menjadi daftar hadir pada aplikasi Mobile Simpeg berbasis Android dan IOS.

Tito juga melakukan penghematan anggaran untuk percepatan penanganan pandemi sebesar Rp1,020 triliun. Untuk memudahkan koordinasi dan penanganan pandemi sebesar Rp1,020 triliun. Untuk memudahkan koordinasi dan penanganan pandemi sebesar Rp1,020 triliun. Untuk memudahkan koordinasi dan penanganan pandemi sebesar Rp1,020 triliun.

Pembinaan pemda

Berkaitan dengan pemda, Tito menyadari penanganan pandemi di daerah belum terarah pada awal-awal covid-19



FOTO-FOTO DOK KEMENDAGRI

RAPAT KORDINASI: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat Dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rabu (13/11).

menjangkiti Indonesia. Untuk itu, Kemendagri langsung memberikan arahan panduan penggunaan APBD bagi pemda untuk mengambil langkah antisipasi dan percepatan penanganan covid-19 secara cepat, tepat, terpadu, fokus, dan sinergis antara pusat dan pemda.

Kemendagri pun mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan urutan prioritas belanja sekaligus menyusun anggaran kas secara cermat dan menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD) atas pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi gagal bayar. Tito juga meminta agar pemda menerapkan prinsip *money follow programme*, dan mempercepat padanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam rangka mendukung kebijakan anggaran di daerah, Kemendagri kemudian menerbitkan empat kebijakan penganggaran. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri

No 39/2020 tentang Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Begitu juga Instruksi Mendagri No 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta SKB Mendagri No 119/2813/SJ dan Menkeu No 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Agar tidak terjadi penyimpangan anggaran, Mendagri meminta penguatan pengawasan oleh APIP untuk *refocusing* dan pelaksanaannya untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan perekonomian dampak ekonomi. Percepatan penyaluran Dana Desa juga dilakukan Kemendagri melalui Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di 33 provinsi yang diikuti oleh 30.303 perangkat desa.

Tantangan lainnya dalam

penangan covid-19 terkait dengan penentuan calon penerima bantuan agar tepat sasaran bagi masyarakat. Untuk itu, Kemendagri melakukan verifikasi data calon penerima bantuan sosial dan subsidi terdampak covid-19 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat, Diskominfo Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang sebanyak 25.563.523.

Perbedaan persepsi dari berbagai kepala daerah terkait penanganan covid-19 pun segera diatasi dengan membentuk gugus tugas di provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, sekaligus memantau kegiatan Gugus Tugas Covid-19 secara langsung oleh Mendagri. Kemendagri juga melakukan penyusunan kebijakan komprehensif tentang manajemen penanganan Covid-19 bagi kepala daerah untuk memimpin Gugus Tugas.

Dengan beragamnya kondisi antar daerah satu dengan lainnya, diperlukan suatu

kebijakan inovatif yang dapat direplikasi untuk tatanan kenormalan baru di masyarakat. Mendagri Tito Karnavian kemudian menginstruksikan untuk membuat kompetisi inovasi daerah agar terciptanya model yang tepat untuk kenormalan baru di daerah. Hasilnya, terdapat 84 daerah pemenang dan tiga daerah favorit yang diharapkan mampu menggalakkan ide-ide inovasi dan menjadi model prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan.

Tito juga menginstruksikan pemda agar segera melakukan transformasi pelayanan virtual untuk perizinan dan non-perizinan melalui sistem dan aplikasi. Koordinasi antarinstitusi dan pemda pun dilakukan dengan pertemuan virtual hingga 20 kali untuk percepatan pembentukan PTSP Prima, sekaligus melakukan *refocusing* anggaran.

Layanan kependudukan

Untuk layanan kependudukan yang sempat terkendala, Kemendagri segera mendorong pelayanan berbasis virtual seperti untuk layanan dokumen kependudukan secara daring sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kependudukan. Misalnya dengan pencetakan dokumen non-KTP-e dan KIA dari rumah masing masing dengan kertas HVS 80 gram.

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) juga dioptimalkan sehingga masyarakat tetap dapat mencetak dokumen kependudukan (KTP-e dan KIA) dari ADM yang tersebar di pusat keramaian. Tanda tangan elektronik pun menjadi standar bagi dokumen kependudukan agar masyarakat dan pejabat terkait tidak perlu datang ke pusat pelayanan dan bagi pelayanan langsung harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Terobosan lainnya yang dilakukan Kemendagri dalam hal data kependudukan ialah membangun *big data* kependudukan. Dengan *big data* ini



dapat mendorong pelayanan digital dan kemudahan dalam verifikasi data *by name by address*.

Dengan telah terbangunnya *Big Data* Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan. Data kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan dalam pembangunan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminalitas.

Big data dapat langsung menjadi basis data berbagai program, seperti Sensus Penduduk 2020, Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, dan Penerimaan CPNS. Tito pun meyakini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam mewujudkan penerapan *Single Identity Number* (SIN) sekaligus masuk ke era integrasi data berbasis data kependudukan.

Terbukti dalam penanganan covid-19 pun sangat terlihat kegunaannya dalam rangka jaminan kesehatan. Data kependudukan telah digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi, verifikasi data pasien covid-19, serta verifikasi penerima kartu prakerja guna mencegah korupsi dan agar bantuan tepat sasaran ke masyarakat.

Mendorong pemilu

Pandemi ini juga mem-

berikan dampak langsung kepada penerapan pilkada langsung tahun ini. Untuk itu, Kemendagri langsung mengubah sejumlah ketentuan guna menyesuaikan dengan kondisi pandemi.

Kemendagri langsung menginisiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU, dengan tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 yang diundur, dari semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Perppu yang dimaksud telah disosialisasikan kepada 270 daerah Pilkada yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota antara lain melalui asosiasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan media publik lainnya.

Kemendagri juga mendorong KPU agar menyesuaikan pelaksanaan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19. KPU juga diminta segera menerbitkan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang posisi saat ini telah memasuki tahap harmonisasi. (Dro/S2-25)

Dukungan Penuh Badan POM untuk Ketersediaan Akses Obat dan Obat Herbal yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu

Selangkah Lagi Temukan Vaksin COVID-19

Tantangan terbesar dalam menghadapi pandemi ini adalah ditemukannya obat COVID-19. Selain itu, dibutuhkan penanggulangan jangka panjang sebagai upaya preventif melalui vaksinasi. Dengan demikian ketersediaan vaksin menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia agar merdeka dari COVID-19 selamanya. Selaku lembaga otoritas obat di Indonesia, Badan POM berupaya wujudkan harapan masyarakat dengan pastikan akan terlibat penuh dalam pengembangan vaksin COVID-19 dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan data WHO per 31 Juli 2020, terdapat 26 kandidat vaksin yang saat ini berada dalam tahap uji klinik dan 139 lainnya sedang dalam tahap uji pra-klinik. Indonesia turut andil dalam proses pelaksanaan uji klinik terhadap salah satu kandidat vaksin COVID-19 tersebut, yaitu Vaksin SARS CoV-2 Inactivated produksi Sinovac, Tiongkok. Pengembangan dan penelitian vaksin di Indonesia ini merupakan kerja sama antara PT. Biofarma, Fakultas Kedokteran UNPAD, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, dan Badan POM.

Setelah melakukan evaluasi terhadap hasil uji klinik vaksin COVID-19 tahap I dan II, Badan POM merekomendasikan dilakukannya uji klinik tahap III untuk mengetahui sejauh mana efektivitas vaksin memunculkan antibodi spesifik terhadap COVID-19 pada pasien di Indonesia, sekaligus mengetahui potensi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Selama (11/08) calon vaksin COVID-19 akhirnya disuntikkan untuk pertama kalinya kepada calon subjek uji klinik. Presiden RI, Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan uji klinik di Rumah Sakit Pendidikan UNPAD Bandung sebagai sentra pelaksanaan uji klinik. Turut hadir Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB/Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Agung Wibowo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan POM Penny K. Lukito, dan lintas sektor terkait.

Uji klinik tahap III akan dilakukan pada 1.620 subjek yang akan mendapat suntikan vaksin sebanyak dua kali, yaitu pada hari ke-0 dan hari ke-14. Pengamatan terhadap efek dan keamanan vaksin dilakukan hingga enam bulan ke depan. “Uji klinik tahap III untuk calon vaksin ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga di Brazil, Chile, Bangladesh, dan Turki,” jelas Ketua Tim Uji Klinik, Kusnandi Rusmil.

“Badan POM akan terus melakukan pendampingan agar vaksin COVID-19 yang dihasilkan benar-benar memberikan khasiat/efikasi dengan keamanan dan kualitas yang terjamin, serta tersedia dalam jangka waktu sesuai yang diharapkan,” jelas Kepala Badan POM. Pengawasan Badan POM terhadap pelaksanaan uji klinik calon vaksin COVID-19 dimulai dari pemberian Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dan inspeksi Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). “Pelaksanaan uji klinik yang baik akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan ilmiah sebagai produk yang aman, berkhasiat/efikasi dan bermutu. Badan POM juga akan memberikan asistensi dalam proses registrasi melalui mekanisme Emergency Use Authorization (EUA) dengan conditional approval, untuk mempercepat akses vaksin COVID-19 sampai ke masyarakat”, tegas Kepala Badan POM.



Penny K. Lukito

Kepala Badan POM RI

Tidak hanya itu, Badan POM juga memastikan vaksin yang diuji, diproduksi sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Khusus untuk vaksin, perlu dilakukan pengujian untuk memperoleh sertifikasi *lot release* dari Badan POM untuk menjaga keamanan dan mutu vaksin tersebut, yaitu uji endotoksin dan toksitas abnormal, serta pemeriksaan fisik dan dokumen mutu.

Indonesia sendiri tengah mengupayakan penyediaan vaksin melalui dua jalur pengembangan. Jalur pertama adalah pengembangan vaksin dari dalam negeri, yaitu vaksin merah putih. Jalur ke-dua melalui kerja sama dengan pengembang di luar negeri yang telah lebih dahulu terdampak COVID-19 dan saat ini sudah memasuki tahap uji klinik.

“Kita sedang kembangkan vaksin merah putih menggunakan isolat dari virus COVID-19 yang beredar di Indonesia. Vaksin ini full dikembangkan oleh Lembaga Eijkman bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan POM, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, serta universitas-universitas di Indonesia,” jelas Presiden RI. “Indonesia akan bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Kita masih sangat terbuka untuk kemungkinan kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan vaksin ini”, lanjutnya.

Jaga Imunitas Tubuh dengan Obat Herbal

Faktanya, sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Calon vaksin COVID-19 pun sedang dalam proses uji klinik tahap III. Sembari menunggu, obat herbal dapat dijadikan sebagai salah satu opsi menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari COVID-19.

Sebagai negara yang memiliki tidak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan, Indonesia memiliki bermacam tanaman obat yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Potensi ini merupakan modal Indonesia untuk menjadi pengeksport obat herbal terbesar di dunia.

Obat herbal dikelompokkan menjadi tiga yaitu Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka. Pengelompokan berdasar proses pembuatan, bentuk sediaan, serta cara dan tingkat pembuktian manfaat dan mutunya.

Jamu terbukti secara empiris

berkhasiat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, baik promotif maupun preventif.

Obat Herbal Terstandar adalah sediaan obat berbahan alam yang telah distandardisasi bahan bakunya, telah memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai persyaratan yang berlaku, serta klaim khasiat yang dibuktikan secara ilmiah/praklinik.

Fitofarmaka merupakan obat berbahan alam yang telah distandardisasi bahan baku dan produk jadinya, telah memenuhi persyaratan mutu sesuai persyaratan yang berlaku, serta status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik.

Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka termasuk dalam Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Badan POM berupaya mengembangkan obat herbal agar berdaya saing dan menjadi salah satu alternatif pengobatan formal di Indonesia. Upaya tersebut sejalan dengan percepatan hilirisasi untuk mendorong pengembangan industri obat herbal. Dalam upaya hilirisasi tersebut, Badan POM telah melakukan pendampingan penelitian, percepatan evaluasi dokumen penelitian, uji pra-klinik dan klinik, workshop, bimbingan teknis, serta konsultasi dan advokasi.

Wujud nyata dukungan Badan POM terhadap pengembangan obat berbahan herbal dimulai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka pada 13 September 2019 lalu. Melalui Satgas ini akan dibangun sinergi ilmu pengetahuan dan teknologi OMAI, sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi/dikomersialisasi menjadi produk OMAI berkualitas.

Februari 2020 lalu, Badan POM menyelenggarakan “Bursa Hilirisasi Inovasi Herbal Indonesia 2020” yang bertujuan mendorong para peneliti dari akademisi untuk lebih bersemangat dalam berkarya dan menggali sumber kekayaan alam Indonesia yang kaya akan tanaman obat.

Produk herbal Indonesia sangat potensial untuk diterima di pasar luar negeri. Globalisasi akses obat herbal seperti jamu dan fitofarmaka terus dikawal agar berdaya saing tinggi dan menjadi komoditas ekspor unggulan, sehingga dapat meningkatkan potensi pasar, tidak hanya untuk konsumsi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Dukungan Badan POM dalam hal ini dengan memberikan kemudahan ekspor, review regulasi terkait ekspor, dan mempromosikan produk obat herbal Indonesia dalam kancah internasional, antara lain pada The 27th Annual Meeting of International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) di Sapporo, Jepang (28/07/2019) dan The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine Industry Expo 2019 di Tiongkok pada Agustus 2019.

Selama masa pandemi COVID-19, kebutuhan akan jamu melonjak



FOTO-FOTO DOK BPOM

Presiden RI bersama Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri BUMN, Kepala BNPB, Menteri Kesehatan, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan POM meninjau mulainya pelaksanaan uji klinik di RS Pendidikan UNPAD Bandung sebagai sentra pelaksanaan uji klinik, Selasa (11/08).

seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan imunitas tubuh. Peningkatan permintaan jamu ini menjadi peluang untuk pengembangan produk herbal Indonesia. “Badan POM mengawal pengembangan obat herbal, terutama produk yang diperlukan untuk memelihara daya tahan tubuh selama pandemi. Badan POM memberikan pendampingan bagi para peneliti dan pelaku usaha sejak penyusunan protokol uji hingga pelaksanaan uji klinik sesuai Good Clinical Practice agar menghasilkan data klinik yang valid dan kredibel sehingga produk herbal tersebut dapat menjadi fitofarmaka,” jelas Kepala Badan POM pada acara seminar online yang diselenggarakan GP Jamu bersama Krista Exhibitions bertema “Kondisi Jamu dan Kegunaan Jamu untuk Kesehatan di masa Pandemi COVID-19” (10/08). “Saat ini Badan POM tengah mendampingi delapan penelitian produk OMAI untuk penanggulangan COVID-19 yang melibatkan instansi terkait, rumah sakit, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan industri. Sinergi yang baik ini diharapkan mempercepat hilirisasi penelitian produk OMAI menjadi produk komersial untuk dimanfaatkan masyarakat,” lanjutnya.

Percepatan penelitian OMAI juga dilakukan Badan POM melalui Focus Group Discussion (FGD) “Tantangan Obat Berbahan Alam/Herbal sebagai Produk untuk Kuratif”, Kamis (14/05). FGD diikuti oleh para peneliti dan akademisi dari perguruan tinggi dan Lembaga riset, pelaku usaha

industri obat herbal, praktisi herbal, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi di bidang obat herbal, serta para pemerhati jamu, membahas bagaimana uji klinik untuk obat herbal dalam mendorong obat herbal sebagai penangkal COVID-19.

Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kemudahan berusaha dan pengembangan obat herbal di Indonesia. “Badan POM telah melakukan relaksasi dan percepatan perizinan sebelum pandemi COVID-19. Di masa pandemi, registrasi prioritas diberikan untuk perizinan obat herbal dengan klaim memelihara daya tahan tubuh,” ungkap Kepala Badan POM. Untuk produk jamu, pemenuhan persyaratan izin edarnya cukup dibuktikan dengan data dukung penggunaan secara empiris. Untuk obat herbal terstandar harus didukung dengan hasil uji pra-klinik pada hewan coba berupa uji keamanan yaitu toksisitas akut, sub kronik/kronik, toksisitas khusus (teratogenik, mutagenik, iritasi, sensitisasi), serta pemanfaatan dan standarisasi bahan baku. Sedangkan untuk fitofarmaka, pendaftaran izin edarnya harus memenuhi persyaratan telah dilakukan uji pra-klinik dan uji klinik pada manusia. Uji klinik pada manusia harus memenuhi Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan standarisasi bahan baku dan produk jadi sehingga dapat menjamin kontinuitas mutu produk.

Badan POM memberikan fleksibilitas dalam proses pemberian Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dan menyediakan fasilitas konsultasi teknis untuk mendukung pengembangan OMAI. Fleksibilitas yang diberikan untuk obat herbal antara lain uji pra-klinik pada hewan coba tidak perlu dilakukan pada produk jamu yang telah memiliki bukti empiris dan nomor izin edar serta klaim sejalan dengan penanganan COVID-19. Dosis uji pada manusia juga

dapat menggunakan dosis pada penggunaan empiris. Selain itu, Uji Klinik Fase I tidak perlu dilakukan bila profil keamanan dan manfaat pada hewan coba sudah sesuai. Bila profil toksisitas dapat diterima serta profil farmakodinamik menunjukkan potensi yang meyakinkan, maka Uji Klinik Fase II dan III dapat digabung, namun tentu saja memerlukan pencermatan setiap kasusnya.

Masyarakat Bijak, Hoaks pun Sirna

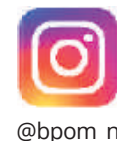
Meningkatnya kebutuhan jamu pada masa pandemi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks atau informasi menyesatkan terkait obat herbal. Belakangan banyak oknum yang mengklaim produk buataannya dapat menangkal bahkan menyembuhkan pasien COVID-19. Informasi yang keliru ini jelas merugikan masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh Badan POM untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, antara lain dengan menerbitkan penjelasan/klarifikasi dan melakukan edukasi ke masyarakat baik tatap muka maupun melalui berbagai media termasuk media sosial.

Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Pelaku usaha sebagai penanggung jawab keamanan, khasiat, dan mutu produk harus memastikan bahwa informasi yang tertera pada label dan kemasan serta promosi dan iklannya benar, informatif, dan edukatif.

Masyarakat diimbau untuk selalu memberikan dukungan terhadap berbagai upaya Pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Termasuk berperan aktif dengan menjadi konsumen yang lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi terkait COVID-19, terutama di media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.



Kepala Badan POM menyerahkan bantuan paket bakul jamu gendong dan sertifikat keikutsertaan bimbingan teknis secara simbolis kepada pelaku usaha jamu gendong di Yogyakarta, sebagai rangkaian kegiatan pemberdayaan UMKM serta usaha jamu gendong untuk menjamin keamanan dan mutu produk, Yogyakarta (12/08).



@bpom_n



Bpom.official



@BPOM_RI



Badan POM RI

Bansos Perisai bagi Masyarakat Hadapi Pandemi

Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara simultan, yakni berbarengan dengan pemutakhiran perubahan data untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.

IHFA FIRDAUSYA
ihfa@mediaindonesia.com

BANTUAN sosial (bansos) menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekonomi sosial masyarakat di tengah pandemi covid-19. Selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan program bansos khusus di luar bansos reguler dijalankan untuk meringankan beban anjaknya pendapatan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian Sosial menggelontorkan untuk bantuan sosial tunai (BST) gelombang I dan II sebesar Rp32,5 triliun. Pencairan tahap I dari April 2020 dimajukan menjadi Maret 2020. “Percepatan pencairan dana PKH diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus korona,” kata Menteri Sosial beberapa waktu lalu.

Bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), bantuan yang diberikan berupa sembako. Bansos sembako menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK), terbagi untuk 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Tangerang, Tangsel,

dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek).

Bansos sembako untuk DKI dan Bodetabek senilai Rp600 ribu/bulan/keluarga. Bansos disalurkan setiap bulan sebanyak dua kali selama periode April-Juni 2020. Kemudian, pemerintah memperpanjang penyaluran bansos sembako dengan periode kedua Juli-Desember 2020 senilai 300 ribu/bulan/keluarga.

Bansos khusus kedua ialah bantuan sosial tunai (BST). BST menjangkau 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di luar Jabodetabek.

Pada gelombang I April-Juni 2020, besaran BST ialah Rp600 ribu per bulan yang telah dibagikan melalui tiga tahap. Nilai BST gelombang II sebesar Rp300 ribu selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2020.

Selain kedua bansos khusus itu, Kementerian Sosial mengakselerasi bansos reguler seperti program sembako (reguler) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejumlah upaya dilakukan.

Pertama ialah perluasan program sembako menjadi 20 juta KPM dan peningkatan indeks menjadi Rp200 ribu/bulan/KPM. Kedua ialah peningkatan dan percepatan penyaluran bansos PKH dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan penyaluran dari 3 bulan menjadi per bulan.



ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

BANSOS TUNAI: Petugas Kantor Pos menyerahkan bukti verifikasi pemberian bantuan sosial tunai kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu (6/5).

Di sisi lain, penyaluran bansos bukan tanpa cela. Sejumlah permasalahan masih menghantui. Antara lain permasalahan data penerima bansos, penyediaan komoditas, hingga kendala penyaluran ke pelosok Tanah Air.

Kementerian Sosial terus mendorong perbaikan data penerima bansos kepada pemerintah daerah (pemda). Untuk mempercepat penyaluran BST, misalnya, Kemensos telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kita telah bersurat kepada pemda atau pemkot untuk secepatnya terus memperbaiki data penerima BST. Kita juga telah mempermudah sistem *update*

data di DTKS,” jelas Mensos.

Dalam penyaluran BST, Mensos menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam dan menggerakkan semua sumber daya.

“Kemudian agar PT Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, pos RW, dan sebagainya. Agar pelayanan terhadap KPM makin dekat,” jelasnya.

Kemensos juga terus berupaya mempermudah penyaluran bantuan sosial di wilayah terpencil. Menteri Sosial menginstruksikan penyaluran BST untuk daerah 3T (terpencil, terdepan, terluar) dilakukan tiga

tahap sekaligus. Mensos mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara simultan, yakni disalurkan berbarengan dengan pemutakhiran perubahan data. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Pengawasan

Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar menegaskan tiga hal yang jadi fokus terkait dengan penyaluran bansos ialah kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas. “Peran kami dari inspektorat jenderal tentunya mengawal terkait dengan kecepatan dan ketepatan. Ini sudah kami lakukan,” katanya, Kamis (30/7).

“Akuntabilitas juga dijaga. Mereka yang menerima bantuan di setiap wilayah harus dilengkapi berita acara serah terima bantuan (BAST). Intinya dari sisi kecepatan, ketepatan, alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Menteri, termasuk dari sisi akuntabilitas,” jelasnya.

Menteri Sosial juga memastikan adanya pemantauan ketat terhadap vendor penyedia komoditas sembako, termasuk dengan menerapkan standar audit yang ketat. Hal itu bertujuan memastikan KPM penerima bantuan tepat harga dan tepat kualitas.

“Kami melakukan audit dan *monitoring* secara intensif dan sistematis terhadap vendor penyedia komoditas sembako. Termasuk memproses

laporan dari lapangan yang terkait vendor yang mungkin mengirimkan *item* komoditas yang tidak sesuai,” kata Mensos.

Terbaru, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) terkait dengan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah kabupaten/kota. SKB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data sehingga program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran.

“Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada istilah bantuan sosial ‘kurang tepat sasaran’ ini karena proses pemutakhiran data belum berjalan optimal,” kata Mensos Juliari dalam keterangan resmi, Minggu (9/8).

Di sisi lain, Mensos memastikan setiap penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan diawasi melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Di internal, Kemensos juga mengaktifkan pengawasan internal melalui aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

“Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingan dari institusi seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat pengadaan,” ujarnya. (H-3)

Penyesuaian SKB 4 Menteri Tetap Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Warga Sekolah



PROTOKOL KESEHATAN DI SEKOLAH: Siswa SD di Musi Banyuasin sedang diperiksa suhu tubuhnya saat hari pertama ajaran baru, 13 Juli 2020. Selain wajib menggunakan masker, para siswa juga harus ikuti protokol kesehatan selama berada di sekolah.



MID/OWI APRIANI

SETELAH melakukan evaluasi dan menerima masukan dari para ahli, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di zona selain merah dan oranye. Melalui penyesuaian ini, sekolah yang berada di zona kuning dan hijau dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain evaluasi, penyesuaian SKB Empat Menteri ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, dan berbagai masukan dari para ahli, serta organisasi lainnya.

“Prioritas utama pemerintah adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi covid-19,”

jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, belum lama ini.

Dalam kaitan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im menyebutkan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Namun dalam perkembangan, pelaksanaan PJJ memiliki risiko seperti terbatasnya infrastruktur dan sarana lainnya yang menyebabkan siswa kesulitan belajar.

Melalui relaksasi kebijakan ini, setidaknya sebanyak 43 persen peserta didik di zona hijau dan kuning dapat memilih melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sementara 57 persen lainnya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Ainun menegaskan, pemerintah tidak memaksakan semua sekolah di kawasan kuning dan hijau untuk kembali menjalankan pembelajaran tatap muka. “Kita memberikan pilihan dan tidak mewajibkan kegiatan tatap muka serta merta dilakukan setelah penyesuaian SKB ini. Pihak yang menetapkan boleh-

tidaknya sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka tetap pemerintah daerah bersama kepala sekolah, komite sekolah, serta orangtua murid,” terang Ainun.

Sementara itu, untuk jenjang SMK dan pendidikan tinggi yang memerlukan proses pembelajaran secara praktik diperbolehkan masuk ke sekolah atau kampus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk sekolah madrasah dan sekolah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan kegiatan tatap muka. Meski begitu, pelaksanaan pembukaan asrama dilakukan secara bertahap dengan kapasitas dibatasi hingga 50% dari jumlah keseluruhan siswa pada masa transisi bulan pertama dan 100% pada bulan kedua.

“Untuk asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, pada masa transisi diperbolehkan 25% dan secara bertahap meningkat 25% setiap bulannya,” tutur Ainun.

Begitu juga untuk pembelajaran tatap muka dimulai 30%- 50% dari

standar peserta didik satu kelas. Untuk jam belajar dan jumlah hari pun dikurangi untuk mengurangi risiko penyebaran virus korona baru yang mematikan.

Terkait evaluasi, Ainun menegaskan hal itu akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama kepala satuan pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 untuk memantau tingkat risiko covid-19 di daerah.

Bila nantinya terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali.

Kurikulum disederhanakan

Dalam kaitan dengan kurikulum, Kemendikbud meluncurkan kurikulum yang disederhanakan sekaligus pedoman pelaksanaannya.

Kepala Badan Penelitian, Pe-

ngembangan, dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno, menuturkan, penyederhanaan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa kesulitan pada pembelajaran anak jika tanpa didampingi guru. Berbagai kendala ini dikhawatirkan akan berdampak kepada kehilangan pengalaman belajar bila tidak segera diatasi.

Namun, penyederhanaan kurikulum ini bukan merupakan keharusan yang perlu dilakukan oleh guru, melainkan sebuah pilihan. Sekolah dapat tetap menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum yang telah disederhanakan secara mandiri.

“Penyederhanaan ini dilakukan dengan menghilangkan bagian yang dianggap tidak begitu esensial sehingga guru dapat memilih apakah yang utuh atau yang sudah disederhanakan kompetensi dasarnya maupun hasil mapping kurikulumnya sendiri. Ini sifatnya opsi,” terang Totok.

Selain kurikulum yang disederhanakan, guna meminimalisasi

risiko kehilangan pengalaman belajar, Kemendikbud juga meluncurkan modul pembelajaran. Berdasarkan hasil survei pada siswa jenjana SD dan PAUD, banyak yang menyampaikan kesulitan belajar dari buku teks. Baik itu karena bosan, tidak paham, ataupun alasan lainnya.

Untuk itu, materi ajar modul ini diluncurkan dengan harapan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami, sebab berbasis kegiatan atau aktivitas. Totok menyebut, ada tiga modul, yaitu modul untuk sendiri, modul untuk guru, dan modul orangtua sebagai panduan bagi orangtua saat pendampingan anaknya.

“Banyak orangtua mengeluh karena sulit memahami bila berbasis teks. Nah, buku ini berbasis pada aktivitas harian. Misalnya aktivitas memasak atau berkebun, bahkan bisa dikembangkan sendiri aktivitas lainnya, ini bagian dari pembelajaran. Jadi ini bukan instruksi penyeragaman yang harus mengacu ke modul,” pungkas Totok. (Dro/S2-25)

Kampus Merdeka Menuju Pendidikan Tinggi Berkualitas

Jika pendidikan tinggi memberikan hasil pendidikan kualitas dunia, lulusannya ialah SDM yang unggul dan kompetitif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

ATIKAH ISHMAH WINAHYU
atikah@mediaindonesia.com

SISTEM pendidikan tinggi yang sehat ditandai dengan kualitas perguruan tinggi yang semakin bermutu dan relevan. Selain itu, diperlukan pemerataan akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah meluncurkan Program Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari konsep Merdeka Belajar. Program itu bertujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam mengatakan kebijakan itu memiliki semangat yang sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadikan sumber daya pendidikan Indonesia sebagai insan merdeka yang bertanggung jawab, dewasa, produktif, dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. “Ki Hajar Dewantara pada 1938 sudah menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Insan merdeka, menurut Ki Hajar, memiliki tiga

ciri, yakni mandiri-berdikari, mampu menghidupi dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menentukan hari esok atau masa depannya sendiri. Semangat itulah yang kita bawa dalam konsep Kampus Merdeka,” kata Nizam saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin. Menurut Nizam, pendidikan tinggi merupakan transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja, manusia pradewasa menuju manusia dewasa yang merdeka. Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus menjadi tempat yang memerdekakan potensi mahasiswa untuk berkembang secara optimal. Terdapat empat kebijakan di dalam Program Kampus Merdeka. Kebijakan pertama ialah otonomi bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk membuka program studi baru. Otonomi itu diberikan kepada PTN dan PTS yang terakreditasi A dan B, serta telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau perguruan tinggi yang masuk daftar QS Top 100 World Universities. Kebijakan Kampus Mereka yang kedua ialah program reakkreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Ke depan, akreditasi

yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, tetapi akan diperbarui secara otomatis. Kebijakan ketiga terkait dengan kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN badan hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat ialah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (SKS). “Karena merupakan transisi ke dunia kerja, proses pendidikan di PT harus menyiapkan sebaik mungkin mahasiswa pada dunia nyata dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali dan mengasah kompetensinya di dunia nyata. Mendapatkan *hard skills* dan *soft skills* tidak hanya dari ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium, tapi juga dari dunia kerja, dari kampus kehidupan,” terang Nizam.

Berkelas dunia
Nizam mengatakan capaian sejumlah perguruan tinggi dalam



INOVASI MAHASISWA: Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjelaskan hasil inovasi pendidikan pada Pameran Produk Inovasi di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/3).

pemeringkatan dunia melalui berbagai lembaga merupakan salah satu bentuk pengakuan dunia terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Kualitas pendidikan, lanjut Nizam, harus tetap menjadi fokus utama dan yang dihasilkan perguruan tinggi harus relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. “Fokus kita harus pada memberikan pendidikan terbaik berkelas dunia untuk mahasiswa kita, melakukan riset dengan inovasi dan karya yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan pendidikan tinggi yang memberikan hasil pendidikan kualitas dunia, lulusannya adalah SDM yang unggul dan kompetitif sehingga negara akan jaya,” kata Nizam. Menurut Nizam, Ditjen Dikti Kemendikbud terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, baik dari sisi tata kelola, program dan pendanaan, maupun berbagai upaya lainnya.

“Untuk meningkatkan relevansi, salah satunya adalah dengan mengawinkan perguruan tinggi dengan dunia kerja, dunia usaha, dan industri,” imbuhnya. Untuk mewujudkan perguruan tinggi Indonesia berkualitas dunia, Ditjen Dikti membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi unggul dunia, seperti kerja sama *MIT-Indonesia Research Alliance* (MIRA) antara Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan konsorsium perguruan tinggi unggul di Indonesia, ASEAN University Network, EU *partnership*, sejumlah kerja sama bilateral *U to U* (kampus dengan kampus) maupun *G to G* (pemerintah dengan pemerintah), pertukaran profesor, peneliti, dan mahasiswa. Kemudian program bersama seperti *double degree, joint degree*, dan *exchange*. “Jadi, riset bersama, publikasi bersama, dan berbagai program lintas negara,” tuturnya. Sejumlah kampus di Indonesia mengalami kenaikan peringkat

berdasarkan hasil pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2021. Terlihat peningkatan signifikan beberapa kampus, misalnya Universitas Gadjah Mada (UGM) melesat tajam dari sebelumnya peringkat ke-320 dalam QS WUR 2020 kini menjadi 254 dunia. UGM juga menduduki peringkat ke-19 dalam penilaian dari lembaga pemeringkat 4 International Colleges & Universities (4ICU) 2020. “Hasil ini menjadi penyemangat selama situasi pandemi, pembelajaran mahasiswa dilakukan secara daring,” ujar Direktur Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi (DSSDI) UGM, Widyawan, seperti dikutip dari laman UGM, Selasa (11/8). Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI), UGM, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) masuk peringkat 100 besar dunia pemeringkatan Times Higher Education (THE) 2020 untuk kategori *impact ranking*. (H-3)

Menerobos Blank Spot dengan BTS Mobile dan 5 Ribu Tablet

Sudah saatnya dunia pendidikan tinggi terintegrasi dengan dunia industri (usaha) dalam menghasilkan karya-karya inovasi yang bermanfaat bagi kemandirian bangsa dan negara.

AGAK sedikit berbeda memang masalah yang dijumpai di pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah terkait proses belajar daring. Kesiapan SDM yang membedakannya. Entitas di pendidikan tinggi tentunya juga dituntut lebih siap. Untuk mempercepat pelaksanaan perkuliahan secara daring dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah melalui Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud) merancang dan menggariskan reka cipta guna membantu mengatasi masalah yang muncul di masa darurat ini. Di antaranya dengan menyiapkan sarana Base Transceiver Station (BTS) Mobile dan 5.000-an Tablet Modeling karya anak bangsa yang akan ditempatkan di daerah rural atau wilayah yang sulit dijangkau akses internet. Menariknya, BTS Mobile dan tablet ini akan dibuat melalui kerja sama kampus dan kalangan industri. Upaya ini sebagai bentuk komitmen penuh dalam upaya pemulihan pasca pandemi

Covid-19 dengan membangun sinergitas pada berbagai pihak sebagai bagian dari Penta-Helix Collaboration. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani saat menjelaskan terkait peran Ditjen Pendidikan Tinggi untuk membantu pembelajaran daring di masa pandemic Covid-19. “Di tengah situasi pandemi seperti ini, Ditjen Dikti Kemendikbud terus berupaya membangun ekosistem reka cipta yang mempertemukan antara pereka cipta dan industri. Ekosistem ini perlu dibangun agar implementasi ide dari pereka cipta dan industri tidak hanya selesai di atas meja, melainkan harus dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Paris sapaan akrab Paristiyanti. Ia pun menjelaskan maksud dan tujuan program BTS Mobile dan tablet tersebut, yang sangat dibutuhkan kalangan akademisi kampus saat ini. Yakni, pertama Ditjen Dikti turut serta dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik

agar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat terlaksana dengan baik. Kedua, memberikan alternatif infrastruktur digital murah bagi sebagian besar pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Ketiga adalah membantu kestabilan penggunaan barang dalam negeri. Ke empat, dampak ekonomi dan sosial dari terserapnya produk hasil riset teknologi tinggi melalui ekosistem industri elektronika di Indonesia, yaitu tersedianya kebutuhan perangkat buatan dalam negeri serta turunan komponennya yang secara langsung akan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan produksi perangkat dan komponen penunjangnya. Hal ini tentu akan menimbulkan efek industri yang tidak sedikit bagi Indonesia. Lantas kelima, semua produk dan layanan jasa desa digital akan berjalan di atas platform teknologi karya anak negeri. Dari sini diharapkan menjadi benih dari kemandirian bangsa di bidang teknologi informasi. Lebih lanjut, Paris mengutarakan sejak masalah pandemi Covid-19 mencuat, Ditjen Dikti Kemendikbud mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk berkontribusi dalam penanganannya. Upaya untuk menciptakan ekosistem kolaborasi ditingkatkan dengan mempertemukan pereka cipta dan industri. Hal ini didukung dengan adanya potensi yang besar untuk reka cipta yang tersebar di banyak perguruan tinggi, serta adanya sekitar 280 ribu dosen dan peneliti yang dapat berperan dalam pengembangan ekosistem reka cipta saat ini.

BTS mobile
Data yang dihimpun Ditjen Dikti Kemendikbud, menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa di daerah terpencil atau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tidak dapat melaksanakan PJJ selama pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas pendukung seperti akses internet, komputer, laptop, maupun ponsel. Untuk mengatasi hal itu Ditjen Dikti menyiapkan sarana Base BTS Mobile dan 5.000-an Tablet Modeling karya anak bangsa. Hasil reka cipta ini akan menjadi

alternatif solusi dalam menjawab persoalan PJJ di masa pandemi. Jum’at lalu (7/8), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Prof. Nizam mengunjungi pusat unggulan iptek bidang Advanced Intelligent Communications (AICOMS), Universitas Telkom untuk meninjau secara langsung pengembangan BTS Mobile yang dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab persoalan PJJ. Pada kunjungan tersebut, Nizam juga berbincang bersama Assoc. Prof. Khoirul Anwar, pemilik paten teknologi double FFT yang merupakan konsep dasar yang dipakai pada teknologi 4G (dan juga di 5G) yang menjadi standard international telecommunication union (ITU) dan Vice-chairman Asia Pacific Wireless Group (AWG), yang berpusat di Bangkok, Thailand. “Salah satu cara untuk membantu pembelajaran di dunia perguruan tinggi antara lain adalah dengan mengembangkan teknologi yang juga berasal dari para inovator dan peneliti di perguruan tinggi. Kedaulatan teknologi harus dilakukan secara bersama-sama, dan kami yakin kita pasti bisa melahirkan teknologi, inovasi, dan reka cipta yang membantu masyarakat Indonesia,” ungkap Nizam. BTS mobile dibuat oleh Ditjen Dikti bekerja sama dengan sejumlah kampus di Indonesia. BTS mobile tersebut nantinya dapat secara aktif masuk ke daerah terpencil di tanah air untuk membantu menangkap dan merelai sinyal internet untuk daerah rural yang berjarak dari pusat kota 10-2.600 km yang kemudian disebarkan lagi ke desa-desa di daerah rural tersebut dengan radius 5 km. Setidaknya sudah disiapkan 3 jenis teknologi yang dipersiapkan oleh Ditjen Dikti untuk berbagai jenis daerah rural berdasarkan jaraknya dari pusat kota. Disadari ruang kolaborasi bersama investor (industri) dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam rangka pengembangan reka cipta dan mendorong transformasi penelitian yang dapat bersinergi dengan industri.(H-1) Paris juga mendorong bahwa melalui kerjasama ini dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Dikti. Kedua, berbagai kerjasama dapat dilakukan dengan



Prof. Nizam
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI



Paristiyanti Nurwardani
Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI

fokus kepada peningkatan sumber daya manusia dimana peran perguruan tinggi sangat diperlukan. Selain itu, Ditjen Dikti juga akan mengembangkan program competitive fund, matching fund dengan pendekatan market driven yang mendekatkan dunia industri dengan inovator di perguruan tinggi. Nizam meyakini bahwa melalui peran Penta-Helix Collaboration yakni perguruan tinggi, industri, pemerintah, media, dan komunitas program tersebut dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. “Semoga ke depan berbagai inovasi telekomunikasi seperti pengembangan jaringan 5G, 6G, dan bahkan 7G dapat lahir dari karya anak bangsa dengan semangat kemerdekaan dan semangat Kampus Merdeka, kita bangkit untuk Indonesia maju,” ujar Nizam.



DOK: ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Dokter Merdeka

FX Wikan Indraro
Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM

MOEWARDI adalah seorang dokter yang turut memberikan sambutan setelah Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, pada momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dr. Moewardi membacakan sebuah teks, yang kini kita kenal dengan nama ‘Undang-Undang Dasar 1945’, sebelum Bung Karno, Sang Proklamator membacakan naskah Proklamasi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh dokter dalam mengisi kemerdekaan?

Dr. Moewardi lahir di Pati, Jawa Tengah di tahun 1907 dan lulus School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA), cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil semacam spesialisasi di sekolah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT). Selain menjadi dokter, Moewardi juga aktif berorganisasi pada Barisan Pelopor, bahkan pernah menjadi Pemimpin Umum Pandu Kebangsaan (Kepanduan Bangsa Indonesia), cikal bakal PRAMUKA yang berperan dalam pendidikan karakter pemuda.

Saat Bung Karno menjadi Presiden dan hendak menyusun Kabinet, Moewardi mendapat tawaran langsung dari Bung Karno untuk menjabat sebagai

Menteri Pertahanan, namun dia menolak karena hendak meneruskan kariernya sebagai dokter. Dr. Moewardi tetap menjalankan tugasnya sebagai dokter, walaupun tetap aktif di berbagai organisasi kenegaraan. Saat Sekolah Tinggi Kedokteran kelanjutan dari STOVIA di Jakarta dipindah ke Solo, Jawa Tengah pada 4 Maret 1946 Dr. Moewardi berperan dalam pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran di RS Jebres (sekarang RSUP Dr. Moewardi) Solo untuk bagian klinis, dan pada 5 Maret 1946 di RS Tegalyoso (sekarang RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro) di Klaten untuk bagian pre-klinis.

Dokter Indonesia dalam mengisi kemerdekaan saat pandemi COVID-19 sekarang ini, seharusnya tidak hanya melakukan pengobatan (agent of treatment), tetapi juga menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development). Profesi dokter jaman sekarang sangat dipengaruhi oleh program besar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan mulai 1 Januari 2014, termasuk dalam pengelolaan pasien COVID-19. Perubahan drastis dalam sistem pembiayaan pasien pada era JKN ini, diduga telah menyebabkan perubahan besar pada alur pikir dan tindakan medik oleh dokter. Selain itu, pembatasan kebebasan profesi dokter sebagai ‘agent of treatment’ dalam pengambilan keputusan medik pada pelayanan pasien, sering kali menimbulkan penolakan

dalam diam bagi banyak dokter, atas sistem JKN yang dirasakan belum adil. Para dokter seharusnya mengisi kemerdekaan dan mewujudkan baktinya untuk negeri, dengan menyumbangkan pemikiran, niat baik dan kompetensinya, demi terwujudnya sistem JKN di Indonesia yang lebih baik, adil, dan manusiawi.

Sepanjang tahun 2019, sebegini besar dokter di Indonesia telah menghabiskan energinya untuk berbagai hal yang terkait kedokteran, tetapi bukan hal yang utama. Permasalahan dalam program JKN dan DLP (Dokter Layanan Primer), semuanya berdimensi sosial, politik, hukum, keuangan, dan bahkan kebijakan. Selain bukan ‘patognomonik’ atau khas profesi dokter, topik tersebut hanya menyebabkan terjadinya perbantahan antardokter. Para dokter Indonesia rasanya akan menjadi lengah, kurang siap, dan teragap saat menghadapi tantangan nyata di bidangnya sendiri, yang selama ini kurang mendapat perhatian sepadan. Salah satu yang harus segera diperbaiki adalah merdeka dalam kebersamaan mengembangkan iptekdok (ilmu pengetahuan kedokteran) terkini, termasuk dalam penanganan medis dan pencegahan dengan vaksinasi untuk COVID-19. Penelitian, uji klinis dan penulisan di jurnal ilmiah internasional oleh para dokter tentang COVID-19, rasanya belum dilakukan secara optimal. Apalagi kebersamaan dalam

rekayasa penciptaan vaksin COVID-19, bukan sekedar uji klinis fase ke 3 calon vaksin inactivated SARS-CoV-2 yang dikembangkan Sinovac Biotech Ltd. Beijing, China.

Dalam Bahasa Latin ‘Duco, Ducere, Duxi, Ductus’ yang merupakan asal kata dokter, berarti memimpin atau mempertimbangkan, maka wajar saja kalau dokter memiliki kewajiban memimpin warga bangsa. Selain itu, dokter juga wajib mengajak mempertimbangkan hal yang terbaik tentang keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan kita. Tentunya demi terwujudnya Indonesia sebagai rumah bersama segenap anak bangsa, seperti yang dirumuskan oleh segenap pendiri bangsa. Hal ini dapat dimulai oleh dokter secara merdeka, berupa ikut serta secara aktif meredam perpecahan paham dan munculnya pendapat yang sangat keras di sekitar kehidupan para dokter, baik di lingkup keluarga maupun komunitas pekerjaan. Para dokter dapat juga memanfaatkan luasnya pergaulan, mahirnya iptek dan besarnya pengaruh atau kewibawaan profesi. Selain itu, juga menggalang kebersamaan dengan segenap pihak yang memiliki keprihatinan serupa, agar potensi perpecahan dan intoleransi dapat diredam.

Kiprah Dr. Moewardi dalam momentum proklamasi kemerdekaan 1945 memberikan

inspirasi kepada para dokter Indonesia di jaman sekarang. Hendaklah para dokter tidak sekedar menjalankan praktek medis, tetapi juga merdeka untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa, demi keamanan dan kemajuan negara. Dirgahayu negeriku, jayalah dokter Indonesia. (M-4)



MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

VIEWS
& NEWS

Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel.

Mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman anda.

 Mediaindonesia

 Media Indonesia

 Mediaindonesia

Fakta boleh sama, opini bisa beda.

Temukan pandangan berbeda hanya di Mediaindonesia.com

Dapatkan di Aplikasi Media Indonesia Android





Mendag Fokus Jaga Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) serius menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Setidaknya ada enam hal mendasar yang terus dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di era new normal.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan sebagai salah satu negara dari 200 negara yang terserang virus covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut terimbas. Bersama kementerian dan lembaga lainnya, Kemendag mengambil langkah untuk memperkuat kebijakan dan membuat berbagai terobosan yang lebih sistematis dan terpadu.

“Setidaknya ada 6 hal mendasar yang sedang dan terus dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di era new normal,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (13/8).

Agus menjelaskan pertama, strategi Kemendag untuk mengerem laju penurunan kinerja di sektor perdagangan yang terus melemah akibat dampak pandemi covid-19. Terutama pada poin peningkatan ekspor, pengelolaan impor, dan penguatan pasar domestik.

Kedua, strategi peningkatan sejumlah perjanjian dagang internasional baik yang sudah berjalan maupun yang masih dibahas serta efek positif dan negatif terhadap perekonomian nasional. Ketiga, melakukan kebijakan terobosan pengamanan pasar dalam negeri yang selama pandemi turut menurunkan kinerja sektor ritel.

Keempat, peningkatan pengawasan perdagangan berjangka komoditas. Kelima, kebijakan antisipatif Kemendag terkait dengan babak baru perang dagang AS-China yang



FOTO-FOTO: DOK KEMENDAG

masih berpotensi memanas. Keenam, langkah-langkah yang ditempuh dalam mendorong kembali gairah sektor usaha di dalam negeri. Keenam kebijakan akselerasi ini diharapkan dapat menahan ekonomi nasional agar tidak terjerebab ke jurang resesi bahkan bisa mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendorong sektor usaha

Agus Suparmanto melanjutkan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, nyaris semua usaha di dalam negeri seolah berhenti. Sektor ritel terutama pusat perbelanjaan bahkan tidak beroperasi. “Memasuki new normal, kami mulai menggerakkan sektor usaha agar terus bisa beroperasi. Gairah usaha terus dibangkitkan,” kata dia.

Ia mengatakan bersama pemerintah daerah, Kemendag telah membuka Pusat Perbelanjaan di era normal baru dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga keselamatan masyarakat.

“Sejak awal masa PSBB, kami tetap menghimbau agar pasar rakyat tetap buka de-

ngan protokol kesehatan ketat. Penerapan protokol kesehatan terutama di pasar rakyat harus diterapkan demi kelangsungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami juga terus fokus dengan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar rakyat diharapkan dapat menggerakkan perekonomian sektor riil di daerah,” tegas Agus

Agus mengatakan Kemendag juga mendukung Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital, dengan mendorong upaya digitalisasi pasar rakyat yang menerapkan pembayaran retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi) dan mendorong pedagang pasar melakukan transaksi tidak hanya secara langsung di pasar tapi juga secara daring. Kemendag juga bekerja sama dengan laman pemasaran dan penyedia jasa transportasi online.

“Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan, sesuai arahan Presiden, kami terus berkomitmen memulihkan perekonomian nasional bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait.

Kemendag juga terus fokus untuk meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan nasional serta mengamankan perdagangan dalam negeri,” tambah Agus.

Mengerem laju penurunan

Pada semester pertama 2020, sebagian besar permintaan global memang menurun, sehingga ekspor juga ikut tertekan. Kinerja ekspor dan impor di beberapa negara mitra dagang Indonesia pada Januari-Juni 2020 juga menunjukkan pelemahan akibat pandemi covid-19.

Di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juni 2020 masih menghasilkan surplus sebesar US\$5,5 miliar. Ini lebih baik dari periode sama tahun sebelumnya yang mengalami defisit US\$1,9 miliar. “Meski surplus, kewaspadaan terus di siagakan. Surplus terjadi akibat impor turun lebih dalam dari periode sebelumnya,” kata dia.

Pada Januari-Juni 2020 ekspor Indonesia mencapai USD 76,4 miliar atau turun 5,49% (YoY), dan impor menurun sebesar 14,3% (YoY). Be-

berapa negara yang selama ini memberikan surplus non migas terbesar dalam neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat, India, Filipina, Belanda dan Pakistan. Sementara itu, RRT, Thailand, Argentina, Australia, dan Brazil masih menyebabkan defisit non migas terbesar.

Di tengah penurunan ekspor nonmigas selama periode Januari-Juni 2020, ekspor Indonesia ke beberapa negara masih memiliki peluang dan cukup menjanjikan. Di antaranya adalah Swiss naik 217,8%, Australia 14,9%, RRT 12,0%, Pakistan 3,1%, dan Amerika Serikat naik 1,6%.

Dari sisi komoditas, batu bara, CPO dan turunannya, perhiasan, alas kaki, serta kayu dan barang dari kayu, masih jadi penyumbang surplus neraca perdagangan nonmigas terbesar. Adapun mesin-mesin, plastik dan barang dari plastik, gandum dan bahan kimia organik jadi penyebab defisit.

Adapun, sepuluh komoditas utama ekspor nonmigas yang meningkat selama Januari-Juni antara lain perhiasan/permata naik 36,3%, besi dan baja 35,0%, alas kaki 13,5%, serta lemak dan minyak hewan/nabati 10,3%.

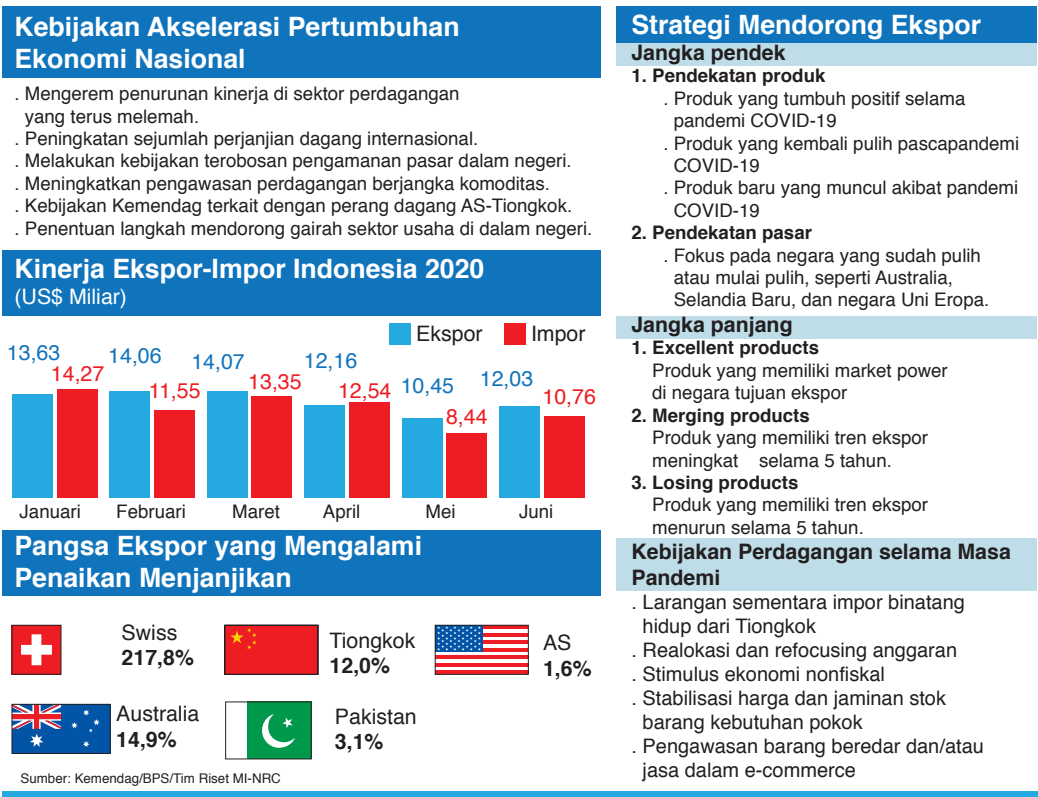
“Di tengah masa pandemi global ini, Kemendag memiliki kebijakan strategis mendorong ekspor di tengah pandemi global, yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Agus.

Dalam strategi jangka pendek dilakukan pendekatan produk dan pasar. Pendekatan produk berfokus pada 3 kategori produk, yaitu pertama produk yang tumbuh positif selama pandemi covid-19 seperti makanan dan minuman olahan, alat-alat kesehatan, produk pertanian, produk perikanan, serta produk agro-industri. Kedua, produk yang kembali pulih pasca pandemi covid-19 seperti otomotif, TPT, alas kaki, elektronik, besi baja.

Ketiga, produk baru yang muncul akibat pandemi covid-19 seperti produk farmasi dan produk ekspor baru yang merupakan hasil relokasi industri dari beberapa negara ke Indonesia.

Strategi jangka menengah dilakukan dengan mengklasifikasi negara-negara tiga kategori yaitu *excellent products*, yakni produk yang memiliki *market power* di negara tujuan ekspor, *merging products* yakni produk yang memiliki tren ekspor meningkat selama 5 tahun, dan *losing products* yaitu produk yang memiliki tren ekspor menurun selama 5 tahun.

Guna mendorong perekonomian nasional serta peran masyarakat menjadi vital. “Untuk itu Kemendag mengajak masyarakat untuk terus pakai produk buatan Indonesia. Selain bangga buatan Indonesia, juga akan menggerakkan perekonomian nasional,” pungkas Mendag. (Gan/S3-25)



Mendorong Geliat Ekspor di Tengah Pandemi



KONDISI perekonomian global yang lesu saat ini tidak boleh menjadi alasan dan harus menjadi pelecut untuk mendorong ekspor guna memacu perekonomian nasional. Salah satu poin penting untuk mendorong nilai ekspor adalah dengan produk yang berkualitas, dan inovasi menjadi kata kunci.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menilai inovasi merupakan salah satu instrumen penting agar perusahaan dapat bertahan dan mendapatkan peluang hingga mampu meningkatkan ekspor ditengah pandemi covid-19. Ia pun menghimbau agar para pelaku usaha terus menciptakan berbagai inovasi dan terobosan baru agar mampu bersaing di pasar global.

“Saya mengapresiasi usaha-usaha untuk memajukan ekspor produk Indonesia. Covid-19 membuat banyak perusahaan yang mengubah stra-

tegi produk ekspor ataupun strategi fokus pasar mereka. Ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk menguatkan daya saing produk mereka,” terang Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto dalam pelepasan kontainer ekspor produk *technical textile* yang ke-11 juta meter di PT Ateja, Kamis (13/8).

Inovasi dan diversifikasi produk ekspor dapat menjadi salah satu upaya bagi dunia usaha untuk beradaptasi di tengah pandemi. Misalnya memenuhi kebutuhan global produk-produk seperti masker dan alat pelindung diri (APD) yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Untuk itu Agus menekankan pemerintah mendukung penuh peningkatan peluang ekspor komoditas Indonesia, termasuk tekstil dan

produk tekstil (TPT) melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan relaksasi percepatan ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor alat-alat pelindung diri buatan Indonesia yang berkualitas dunia dan berkontribusi terhadap permintaan alat-alat pelindung diri secara global setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi.

“Hal ini merupakan salah satu wujud konkret dukungan pemerintah kepada pelaku usaha di Indonesia, termasuk sektor tekstil untuk dapat mengeksport masker dan APD lainnya, dan hal ini yang telah dimanfaatkan Ateja,” kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut Agus mengapresiasi pengusaha yang mampu mempertahankan prestasi dalam mengeksport produk tekstil di tengah kondisi pandemi. “Kami yakin di masa sulit seperti sekarang, ekspor produk tekstil Indonesia akan tetap tumbuh. Contohnya, selama kuartal II tahun 2020 PT. Ateja telah berhasil mengeksport 11 juta meter technical textile ke 84 negara di seluruh dunia. Hal ini merupakan capaian yang perlu kita pertahankan,” kata Agus.

Pada periode Januari-Juni 2020, ekspor produk TPT Indonesia tercatat sebesar USD 5,01 miliar. Nilai ini turun 21,63% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 6,39 miliar.

“Hal ini antara lain disebabkan oleh terhambatnya logistik bahan baku dan penolong dikarenakan adanya

Pemerintah mendukung penuh peningkatan peluang ekspor komoditas Indonesia, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui sejumlah kebijakan.

penerapan karantina wilayah maupun *lockdown* di negara-negara penyuplai bahan baku industri TPT tanah air seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” ungkap Agus.

Kemendag berupaya mendorong peningkatan ekspor melalui sejumlah strategi seperti pelatihan, penyederhanaan perizinan, dan insentif. Kemendag memiliki program

penguatan daya saing dan desain produk melalui *Designers Dispatch Service* (DDS) dan *Good Design Indonesia* (GDI).

Aktivitas virtual juga terus diberlakukan di masa pandemi ini. Pelatihan-pelatihan ekspor tetap diadakan secara virtual bagi calon-calon eksportir baru. Promosi ekspor dan *business matching* virtual oleh perwakilan-perwakilan perdagangan juga terus diadakan. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor juga didorong untuk dipercepat melalui penerapan *affix signature* dan *stamp*.

Sebelumnya Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga mengapresiasi adanya upaya ekspor dari produk produk berbasis teknologi. Produk produk ini diyakini dapat memberikan nilai tambah sekaligus memperluas pasaran ekspor Indonesia.

“Produk yang mempunyai nilai tambah tinggi tentu akan mendapatkan prioritas utama. Produk berbasis teknologi ini memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Selain itu, produk seperti ini juga memberikan

kontribusi yang besar tidak hanya untuk nilai ekspor, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi dan politik dalam konteks perdagangan internasional,” imbuh

Jerry menuturkan saat ini banyak perjanjian perdagangan yang memberikan preferensi tarif bagi produk teknologi Indonesia. Salah satunya ketentuan Perjanjian ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) yang produk-produk telekomunikasi Indonesia diberikan tarif 0% di Hongkong.

Menurut Jerry, produk-produk seperti ini harus bisa didorong untuk masuk ke pasar negara lain dengan mekanisme perjanjian perdagangan. “Kita harus yakin Indonesia bisa memasukkan produk berteknologi tinggi ke negara lain. Dengan terbukanya peluang ini, diharapkan akan semakin banyak produsen berbasis teknologi lainnya yang akan melakukan ekspor. Kita harus bisa memanfaatkan intelektualitas dan kreativitas yang tinggi dari anak muda Indonesia,” tutup Jerry. (Dro/X10-25)



Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut

Fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis.

SURYANI WANDARI PUTRI PERTIWI
wandari@mediaindonesia.com

RESIDEN Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid-19.

“Penanganan covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan,” tegas Presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7).

Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan.

Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mengebut pembangunan ruas tol, bendungan, dan irigasi, renovasi mulai beberapa pasar rakyat hingga beberapa destinasi wisata.

Basuki mengatakan fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan



ANTARA /SEPTIANDA PERDANA

PEMBANGUNAN TOL TRANS-SUMATRA: Pekerja PT Hutama Karya menggunakan alat berat untuk menyelesaikan ruas tol di Gerbang Tol Tanjung Mulia Medan, Sumatra Utara, Rabu (29/7). Pembangunan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,5 km yang merupakan bagian Tol Trans-Sumatra itu diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi dan pariwisata di Sumatra Utara.

kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin untuk 2019-2024.

Selain tol, Kementerian PU-Pera membangun lima bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, khususnya penyediaan air baku sebesar 54,81 m3/detik pada 2024, yakni Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan

Timur, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat.

“Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan irigasi itu

bertujuan mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2020-2024 tersebut, dibutuhkan dana sebanyak Rp6.445 triliun. Pemerintah hanya menyanggupi Rp2.385 triliun atau 37%, pendanaan BUMN (*state owned enterprise*/SOE) sebesar Rp1.353

triliun atau 21%, dan pihak swasta sebesar Rp2.707 triliun atau 42%.

Program padat karya

Selain sebagai proyek strategis, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19.

Untuk proyek infrastruktur tersebut, pemerintah

menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT)/*cash for work* agar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hingga Juli 2020, Kementerian PU-Pera telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 42,7%.

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan & jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan Kota tanpa Kumuh (Kotaku), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Ekonom lembaga kajian Thinks Policy Society Adelia Surya Pratiwi menilai manfaat Program PKT seperti yang dilakukan Kementerian PU-Pera bisa langsung ‘kembali ke rakyat’ dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengatakan Program PKT kementerian/lembaga seperti dijalankan di Kementerian PU-Pera ialah program belanja modal yang sekaligus bertujuan menciptakan lapangan kerja. Seperti kita ketahui, belanja pemerintah yang langsung dimanfaatkan masyarakat ialah belanja subsidi dan bantuan sosial.

“Untuk belanja lain seperti barang, modal, sebetulnya baik juga bila diarahkan ke penyerapan tenaga kerja karena manfaatnya bisa langsung ‘kembali ke rakyat’,” ujar Adelia saat dihubungi *Antara* di Jakarta, Selasa (11/8). (E-3)

UI Berlari Pacu Inovasi dan Produk Karya Anak Bangsa

UNIVERSITAS Indonesia (UI) terus berlari kencang mencetak sumber daya manusia andal serta riset dan inovasi yang siap berkontribusi membangun bangsa. Hal itu selaras dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-75 bertepatan ‘Indonesia Maju dan Bangsa Buatan Indonesia’.

Sebagai ‘lokomotif’ pendidikan tinggi di Indonesia, UI sigap mengambil peran mencetak sejumlah produk inovatif dan luaran studi/kajian guna membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan. Termasuk, permasalahan pandemi covid-19 saat ini yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Kontribusi riset covid-19

Di tengah situasi darurat akibat pandemi covid-19, UI terus mengencakan melakukan riset untuk kemandirian produksi dalam negeri akan alat kesehatan, obat-obatan dan terapi, serta penunjang kesehatan lainnya.

Riset dan inovasi yang dilakukan UI berangkat dari kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada hasil yang dapat dipakai langsung dalam penanganan covid-19.

Sebut saja Covent-20. Covent-20 adalah ventilator karya anak bangsa yang diciptakan di tengah keterbatasan stok ventilator impor pada masa pandemi covid-19.

Covent-20 menjadi bukti kerja keras peneliti dan inovator UI dalam mendesain dan memproduksi hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Covent-20 merupakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 70%.

Kini, Covent-20 telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan RI dan telah didistribusikan ke rumah sakit yang ada di Indonesia.

Hasil riset dan produk ino-

vatif karya sivitas akademika UI tidak hanya Covent-20. Di antaranya, Flocked Swab HS-19; alat pengambil spesimen swab test; DSS-covidNET: *software* pembaca hasil rontgen untuk konfirmasi pneumonia akibat covid-19; APD respirator pemurni udara berbentuk masker wajah bagi tenaga medis; dan bilik disinfektan cepat.

Riset dan inovasi yang dilakukan UI berangkat dari kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada hasil yang dapat dipakai langsung dalam penanganan covid-19.

Selain itu, karya sivitas akademika UI adalah *movable hand washer*; portal *WebGIS*; peta sebaran covid-19; *endocorona*; aplikasi deteksi mandiri risiko covid-19; SIGAP; dan aplikasi pendataan pemasok kebutuhan alat kesehatan tenaga medis.

UI juga berhasil melakukan penelitian sel punca mesenkim asal tali pusat untuk pengobatan pasien pneumonia covid-19; desain pesawat tanpa awak untuk awasi penerapan PSBB; dan desain kapal ambulans untuk tangani pasien covid-19 di pulau-pulau terpencil di Indonesia.

Dalam salah satu sambutannya, Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ((Menristek/BRIN), Prof Bambang PS Brodjonegoro mengutarakan UI merupakan salah satu anggota Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dengan

kontribusi yang signifikan.

“Ini tampak dari proposal yang diajukan UI lengkap memenuhi kelima bagian riset dan inovasi yang disasar BRIN terkait dengan covid-19, serta tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan bidang Sosial Humaniora juga dicover oleh UI,” ujarnya.

Wujudkan Kampus Merdeka

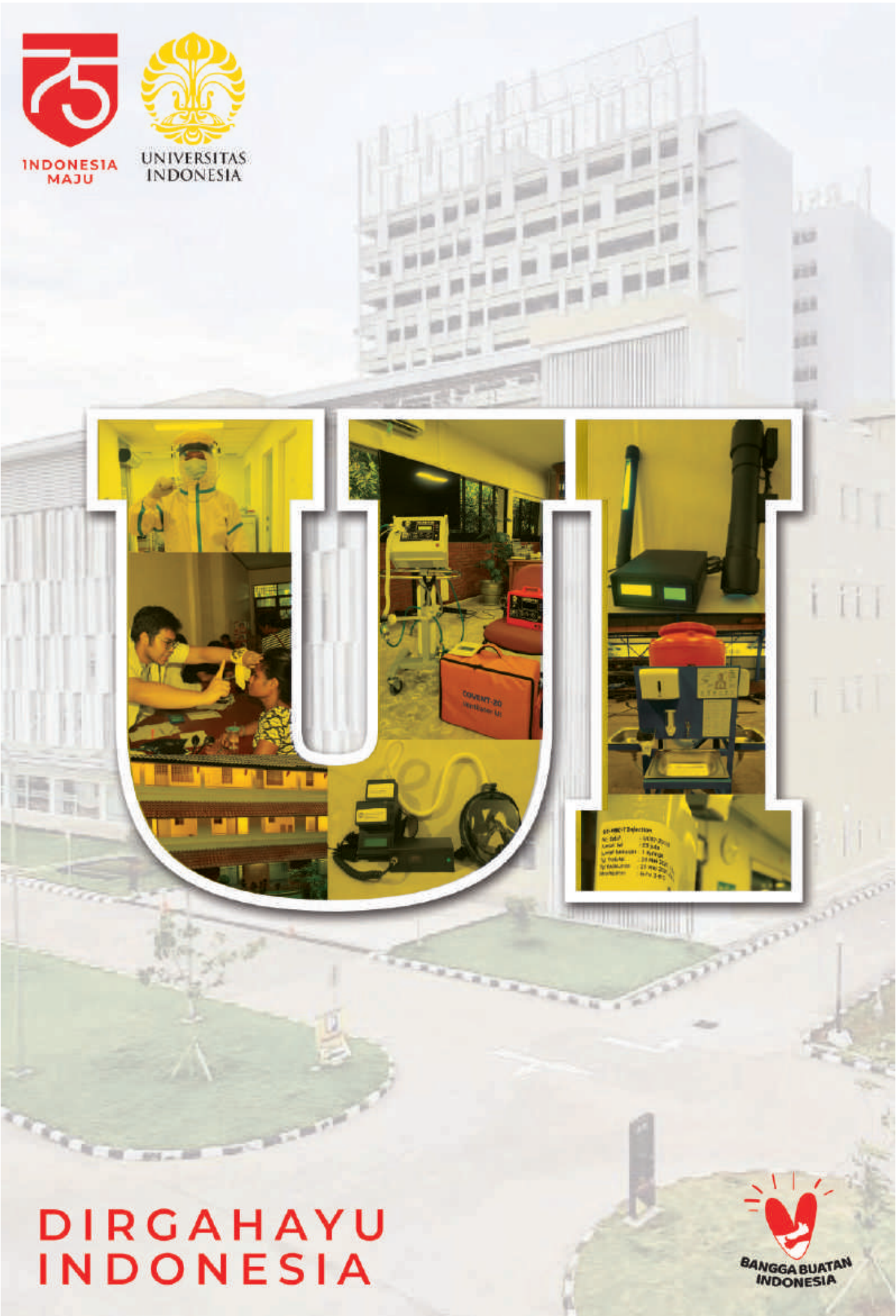
Produk-produk inovasi dan riset unggulan UI tersebut membuktikan bahwa anak bangsa memiliki kekuatan dan mampu bergerak cepat di tengah situasi pandemi saat ini.

Kolaborasi *pentahelix*, yaitu kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat dan media, menjadi kunci utama di dalam upaya mengakselerasi produktivitas riset inovasi anak bangsa.

Pandemi covid-19 juga mendorong UI untuk mencetak sebuah program studi baru, yaitu Manajemen Kebencanaan. Rektor UI, Prof Ari Kuncoro menyebutkan UI tengah meramu program studi Manajemen Kebencanaan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan di masa depan.

“Di dalam penanganan bencana, diperlukan kombinasi keilmuan dari semua kompetensi. Mulai dari rumpun ilmu kesehatan, teknik, sosial humaniora, sistem informasi, hingga ekonomi dan manajemen. Solusi yang dibutuhkan tidak bisa lagi terkotak-kotak, melainkan harus lintas dimensi,” ujarnya.

Pandemi covid-19 menjadi momentum UI secara merdeka menjalankan marwah perguruan tinggi yang sesungguhnya. Proses hulu hingga hilir telah dilalui, mulai dari meneliti di laboratorium hingga menuangkan buah pikiran menjadi sebuah produk inovatif yang dapat diproduksi dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. (S1-25)



Manufaktur Rebound di Triwulan III

Industri padat karya terus digerojok stimulus agar pabrik-pabrik tetap beroperasi. Itu demi mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

HILDA JULAIKA
hilda@mediaindonesia.com

BUKAN tanpa alasan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal membaik di triwulan III 2020. Ia pun amat meyakini sektor manufaktur akan berkontribusi paling besar dalam pertumbuhan itu.

“Saya amat yakin triwulan III ini akan *rebound*,” kata Menperin lewat keterangan resminya.

Keyakinannya itu berangkat dari digelontorkannya berbagai stimulus kepada pelaku industri, bukan cuma pabrikan besar, melainkan juga sektor industri kecil menengah (IKM) guna mengarahkan kembali kinerja mereka.

“Pemerintah sudah mengulirkan berbagai macam stimulus untuk dunia usaha, bahkan yang terbaru kami telah mengusulkan untuk penghapusan biaya minimum listrik 40 jam nyala bagi industri. Khusus untuk sektor industri, kami menyiapkan adanya stimulus khusus modal kerja yang dapat dinikmati sektor industri, termasuk bagi pelaku

IKM,” katanya.

Agus menyatakan pihaknya bakal terus memantau dan mendorong semaksimal mungkin agar stimulus-stimulus yang telah diberikan pemerintah kepada sektor industri dapat segera terealisasi dan terasa manfaatnya.

“Kami juga akan menjaga momentum peningkatan *purchasing managers' index* (PMI) manufaktur Indonesia agar bisa kembali menembus level 50,0 pada triwulan III 2020,” imbuhnya.

Pihaknya tengah berupaya adanya stimulus tambahan yang bisa mendorong tingkat utilisasi pabrik. Saat ini, stimulus tambahan tengah dibahas pembahasan bentuk dan mekanismenya.

“Soal stimulus tambahan masih dalam pembahasan. Utilisasi pabrik secara nasional masih 51%. Kalau bisa kita dorong dengan stimulus tambahan. Tentunya bisa menaikkan PMI kita yang saat ini sudah meningkat menjadi 46,9,” ujar Achmad.

Merujuk hasil survei yang dirilis IHS Markit, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2020 berada di level 46,9 atau naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 39,1. Peningkatan indeks



ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL: Pekerja memproduksi alat pelindung diri di salah satu perusahaan garmen di Jakarta, Rabu (1/7). Pemerintah sudah mengulirkan berbagai macam stimulus untuk dunia usaha sebagai langkah percepatan pemulihan kondisi perekonomian nasional.

itu juga menunjukkan tingginya kepercayaan bisnis terhadap kondisi pasar yang lebih normal.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadinya kontraksi 5,74% pada industri pengolahan nonmigas pada triwulan II 2020 disebabkan dampak wabah covid-19.

Sementara itu, di periode yang sama, perekonomian Indonesia tumbuh minus 5,32% secara tahunan (yoy).

Di triwulan II 2020, sektor industri memberi kontribusi terbesar pada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional dengan mencapai 19,87%.

Stimulus ekstra

Pada Juli lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan beleid penjaminan kredit modal kerja untuk sejumlah sektor korporasi yang menjadi prioritas. Tak banyak

yang masuk prioritas karena yang dipilih ialah sektor yang berorientasi padat karya.

“Kredit yang dijamin adalah 60% pemerintah dan 40% perbankan. Untuk sektor prioritas, pemerintah memberikan penjaminan lebih besar, yaitu 80% dan 20% perbankan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pelaku usaha korporasi yang masuk prioritas itu ialah sektor pariwisata, otomotif, tekstil, dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Pemerintah melibatkan 15 bank yang berpartisipasi dalam penjaminan kredit modal kerja itu, yakni BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank DKI, Bank HSBC, Bank ICBC Indonesia.

Kemudian, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard

Chartered Bank Indonesia, UOB Indonesia, BCA, dan DBS Indonesia.

Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun.

Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Mulai berdenyut

Saat dihubungi di kesempatan terpisah, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia

Tjandra mengatakan industri otomotif mulai menunjukkan adanya tren peningkatan sedikit demi sedikit. Perusahaannya mencatat pada Juni 2020, penjualan dari diler ke konsumen mencapai 5.558 unit atau meningkat dari 3.673 unit pada Mei sebelumnya.

“Operasional di pabrik PT ADM sudah siap untuk kembali menambah produksi kendaraan guna memenuhi kebutuhan pelanggan,” tandas Amelia.

Pada Juli 2020, PT ADM telah mulai membuat persiapan untuk melakukan produksi dua sif agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Realisasi produksi dua sif sejak awal Agustus 2020, baik di pabrik Sunter (Jakarta) maupun Karawang (Jawa Barat).

“Kami bersyukur, pasar mobil mulai menunjukkan peningkatan,” kata Amelia. (Ant/E-2)

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Memaknai Kemerdekaan di Perbatasan Negara

MASIH banyak yang menganggap kawasan perbatasan negara merupakan halaman belakang yang tidak menjadi prioritas untuk ditata dan dibangun. Padahal, hakikatnya wilayah perbatasan merupakan beranda yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, sehingga seharusnya ditata dan dibangun lebih baik dan menawan karena menjadi citra bangsa.

Hal ini yang mendorong Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh pada kemajuan kawasan perbatasan negara. “Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Komitmennya itu dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pada saat menjabat sebagai Presiden pada periode pertama (2014-2019), yakni bangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang lebih modern dan megah, dan menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Mindset wilayah perbatasan negara pun berubah, dari yang dianggap sebagai halaman belakang negara, kini menjadi beranda terdepan Indonesia.

Ketujuh PLBN itu dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yang tersebar di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga, yaitu: PLBN Aruk, PLBN Badau, dan PLBN Entikong di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia.

Lalu PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan ne-

gara Republik Demokratik Timor Leste. Sedangkan PLBN Skouw dibangun di Provinsi Papua yang berbatasan darat dengan negara Papua Nugini.

Pada masa jabatan periode kedua, Presiden Jokowi mengharapakan kawasan perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri melalui pengembangan kawasan pendukung PLBN di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, Presiden Jokowi ingin kawasan pendukung PLBN yang ada di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan yang bisa berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada negara tetangga.

“Jadi, Presiden ingin daerah Aruk, Motaain, dan Skouw ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar, tapi ke daerah sebelah negara tetangga,” ujar mantan Kapolri ini.

Memasuki 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kawasan perbatasan negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Indonesia telah mengalami berbagai persoalan yang menjadi makna tersendiri

bagi bangsa yang terdiri atas puluhan ribu pulau ini.

Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan laut dengan negara tetangga seperti India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste, dan Papua Nugini, sedangkan untuk perbatasan darat dengan Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste, Papua Nugini.

Di era yang lalu, sejumlah persoalan di wilayah perbatasan mengemuka. Sebut saja, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke negara tetangga Malaysia pada 2012, kesulitan ekonomi warga perbatasan, transportasi umum yang langka, jalan rusak dan terjat, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia serta bentuk kriminal lainnya.

Meski sudah ada kementerian/lembaga yang menangani persoalan di perbatasan saat itu, dirasa kurang efektif karena kurangnya keterpaduan antarinstansi yang menangani perbatasan. Fakta ini kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang fokus menangani di perbatasan negara, baik dari segi lintas batas dengan negara tetangga, pengelolaan potensi serta pembangunan infrastruktur.

Hingga terbitlah Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menyebutkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

Selanjutnya diterbitkan Perpres 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Badan ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dipimpin seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Mendagri Tito Karnavian ialah Kepala BNPP saat ini. Sementara Ketua Pengarah BNPP ditempati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Lebih terkoordinasi

BNPP bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan serta melakukan evaluasi dan pengawasan. Adapun anggota BNPP ialah 27 K/L dan 13 Gubernur Provinsi Perbatasan, sesuai dengan Perpres No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No 12 Tahun 2010 tentang BNNP. Dengan adanya BNPP pembangunan perbatasan negara hingga saat ini lebih terkoordinasi.

“Setelah lahirnya BNPP, pengelolaan, pembangunan, serta perundingan batas negara menjadi lebih terkoordinasi daripada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, baru-baru ini.

Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Perbatasan negara merupakan



manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah.

Hingga saat ini, ada banyak yang telah dilaksanakan oleh BNPP di antaranya dari segi laporan keuangan, BNPP mengantongi Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama enam kali berturut-turut. Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara, khususnya di darat.

BNPP bersama dengan K/L anggota dua telah menyelesaikan juga telah menyelesaikan dua segmen Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu resolusi, action plan dan SOP. Dua segmen OBP itu ialah OBP Simantipal dan OBP C 500-C 600.

BNPP juga rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Ger-

bangdutas), Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan (Rakornas Pamtas), Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara (Rakor Camat), serta upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia di perbatasan negara.

BNPP juga telah menyusun Rencana Induk (Renduk) Tahun 2015-2019. Renduk merupakan acuan bagi K/L anggota BNPP untuk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), dan kini sedang dipersiapkan rancangan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024 yang akan ditetapkan Presiden, dengan fokus untuk mewujudkan visi Jokowi di perbatasan negara yaitu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dalam Rancangan Renduk itu, BNPP telah mencanangkan beberapa arah strategis seperti Penyelesaian tujuh segmen batas RI-Malaysia, satu Unsurveyed dan dua

Unresolved Segmen RI-RDTL dan Perapatan Pilar RI-PNG.

Selain itu, komitmen meningkatkan manajemen pengelolaan dan meneruskan pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada lima tahun mendatang. Saat ini, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan anggota BNPP, telah terbangun delapan PLBN, dan 10 PLBN lainnya masih dalam proses pembangunan berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2019 serta delapan PLBN tambahan sesuai amanat RPJMN 2020-2024.

Pengembangan 18 PKSN

Beberapa arah strategis lain yang masuk dalam Rancangan Renduk ini ialah pembangunan sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan melalui pembangunan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yang tiga dari enam PKSN Major Project (Aruk, Motaain dan Skouw) sesuai arahan Kepala BNPP telah disiapkan rencana pengembangannya pada tahun ini dan selanjutnya secara bertahap akan diteruskan pada 15 PKSN lainnya hingga akhir 2024.

Pembangunan infrastruktur pembuka keterpencilan dan layanan dasar yang lebih merata serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Serta pembangunan sarpras Pertahanan Keamanan (Hankam) di 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk masuk dalam Rancangan Renduk ini. (S2-25)



FOTO-FOTO: DOK BNPP

PLBN Motaain di Provinsi NTT menjadi ikon baru perbatasan Indonesia yang membanggakan.

Meningkatkan Produktivitas Penambang Kecil dengan Teknologi Ramah Lingkungan

BERBICARA pertambangan emas, baik itu besar maupun kecil, tentu yang terbayang ialah profit yang besar. Sayangnya, bagi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang umumnya dilakukan masyarakat sekitar, seringkali proses penambangannya tidak ramah lingkungan karena menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri di Indonesia, khususnya pada sektor PESK, telah terjadi sejak lama. Sebagai contoh, kegiatan PESK di Desa Lebaksitu sudah ada sejak 1990-an dan masih berlangsung sampai saat ini. Keterdapatn emas di daerah ini tidak lepas dari endapan emas yang ada di daerah Cikotok dan sekitarnya.

Kegiatan pertambangan emas di daerah ini masih tergolong sederhana, karena metode penambangan dan pengolahan emas yang terbilang sederhana. Penambang dilakukan dengan membuat lubang gua yang mengikuti arah urat baik secara vertikal maupun horizontal dan pengolahan emas dilakukan dengan menggunakan merkuri untuk menangkap logam emas.

Serupa dengan praktik di Cikotok, penambangan emas di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, pun berskala PESK karena nilai ekonomisnya dianggap tidak cocok untuk penambangan skala besar. Metode pengayaan emasnya pun tidak berbeda jauh, yakni menggunakan metode amalgamasi merkuri dan sianidasi tanpa pengolahan limbah yang memadai.

Akibat penggunaan merkuri tanpa pengolahan limbah yang memadai itu memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Aktivitas pengolahan emas tersebut akhirnya memberi dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Kecamatan Sekotong.

Sebelum 2017, mayoritas penambang emas di Indonesia mengolah emas hasil tambangnya menggunakan teknologi amalgamasi merkuri. Teknologi ini dipilih



Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.



Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.



Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.



Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.



Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

FOTO-FOTO: DOK KLHK

karena dianggap paling mudah dan cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan teknologi lainnya.

Menyadari dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, pemerintah kemudian melakukan ratifikasi Konvensi Minamata melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata atas Merkuri (Minamata Convention on Mercury). Dengan kebijakan itu, pemerintah ingin mengurangi penggunaan merkuri untuk pertambangan.

Pemerintah pun memiliki komitmen untuk mewujudkan penghapusan merkuri di Indonesia pada 2025 dengan sinergi dan kolaborasi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden No 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Teknologi tepat guna

Guna mengurangi penggunaan merkuri di pertambangan diperlukan contoh praktik terbaik untuk menunjukkan penggunaan teknologi tepat guna yang efisien dalam PESK. Untuk itu, terhitung sejak 2017 sampai dengan 2019, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Dirjen PSLB3), telah membangun sejumlah fasilitas pengolahan emas non-merkuri di berbagai daerah di Indonesia. Total fasilitas yang telah dibangun oleh KLHK sebanyak tujuh buah yang tersebar di enam provinsi, yakni Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

“Pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan PESK menuju praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan,” ujar Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menanggapi hal tersebut.

Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun menggunakan berbagai teknologi alternatif pengolahan emas tanpa Merkuri yang paling sesuai dengan karakteristik bijih emas di masing-masing lokasi. Teknologi yang digunakan antara lain sianidasi untuk jenis bijih emas tipe endapan emas primer, dan teknologi konsentrasi gravitasi untuk

jenis bijih emas tipe endapan emas sekunder.

Namun, salah satu kunci penting untuk menentukan metodenya ialah dilakukannya kajian karakteristik bijih emas di lokasi tersebut pada awal proses.

Salah satu alasan dalam menentukan kedua teknologi tersebut adalah karena jenis bijih emas alluvial umumnya efektif dan efisien jika diolah dengan metode pemisahan gravitasi. Sebab, partikel emas dalam bijih tersebut relatif sudah terlibarasi dan memiliki ukuran partikel yang cukup besar. Dengan begitu, butiran emas mudah mengendap dan dapat dipisahkan secara fisik dari mineral-mineral pengotornya.

Sedangkan untuk jenis endapan emas primer akan efisien apabila diolah dengan teknik pelindian (leaching) karena umumnya endapan primer ini dicirikan dengan ukuran partikel emas yang sangat halus dan terikat pada matriks batuan.

Oleh karena itu, diperlukan tahap kominusi (penghancuran batuan) untuk meliberasi partikel emas sebelum proses leaching dilakukan.

Pada daerah yang berdasar-

kan hasil kajian diketahui memiliki karakteristik bijih emas primer, pengolahan emas menggunakan sianida sudah banyak diterapkan, termasuk pada industri pertambangan emas.

Penggunaan sianida dalam pengolahan emas pun memiliki keuntungan dan performa jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan merkuri. Misalnya metode sianida mampu menangkap emas lebih dari 80%, jika dibandingkan dengan merkuri yang hanya 40%.

Selain itu, dari sisi harga pun pengolahannya lebih relatif murah dan proses pengerjaan yang tidak sulit bila dibandingkan dengan teknologi amalgamasi menggunakan merkuri. Dari sisi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat pun lebih menguntungkan penggunaan teknologi sianida.

Meski kedua bahan tersebut bersifat toxic, sianida dengan penggunaan sesuai dengan SOP yang benar dampak racun tersebut dapat dihilangkan. Terlebih, merkuri yang terakumulasi dalam manusia dan tanaman sehingga membahayakan berbeda dengan sianida yang tidak memiliki

sifat tersebut.

Teknologi sianidasi yang digunakan pada beberapa fasilitas pengolahan emas non-merkuri yang dibangun oleh KLHK mengadopsi teknologi sianidasi yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Badan ini mendapat tugas untuk mengembangkan teknologi pengolahan emas bebas merkuri.

Secara umum, teknologi sianidasi BPPT terdiri atas enam tahapan proses yang dimulai dengan proses pengecilan ukuran ore, dan diakhiri dengan proses destruksi atau penghancuran sianida. Salah satu kelebihan teknologi sianidasi BPPT ialah telah mengintegrasikan proses pengolahan limbah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengolahan emas, sehingga limbah yang dilepaskan hanya mengandung sianida dalam kadar sangat rendah dan aman bagi lingkungan.

Pemberdayaan ekonomi

Dengan adanya fasilitas percontohan yang menunjukkan performa lebih efisien kepada para penambang memberikan dampak positif akan penggunaan teknologi merkuri.

Di lokasi-lokasi fasilitas percontohan tersebut, konsumsi merkurnya jauh berkurang.

Misalnya proses pengolahan emas bebas merkuri yang dibangun di Kabupaten Lombok Barat menggunakan proses sianida dengan kapasitas bahan baku 1,2 ton per batch, dapat mereduksi penggunaan merkuri sebanyak 900 kg per tahun.

Tak hanya di Kabupaten Lombok Barat, fasilitas pengolahan emas non-merkuri di Lebak, Banten, yang memiliki kapasitas 1,5 ton per batch dapat mereduksi penggunaan merkuri hingga 1,4 ton per tahun. Hasil serupa pun dapat dilihat di wilayah percontohan lainnya.

Secara garis besar, kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan emas bebas merkuri tujuan penghentian penggunaan merkuri di sektor pertambangan rakyat di Indonesia dapat tercapai melalui pengenalan teknologi yang lebih baik dan efisien.

Harapannya ke depan masyarakat penambang dapat menggunakan peralatan dan teknologi yang tidak berdampak terhadap lingkungan serta tetap memperoleh pendapatan dari hasil tambang dengan cara tidak menggunakan merkuri.

Selain itu dengan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pembentukan koperasi. Misalnya dengan menyerahkan pengelolaan fasilitas pengolahan emas non-merkuri melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau koperasi penambang.

Dengan begitu, ketika fasilitas tersebut beroperasi penuh, keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. (Dro/S2-25)

Pengolahan Emas Nonmerkuri

Penggunaan merkuri di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan emas skala kecil (PESK), telah terjadi sejak lama. Pascaratifikasi Konvensi Minamata pada 2017, pemerintah berkomitmen melakukan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri, termasuk pada sektor PESK.

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Nonmerkuri 2017-2019

2017

- 1. Lokasi: Kabupaten Lebak, Banten
 - Kapasitas: 1,5 ton/batch
 - Teknologi: Leaching sianida

2018

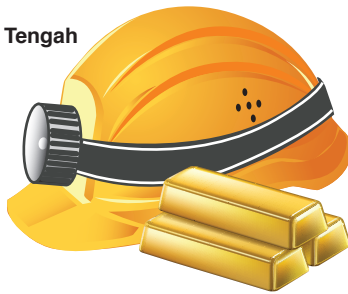
- 1. Kabupaten Lombok Barat, NTB
 - 1,2 ton/batch
 - Leaching sianida
- 2. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
 - 0,75 ton/batch
 - Konsentrasi gravitasi

- 3. Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
 - 0,5 ton/batch
 - Leaching sianida

2019

- 1. Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah
 - 180kg/hari
 - Konsentrasi gravitasi
- 2. Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
 - 150kg/hari
 - Konsentrasi gravitasi

- 3. Kabupaten Halmahera Selatan
 - 1 ton/batch
 - Leaching sianida



Alur Proses Teknologi Sianidas



Pengurangan Jumlah Penggunaan Merkuri di Lokasi Percontohan Pascapembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Nonmerkuri

No.	Lokasi	Pengurangan merkuri (ton)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Lebak, Banten	-	1,4	1,4	1,4
2.	Kabupaten Lombok Barat, NTB	-	-	0,9	0,9
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng	-	-	0,5	0,5
4.	Kabupaten Luwu, Sulsel	-	-	0,8	0,8
5.	Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng	-	-	-	0,9
6.	Kabupaten Pohuwato, Gorontalo	-	-	-	0,7
7.	Kabupaten Halmahera Selatan, Malut	-	-	-	0,65

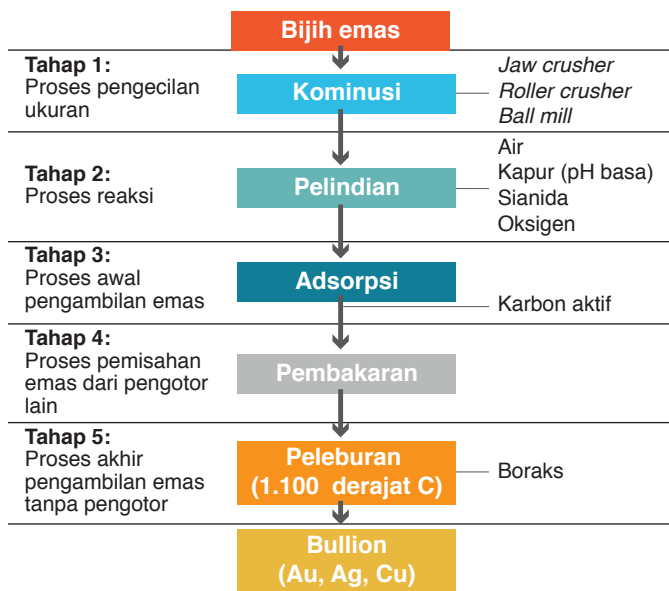
Perbandingan Menggunakan Merkuri dan Sianida

Penggunaan Merkuri

1. Dapat menangkap emas hingga 40% di dalam batuan biji.
2. Tidak dapat terdegradasi di alam.
3. Bersifat akumulasi dalam manusia, hewan, dan tanaman.
4. Bersifat beracun.
5. Sisa merkuri yang terbuang dalam tailing tidak dapat dihancurkan sehingga membahayakan manusia dan lingkungan.

Penggunaan Sianida

1. Menangkap emas hingga 80% di dalam batuan biji.
2. Dapat terdegradasi di alam sehingga menjadi lebih tidak beracun. Membentuk karbondioksida dan nitrat yang tidak beracun.
3. Tidak bersifat akumulasi dalam manusia, hewan, dan tanaman.
4. Bersifat beracun, tapi jika sesuai SOP, dampak racun dari sianida dapat dihilangkan.
5. Sisa sianida yang terbuang dalam tailing dapat dihancurkan.



Sumber: KLHK/Foto: BPPT/Riset MI-NRC

Memberdayakan Petani untuk Keberlanjutan

INDONESIA sebagai salah satu produsen kelapa sawit nomor satu di dunia selalu mengedepankan prinsip *sustainability* atau keberlangsungan atas industri sawit.

Pasalnya, selain mampu menyerap tenaga kerja yang besar, pengelolaan sawit di Indonesia juga dilakukan melalui pembinaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan petani sawit khususnya.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setidaknya terdapat 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung dari operasional industri sawit Indonesia.

Petani merupakan pemasok kedua terbesar di sektor kelapa sawit Indonesia, mengelola 40% lahan sawit dan menjadi bagian penting dari negara dalam menyuplai *crude palm oil* (CPO) dunia. Untuk itu penting bagi perusahaan untuk bersama-sama dengan petani memajukan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Asian Agri sebagai perusahaan produsen minyak sawit mentah melalui perkebunan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan, turut bekerja sama dengan para petani sebagai bagian penting perusahaan. Saat ini Asian Agri termasuk yang memiliki kemitraan terbesar dengan petani kelapa sawit di Indonesia.

Kemitraan dengan petani ini sudah dimulai sejak 1987 seiring dengan program transmigrasi dari pemerintah. Kemitraan tersebut meluas pada 2012 dengan menjangkau petani swadaya kelapa sawit di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.

Direktur Sustainability & Stakeholder Relations Asian Agri Bernard Riedo mengungkapkan, “Tahun 2018 kami mencanangkan program Kemitraan *One to One* yang memungkinkan pengelolaan 1 hektare lahan petani sebanding dengan 1 hektare lahan inti Asian Agri untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.”

Tercatat, jumlah luas lahan inti perusahaan mencapai 100.000 hektare, dan hingga akhir 2019 luas lahan petani mitra Asian Agri baik plasma dan swadaya sudah mencapai lebih dari 101.000 hektare.

Bernard pun menekankan hubungan yang dibangun dengan para petani tidak

sebatas penjual dan pembeli. Namun, jadi bagian dari program kemitraan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan seluruh petani mitra melalui pendampingan serta praktik-praktik berkelanjutan oleh para petani.

Hingga saat ini, Asian Agri telah bermitra dengan lebih dari 30.000 petani kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup petani dan mendukung pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam penerapan praktik terbaik itu, Bernard menjelaskan best practice (praktik terbaik) untuk sawit yang berkelanjutan harus dimulai dengan kesadaran petani bahwa pengelolaan kebun bukan sekadar menanam sawit dan memanen tandan buah segar (TBS).

“Kuncinya berada pada kemitraan dengan petani untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Pengelolaan bersama petani mitra bertujuan meningkatkan hasil kebun atau produktivitas dengan tetap menjaga kualitas dan biaya yang efisien. Prinsip pengelolaan dengan *quality, product* dan *cost*,” kata Bernard.

Praktik pengelolaan kelapa sawit di Asian Agri bersifat integratif, mengupayakan setiap kegiatan dari fungsi produksi, ekologi/lingkungan serta sosial, untuk memberi manfaat keberlanjutan yakni *5C (good for community, good for country, good for climate, good for customer, dan good for company)*.

Komitmen itu ditegaskan Bernard bersifat menyeluruh dari proses awal hingga tahap akhir produksi dan rantai pasok.

“Kami memanfaatkan limbah pabrik dari sisa-sisa pengolahan sawit dan dikonversi menjadi energi listrik oleh pabrik biogas yang dibangun Asian Agri. Energi tersebut selanjutnya digunakan perusahaan untuk mendukung kebutuhan listrik Pabrik Pengolahan Inti Sawit (*Kernel Crushing Plant*) dan kelebihan listrik lainnya dapat disalurkan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan PLN untuk mendukung pasokan listrik negara. Sisa limbah lainnya digunakan sebagai sumber nutrisi tambahan bagi tanaman kelapa sawit,” kata Bernard.

Perusahaan juga memanfaatkan serabut tandan kosong dan cangkang sawit sebagai bahan bakar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar berbahan dasar fosil.



FOTO-FOTO: DOK ASIAN AGR

BENIH UNGGUL: Kelapa sawit berkualitas yang diproduksi R&D Asian Agri.

Peremajaan dengan benih berkualitas

Pohon kelapa sawit secara alami akan menjadi kurang produktif ketika memasuki usia 25 tahun sehingga pendapatan para petani sawit menjadi menurun. Untuk tetap menjaga kesejahteraan petani, maka peremajaan kelapa sawit atau *replanting* menjadi opsi.

Namun para petani kelapa sawit harus mempersiapkan banyak hal menjelang masa peremajaan kebun sawit mereka, termasuk mengantisipasi pendapatan yang terhenti dari lahan yang diremajakan dan ini akan berlangsung selama masa tunggu panen dari tanaman sawit yang baru.

Selama masa replanting tersebut, Asian Agri juga turut membantu para petani mitranya dengan beragam cara. Tak hanya di sektor pertanian saja, Asian Agri juga berusaha membangun wawasan petani untuk mengembangkan potensi kewirausahaan baik secara individu maupun melalui koperasi yang menaungi mereka. Para petani diberikan pelatihan dan kesempatan meninjau usaha kecil menengah yang sudah sukses sebagai bekal mereka menjajaki sumber mata pencaharian alternatif. Asian Agri memberikan mereka bibit hewan ternak seperti sapi, kambing, unggas dan ikan.

Selain memberi bimbingan kepada para petani selama persiapan replanting, pemilihan benih sawit akan sangat menentukan kualitas produksi dari petani untuk satu siklus tanaman sawit yang mencapai 25 tahun. Sebagai mitra petani, Asian Agri juga memberikan benih unggul Topaz yang terkenal akan produktivitas dan hasil panennya yang sa-

ngat tinggi.

Topaz merupakan benih yang dihasilkan dari proses penelitian dan pengembangan yang melibatkan para ahli yang berpengalaman. Dalam upaya menciptakan industri sawit yang berkelanjutan, Asian Agri pun mengedepankan pengembangan *research and development* (R&D) untuk menciptakan varietas-varietas unggul sawit serta upaya meningkatkan produksi dengan tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan. Hal itu dilakukan agar R&D mendukung keunggulan kompetitif, tidak hanya melalui peningkatan ketahanan tanaman, tetapi juga produktivitas yang lebih tinggi per hektare. Karena itulah, Asian Agri kemudian memprakarsai berdirinya Pusat Penelitian Kelapa Sawit (OPRS Topaz) pada 1992.

Topaz memungkinkan pekebun membudidayakan kelapa sawit tanpa perluasan lahan. Dengan fokus pada intensifikasi lahan, selain menggunakan benih Topaz sebagai materi tanam berkualitas, Asian Agri juga membekali para petani mitranya dengan pengetahuan pada bidang agronomi melalui pelatihan, pendampingan langsung, dan aplikasi teknik pengelolaan hama terpadu.

Bibit kelapa sawit Topaz Asian Agri terdiri dari lima varietas yaitu Topaz 1, Topaz 2, Topaz 3, Topaz 4 dan Topaz GT. Topaz akan berbuah lebih cepat ketimbang benih sawit lain, produksi tandan buah segar yang lebih tinggi kandungan minyak, dan juga memiliki karakteristik yang diinginkan seperti laju pertumbuhan vertikal yang lebih lambat untuk memungkinkan panen lebih mudah.

Selain itu, keunggulan Topaz

yakni adaptasi yang lebih baik untuk berbagai kondisi tanah dan cuaca. Adapun Topaz GT adalah jenis benih sawit yang cocok untuk ditanam di daerah dengan risiko tinggi penyakit Ganoderma, yang bisa menyebabkan pembusukan pada batang pohon kelapa sawit.

Tim OPRS Topaz mencakup berbagai bidang termasuk agronomi, tanah, hama dan penyakit; layanan pelatihan pembibitan kelapa sawit; dan laboratorium analitik yang sudah dikenal luas.

Benih utama Topaz memang berperan dalam meningkatkan kualitas tandan buah segar (TBS), tetapi masih ada banyak faktor lingkungan dan lainnya yang turut menentukan keberhasilan pertumbuhan kelapa sawit Topaz, termasuk manajemen perkebunan dan kondisi lokasi perkebunan.

“Di balik meningkatnya permintaan dari petani dan perusahaan perkebunan lainnya, tim R&D Asian Agri terus menyempurnakan bahan tanaman Dxp Topaz yang disebarluaskan sejak sertifikasi dan diluncurkan pertama pada 2004. Ini menempatkan Topaz di urutan kedua dari 16 produsen benih bersertifikat lainnya di pasar benih Indonesia pada 2019 dengan 13,2% pangsa pasar benih. Permintaan terhadap benih Topaz juga berasal dari banyak negara di Asia Tenggara dan Afrika,” ungkap Senior Breeder Topaz Ang Boon Beng.

Ang Boon Beng melanjutkan benih Topaz tersedia untuk petani-petani mitra selama periode penanaman kembali atau peremajaan kebun sawit. Menurut dia, penggunaan benih Topaz membantu mempersingkat masa tunggu panen. Dalam waktu 28 bu-

lan, tandan buah segar dari kelapa sawit Topaz sudah bisa dipanen. “Penanaman kembali dengan benih Topaz menghasilkan panen yang lebih tinggi pada setiap panen berikutnya, dan menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi petani,” jelas Ang Boon Beng.

Petani Mandiri Bangun Ekonomi

Selain mengedepankan pengembangan *research and development*, Asian Agri juga menilai kemitraannya dengan petani sebagai suatu hal penting yang menyatu dengan perusahaan.

Asian Agri membekali para petani dengan pengetahuan bisnis skala kecil menengah dan mengembangkan keterampilan baru sebagai sumber pendapatan alternatif.

Banyak petani sawit di Sumatera yang bermula dari program transmigrasi pemerintah. Meski awalnya dipaksa keadaan untuk berpindah ke seberang pulau, para transmigran tidak menyerah, malah bertekad semakin kuat mewujudkan mimpi mereka untuk kehidupan yang sejahtera dan menggapai cita-cita keluarga.

Kini sejumlah petani mitra Asian Agri pun berhasil menjadi agen perubahan yang berpengaruh kuat dalam membangun bidang kehidupan. Mereka mampu berkembang melalui pembinaan langsung dari perusahaan dengan menerapkan praktik terbaik pengelolaan kebun sawit.

Para petani juga dibimbing untuk membentuk koperasi sebagai organisasi yang mewadahi komunikasi dan sebagai sarana bertukar pikiran agar mereka bisa mengembangkan usaha sawit secara ramah lingkungan.

Kemitraan yang dijalin petani dengan Asian Agri pada awalnya didasari keinginan mereka untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Namun seiring dengan meningkatnya ekonomi keluarga mereka, maka perhatian terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan menjadi agenda penting dalam kehidupan keluarga.

Para petani berharap generasi penerus mereka bisa menimba ilmu lebih tinggi dan mendapat kesempatan bekerja yang lebih mumpuni. Kini banyak petani yang mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke pendidikan S2 dengan bidang beragam mulai dari bidang pertanian, dokter, hingga ada yang menjadi dosen.

“Kami mendorong petani mitra kami untuk memiliki wawasan yang luas, lebih dari sekedar berpengalaman

dalam budidaya sawit. Asian Agri juga memberikan pendampingan dan kesempatan mengikuti studi banding agar mereka dapat melihat potensi kewirausahaan serta mengembangkan sesuai kondisi masing-masing,” ujar Rudy Rismanto, Head of Partnership Asian Agri.

Beberapa petani bahkan sukses mengembangkan usaha di bidang non-sawit seperti peternakan kambing, sapi, ikan, serta usaha sarang burung walet. Tengok saja, salah satu petani mitra Asian Agri yang telah sukses yakni Robertson Girsang. Dia meninggalkan kampungnya di Simalungun, Sumatera Utara, untuk merantau ke Muara Tebo, Jambi. Meski awalnya ia tidak dapat langsung menikmati hasil pertanian, sejak menjadi petani sawit kehidupannya pun berubah.

Penghasilan Robertson Girsang diperoleh dari hasil sawit di 12 hektare kebun miliknya. Tak hanya berhenti di sana, pada 2016 setelah melakukan pelatihan studi banding ke Yogyakarta, Girsang menanam jeruk seluas 5.000 m2 yang sekarang ini sudah berproduksi sebanyak 12 ton dalam sekali panen. Dari segala usahanya tersebut, Girsang mampu menyekolahkan ketiga anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Anak pertamanya Ronal Girsang yang usia 29 tahun kini bekerja sebagai dosen di Universitas Muara Bungo, Jambi, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Begitu juga untuk anak keduanya, dr. Roni Girsang yang berusia 27 tahun, saat ini bekerja di RSUD Sarolangun, Jambi.

“Saat ini saya sedang fokus untuk menambah lahan jeruk sebagai sumber penghasilan tambahan karena dalam waktu dekat kami akan melakukan replanting kebun sawit bersama PT Rigunas Agri Utama (PT. RAU),” tutur Girsang.

Kisah serupa juga dialami oleh Rachman, petani di KUD Tanjung Dani Sakti, Jambi. Pemilik kebun sawit seluas 14 hektare ini mengembangkan usaha peternakan sapi sebanyak 30 ekor yang membiayai 8 orang anaknya. Berkat kebun sawit dan usaha pendapatan alternatif yang dikelola keluarganya, Rachman mampu membina dua putranya menjadi petani generasi kedua yang mengurus kelapa sawit dan mengantarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan hingga meraih gelar S2 dan mengabdikan sebagai dosen di Universitas Jambi. (Dro/S3-25)



PETANI MANDIRI: Rachman, petani di KUD Tanjung Dani Sakti, Jambi. Pemilik kebun sawit seluas 14 hektare ini mengembangkan usaha peternakan 30 ekor sapi untuk membiayai 8 orang anaknya.

KLHK Siapkan Tiga Strategi Atasi Karhutla

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan tiga strategi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga langkah itu akan diperkuat sebagai upaya pencegahan karhutla.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pascakebakaran hutan dan lahan pada 2015, Pemerintah mengembangkan paradigma pengendalian karhutla dengan mengedepankan pencegahan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam setiap Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan pada 6 Februari 2020 di Istana Negara.

“Berdasarkan data KLHK, kasus karhutla di Indonesia terjadi mulai Juli hingga puncaknya Agustus. Meski begitu, untuk wilayah Riau memiliki dua puncak dalam satu tahun,” ungkap Siti, belum lama ini.

Ia mengatakan, sejak awal 2020 KLHK mulai menyempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen dengan tiga langkah utama. Antara lain, penanganan dengan Satuan Tugas Karhutla yang dikontrol langsung Presiden, penerapan modifikasi cuaca untuk membantu khususnya pembasahan gambut dan mengurangi titik panas, serta penanganan kesadaran hukum

masyarakat dalam keseharian dan livelihood.

“Pada Rapat Kabinet Terbatas 23 Januari lalu Presiden menegaskan tentang perlunya solusi permanen dalam pengendalian karhutla dengan melibatkan para pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat tapak,” jelas dia.

Untuk itu, kata Siti, sinergitas para pihak ini menjadi faktor penting untuk bersama-sama bergerak mulai dari tingkat tapak dan masyarakat. Ini menjadi salah satu unsur yang harus dilibatkan dalam setiap upaya karhutla selain peran dari pemerintah daerah (Pemda).

Siti menjelaskan, upaya langkah-langkah baru dengan menggandeng masyarakat selaku pembakaran di lapangan dan melibatkan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam pencegahan karhutla. Masyarakat akan bersama-sama melakukan pengendalian.

“Keterlibatan masyarakat dilakukan baik untuk pencegahan melalui pendampingan masyarakat maupun penanggulangan dengan dilibatkan dalam pemadaman karhutla,” jelas dia.

Untuk meningkatkan peran SDM dimaksud dalam mendampingi masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pendamping dalam aspek hukum (masyarakat) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pema-



FOTO-FOTO: DOK KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020, Jakarta (2/7).

haman yang komprehensif itu diharapkan dapat terbentuk masyarakat berkesadaran hukum, yang menjadi salah satu solusi permanen karhutla.

“Kami harap model ini menjadi bagian dari solusi permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak berbasis desa dengan peningkatan peran serta masyarakat,” lanjut dia.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman menyampaikannya, saat ini pihaknya telah melakukan strategi pencegahan karhutla masa

pandemi covid-19. “Apalagi, kami menganalisa bahwa puncak musim panas 65% akan terjadi di Agustus ini,” ujarnya.

Adapun, upaya pencegahan yang dilakukan KLHK sudah dilakukan sejak Februari 2020. Upaya ini dimodifikasi secara sinergi dilakukan berbarengan dengan pencegahan covid-19.

“Sejak Februari sudah dilakukan namun karena ada pandemi covid-918, upaya ini kami modifikasi,” kata dia.

Di antaranya, kata Ruandha, melakukan deteksi dini, patroli pencegahan karhut-

la, pengurangan risiko karhutla, sosialisasi kampanye, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), melibatkan masyarakat dalam, penguatan teknik pencegahan karhutla, pelatihan pembentukan brigade dalkarhutla di tingkat tapak, penguatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, dukungan anggaran untuk dalkarhutla, pemadaman darat dan udara, pencegahan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta penanganan pascakebakaran.

Adapun, siklus kebakaran di Indonesia dipetakan menjadi lima fase. Pemetaan

ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan personel terhadap kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk fase pertama, fase prakrisis yang terjadi pada Januari hingga April, kedua fase peringatan yang terjadi pada April hingga Juni, ketiga fase krisis sekitar Juni hingga Oktober, keempat fase krisis sudah terlewati pada Oktober hingga November, serta kelima fase evaluasi terjadi sekitar Desember.

“Mudah-mudahan tahun ini kami lebih siap menghadapi karhutla,” kata dia.

Ruandha menyampaikan, tantangan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan karhutla selama masa pandemi covid-19 antara lain dengan diberlakukannya PSBB di beberapa daerah sehingga personel dari luar daerah tidak bisa masuk ke daerah tertentu. Satgas atau personel di lapangan juga mendapat tugas tambahan untuk menjadi petugas penanggulangan covid-19.

“Sehingga konsentrasi petugas ikut terbagi,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ruandha, tantangan lain ialah peringatan potensi karhutla, ancaman kesehatan petugas lapangan oleh covid-19.

Solusi konkret

Ruandha menyebut, ada tiga solusi konkret yang dilakukan KLHK untuk pencegahan karhutla. Sesuai

instruksi Presiden Jokowi solusi tersebut menjadi solusi permanen terhadap pencegahan karhutla.

Pertama, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Ini terbukti sukses diterapkan saat puncak pertama di Riau.

“Dengan teknologi TMC, siklus hujan lebih panjang. Hingga saat ini, Pekanbaru, Riau, masih hujan. Biasanya asap sudah tebal, sehingga selain daerah tersebut bebas asap, gambut daerah sana terendam air dan sulit terbakar. Kalau sudah terbakar bara tersimpan lama dan asapnya berbahaya,” jelas dia.

Kedua, membentuk MPA paralegal. MPA paralegal ini amat penting agar MPA sadar bahwa kegiatan pembakaran hutan merupakan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan hukum negara Indonesia.

“Ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Upaya penegakan hukum juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla,” ujarnya.

Langkah ketiga pencegahan karhutla ialah pengelolaan lanskap hutan. Salah satu penyebab karhutla ialah pembukaan lahan dengan membakar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemegang konsesi menjadi penting.

“Solusi permanen ini butuh kerja sama dengan semua pihak,” tandas dia. (Gan/S2-25)

MPA Paralegal Tingkatkan Peran Serta Masyarakat

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bagi para Masyarakat Peduli Api (MPA) berkesadaran hukum (paralegal) belum lama ini. Acara itu diselenggarakan pada 4 hingga 8 Agustus kemarin.

Kepala Badan MPA, Helmi Basalamah, menyampaikan, pelatihan itu merupakan panduan dua program kementerian dan merupakan program prioritas nasional dalam pengendalian karhutla. Ini bertujuan mengendalikan karhutla dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya yang terlibat langsung dalam upaya pengendalian karhutla.

“Kami harap menjadi satu program yang diharapkan menjadi solusi permanen dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla dengan masyarakat berkesadaran hukum,” jelas Helmi, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, pelatihan MPA paralegal dilaksanakan secara blended learning, yaitu untuk mata pelatihan teori dilakukan secara kelas daring dengan menggunakan Learning Management System (LMS) yang dimiliki KLHLK. Sedangkan untuk praktik lapangan dilakukan secara kelas tatap muka didampingi secara langsung oleh instruktur dari Balai PPI, Taman Nasional, dan Daops Manggala Agni, serta dilakukan bimbingan jarak jauh oleh pengajar.

Adapun sasaran dari pelatihan ini diharapkan para peserta nantinya mampu menguasai tujuh hal. Pertama, menjelaskan alur pengenalan program pelatihan *e-learning*. Kedua, menjelaskan kebijakan pengendalian karhutla dan penegakan hukum. Ketiga, menjelaskan dasar-dasar penanganan karhutla.

Keempat, melakukan teknik pengendalian karhutla. Kelima, menjelaskan peran MPA berkesadaran hukum. Keenam, menjelaskan pengenalan usaha produktif, dan ketujuh menyusun rencana aksi pengendalian karhutla.

“Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam



Pelatihan MPA Paralegal.

upaya pengendalian karhutla secara utuh, memiliki kapasitas sebagai SDM pendamping dalam aspek hukum (masyarakat), dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa tempat asal peserta,” lanjut dia.

Helmi mengatakan, pelatihan pengendalian karhutla bagi MPA paralegal setara dengan 26 jam pelajaran masing-masing 45 menit, 15 JP mata pelatihan teori, dan 11 JP mata pelatihan praktik. Adapun jumlah peserta pelatihan sebanyak 247 orang, terbagi dalam 11 angkatan meliputi 9 wilayah desa daratan dan 2 wilayah desa perairan.

Di antaranya Provinsi Riau di Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukui Pelawan; Desa Pergam, Rupat Bengkalis; dan Desa Tanjung Medang, Rangsang. Kepulauan Meranti di Desa Pulau Gelang, Kuala Cenaku Indragiri Rokan; Dosan, Pusako Siak. Provinsi Jambi di Desa Catur Rahayu, Dendang Tanjung Jabung Timur dan Desa Rantau Rasau, Berbak Muara Jambi.

Kemudian Provinsi Sumatra Selatan di Desa Rideng, Pangkalan Lampam Ogan Komering Ilir. Provinsi Kalimantan Barat di Desa Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Tumbang Nusa, Jabiren Raya Pulau Pisau. Provinsi Jawa Barat di Desa Bantar Agung, Sindang Wangi Majalengka.

“Peserta terdiri atas beberapa unsur yaitu polsek, koramil, babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, pendamping masyarakat (LSM), tokoh masyarakat dan masyarakat yang berkesadaran hukum,” lanjut dia.

Pada akhir pelatihan akan

dilakukan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Evaluasi berupa hasil evaluasi tugas mandiri, nilai praktik serta sikap perilaku peserta selama mengikuti pelatihan. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan kepada pengajar atau nara sumber dan penyelenggara untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Adapun pengajar atau narasumber pelatihan ini berasal dari beberapa unsur yakni BP2SDMK, Direktorat Jenderal PPI, Direktorat Jenderal KSDAE, BPBD provinsi dan kabupaten, kepolisian (polda, polres) dan TNI (Komandan Kodim), serta praktisi (LSM).

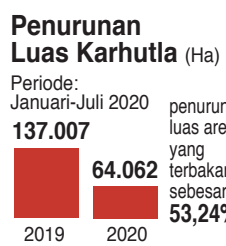
Dean Musel, peserta pelatihan MPA dari Desa Pulau Gelang, Kecamatan Cenaku, mengaku dengan pelatihan MPA paralegal, dia mendapat segudang ilmu dan pelajaran yang tidak terhingga. Sehingga, dia jauh lebih memahami dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.

“Ini adalah bekal bagi kami untuk menyambung lidah dari KLHK, Manggala Agni, TNI, dan Polri dalam menyosialisasikan serta mengampayekan tentang karhutla di Kecamatan Kuala Cenaku serta masyarakat desa Pulau Gelang khususnya,” kata dia.

Ia berharap, rekan-rekannya yang juga telah mengikuti pelatihan agar dapat bersama-sama menerapkan ilmu yang telah didapat. Sebab, berawal dari diri sendiri, teman terdekat, saudara, sampai pada seluruh masyarakat.

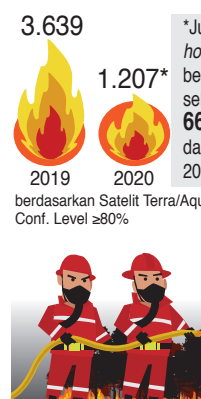
“Jangan pernah merasa lelah dan putus asa dalam menyampaikan pencegahan dan pengendalian karhutla,” kata dia lagi. (Gan/S2-25)

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 2020



Perbandingan Jumlah Hotspot

Periode: 1 Januari-13 Agustus 2020



Sumatra Utara	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Sibolangit	60	
2. Pematang Siantar	60	
3. Labuhan Batu	60	

Riau	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Dumai	60	
2. Pekanbaru	30	
3. Pongkor	60	
4. Siak	60	
5. Batam	30	

Jambi	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Jambi	60	
2. Muara Bulian	30	
3. Bukit Tempurung	45	
4. Sarolangun	60	
5. Muara Tebo	60	

Sumatra Selatan	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Banyuasin	60	
2. Musi Banyuasin	60	
3. Ogan Komering Ilir	60	
4. Lahat	60	

Kalimantan Barat	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Pontianak	60	
2. Singkawang	60	
3. Sintang	90	
4. Ketapang	60	

Kalimantan Tengah	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Palangka Raya	75	
2. Kapuas	45	
3. Muara Teweh	60	
4. Pangkajene	45	

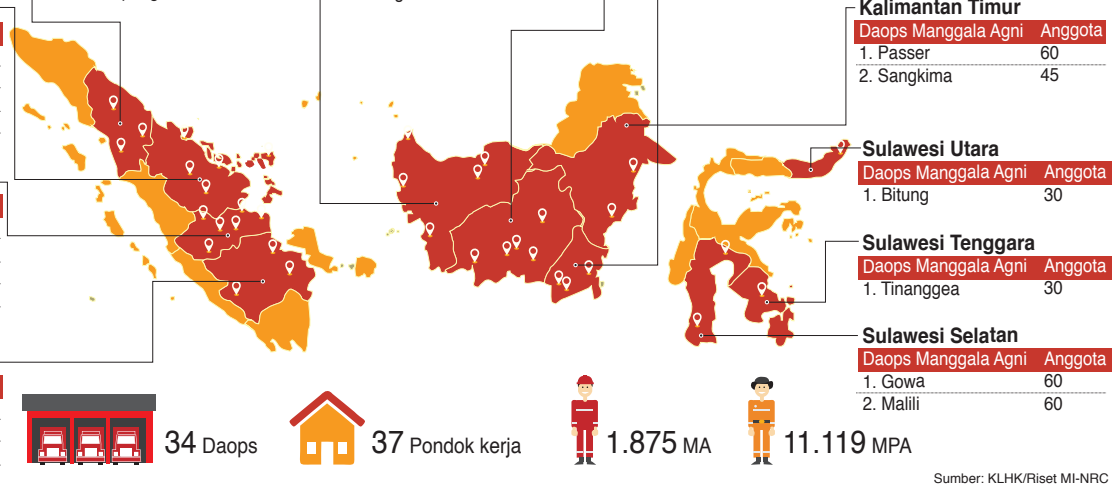
Kalimantan Selatan	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Banjar	60	
2. Tanah Bumbu	60	
3. Tanah Laut	60	

Kalimantan Timur	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Paser	60	
2. Sangkima	45	

Sulawesi Utara	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Bitung	30	

Sulawesi Tenggara	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Tinanggea	30	

Sulawesi Selatan	Daops Manggala Agni	Anggota
1. Gowa	60	
2. Maitili	60	



Pelatihan MPA Paralegal dilakukan secara Daring

DI masa pandemi covid-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan masyarakat berkesadaran hukum dalam pengendalian karhutla.

Pada saat pembukaan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Basar Manullang, mengatakan, pelatihan yang membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) paralegal ini digelar sejak Selasa (4/8) hingga Sabtu (8/8) kemarin. Pelatihan ini diselenggarakan secara daring atau e-learning melalui fasilitas video conference.

“Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan peran dan kapasitas SDM dalam mendampingi masyarakat dalam aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengendalian karhutla,”

ungkap Basar pada Media Indonesia, Selasa (11/8).

Ia mengatakan, dalam upaya pengendalian karhutla, termasuk dalam hal pencegahannya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pendamping dalam aspek hukum. Dengan pemahaman yang komprehensif terkait aspek hukum, diharapkan dapat terbentuk masyarakat berkesadaran hukum, yang menjadi salah satu solusi permanen upaya pengendalian karhutla.

Basar mengharapkan, seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh. Selain itu, peserta juga dapat memiliki kapasitas sebagai SDM pendamping dalam aspek hukum dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa asal peserta.

“Peserta terdiri atas anggota polsek, koramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, pendamping masya-

“Dengan adanya pembentukan MPA paralegal ini, peserta diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla.”

rakat (LSM), dan masyarakat yang berkesadaran hukum,” lanjut dia.

Basar menambahkan, setelah peristiwa karhutla yang terjadi pada 2015, Pemerintah mengubah paradigma pengendalian dengan mengedepankan upaya pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla sejak 2016. “Perubahan paradigma dengan upaya pencegahan ini terus dilakukan dalam aksi-aksi lapangan yang dilaksanakan

terutama di tingkat tapak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata dia.

Dengan adanya pembentukan MPA paralegal ini, kata dia, peserta diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang ada, melalui kegiatan patroli pencegahan, penyuluhan, pergerakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar, juga melakukan tindakan pemadaman awal apabila diperlukan.

Adapun materi pelatihan yang diberikan antara lain, menjelaskan alur pengenalan program pelatihan e-learning, menjelaskan kebijakan pengendalian karhutla dan penegakan hukum menjelaskan dasar-dasar pengantar karhutla, melakukan teknik pengendalian karhutla, menjelaskan peran MPA berkesadaran hukum, menjelaskan pengenalan usaha produktif, dan menyusun rencana aksi pengendalian karhutla. (Gan/S2-25)

Badut yang Merdeka

Radhar Panca Dahana
Budayawan

SIAPA pun atau apa pun yang merasa dirinya merdeka sebenarnya pada saat yang bersamaan dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak merdeka. Apa yang kita sebut atau kita anggap sebagai sebuah kemerdekaan sebenarnya tidak lain adalah sebuah imajinasi dari kemerdekaan itu sendiri, bahkan ia hanya menjadi suatu ilusi.

Mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai obsesi, ia merasa dirinya memiliki apa yang disebut dengan kemerdekaan, katakanlah secara konstitusional. Atau, sebagian melihat atau menerima kebebasan atau kemerdekaan sebagai sebuah keniscayaan, sebagai takdir.

Apa yang disebut misalnya kebudayaan itu sebenarnya tidak lain adalah kebebasan atau kemerdekaan yang bisa dikatakan palsu dalam arti kemerdekaan itu atau kebebasan itu ia dapatkan dari justru ketidakmerdekaan yang dia dapatkan atau alami. Dia harus berbagi, membagi diri dengan pihak lain, karena ia tidak mampu secara penuh memberi kemerdekaan, bahkan bagi dirinya sendiri.

Bila ada satu atau beberapa pihak yang beranggapan atau menyatakan bahwa dia harus memiliki kebebasan dalam mengekspresikan apa pun dalam kehidupannya, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, sebagaimana yang kita pahami dalam filsafat sampai kepada ideologi, itu sesungguhnya adalah sebuah kebebasan yang tetap saja bersifat fakultatif.

Dia tidak bisa menjadi kebebasan yang mutlak, seseorang atas nama apa pun. Siapa pun makhluk itu, baik dari yang hidup maupun mati. Makhluk yang *ghoib* atau yang fisis, semuanya memiliki kenyataan bahwa dia berada dalam suatu fakultas yang menempatkan dia dalam peran-peran atau fungsi-fungsi, yang secara imperatif mau harus diterima sebagai bagian dari kenyataan dirinya.

Jadi, bila ada kelompok seseorang atau pihak tertentu yang selalu mengatakan bahwa dia berjuang atau memiliki sebenarnya, seperti yang sudah saya katakan, bahwa dia sedang berilusi karena tidak ada dari satu pun faktor yang membuat dia bisa menerjemahkan kebebasan itu.

Dalam kenyataannya yang kita alami yang kita lihat dan dengar belakangan ini, kita tahu banyak sekali manusia atau golongan orang yang mencoba menghadirkan kebebasan yang bersifat murni bahkan mutlak, dengan cara memutlakkan orang lain. Kemutlakan yang tidak lagi bebas dari dirinya sendiri.

Banyak sekali kecenderungan pihak-pihak tertentu menggunakan jargon-jargon atau cara berpikir, juga ideologi atau filosofi, yang sebenarnya tidak lain itu merupakan sebuah alibi, sebuah alasan yang justru menunjukkan tidak mampu memerdekakan dirinya secara sejati. Jadi, apa yang mau tak mau dia harus berupaya melepaskan diri dari kenyataan yang dia anggap itu bebas, artinya ia sebenarnya dia itu tidak bebas.

Dalam sejarah yang kita pelajari di mana pun baik di negeri ini atau di negeri lain, kita tahu bahwa kebebasan atau kemerdekaan ini menghiasi riwayat dari sejarah bangsa-bangsa, tidak lain hanyalah harapan atau ideal, yang secara jujur tidak mungkin terwujud.

Soekarno-Hatta yang pernah ada

dalam situasi dia harus tertelung oleh kehendak para pemuda, yang kita tahu Soekarno-Hatta sendiri sebenarnya tidak menghendaki apa yang disuarakan para anak muda itu. Soekarno-Hatta memiliki keinginan dan tujuan sendiri. Tapi dia harus mau menjalankan apa yang diperintahkan para pemuda. Artinya, pada saat itu kebebasan yang kita perjuangkan itu didapatkan dari cara yang tidak bebas, tidak merdeka. Ini bisa jadi renungan, kemerdekaan dalam kasus itu dan juga bisa menjadi renungan bahwa kebebasan apa pun atau, mengandung atau memiliki makna yang berbeda.

Imajinasi kebebasan

Jadi ketika atau beberapa orang atau beberapa pihak yang kita kenali. Atau, kita ketahui belakangan ini melakukan tindakan-tindakan, cara berpikir, bersikap atau berperilaku yang seolah-olah itu menunjukkan kebebasan atau kemampuan dia membebaskan diri dari penjara orang lain, pada dasarnya dia sedang dipenjaranya dirinya sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya apa yang

nyatakan bahwa orang lain itu adalah neraka, atau pesaing orang lain harus kita lawan dan kita hancurkan.

(Per)saingan itu tidak terjadi di dalam agama, tapi juga di dalam politik, ekonomi, bahkan sains yang bagaimana sains itu sebenarnya memperlihatkan persaingan yang justru mengorbankan kebenaran.

Sementara itu, dalam kehidupan kita secara primordial, kehidupan yang sebelumnya masih belum banyak terisi oleh budaya yang telah sudah berlangsung selama ribuan tahun di dalam negeri ini, dan mencapai titik keseimbangannya, setiap pihak itu pada akhirnya selalu bekerja sama, bertenggang rasa atau bergotong royong ketika misalnya harus

Semua itu kembali kepada seseorang yang mau tidak mau terjebak dalam ritus atau sirkus mainan sekelompok manusia yang merasa bisa memainkan. Kecuali, ia menjadi badut yang biasa menjadi peran utama dalam sirkus itu. Tapi siapa yang menjadi badut itu?

itu ternyata menciptakan korban, yang tidak lain adalah kebudayaan, adat dan istiadat, atau hal-hal yang selama ini meneguhkan kita sebagai manusia, sebagai bangsa, ribuan tahun lamanya.

Apakah kebebasan yang selama ini diimajinasikan itu bisa menjadi faktor penting bagi terjadinya perubahan? Yang ternyata diisi gagasan besar, ada jiwa besar, ada hati yang besar, yang dapat menggiring bisa memimpin bangsa ini, dan seluruh elemennya, kenyataan ini yang involutif yang ia sedang alami.

Sirkus kepemimpinan

Sering kita melihat bagaimana menjadi sirkus yang berputar-putar, hanya sebagai hiburan tidak memberikan penyelesaian. Menjadi sirkulasi kepemimpinan tanpa jiwa besar itu, apakah ada pikiran besar, hati yang besar, atau rohani yang besar. Adanya cara kita berpikir untuk mendapatkan orang besar dari faktor kelahiran, itu menjadi

jebakan 'batman' yang membuat kita berada dalam lingkaran yang tiada putusnya tentang

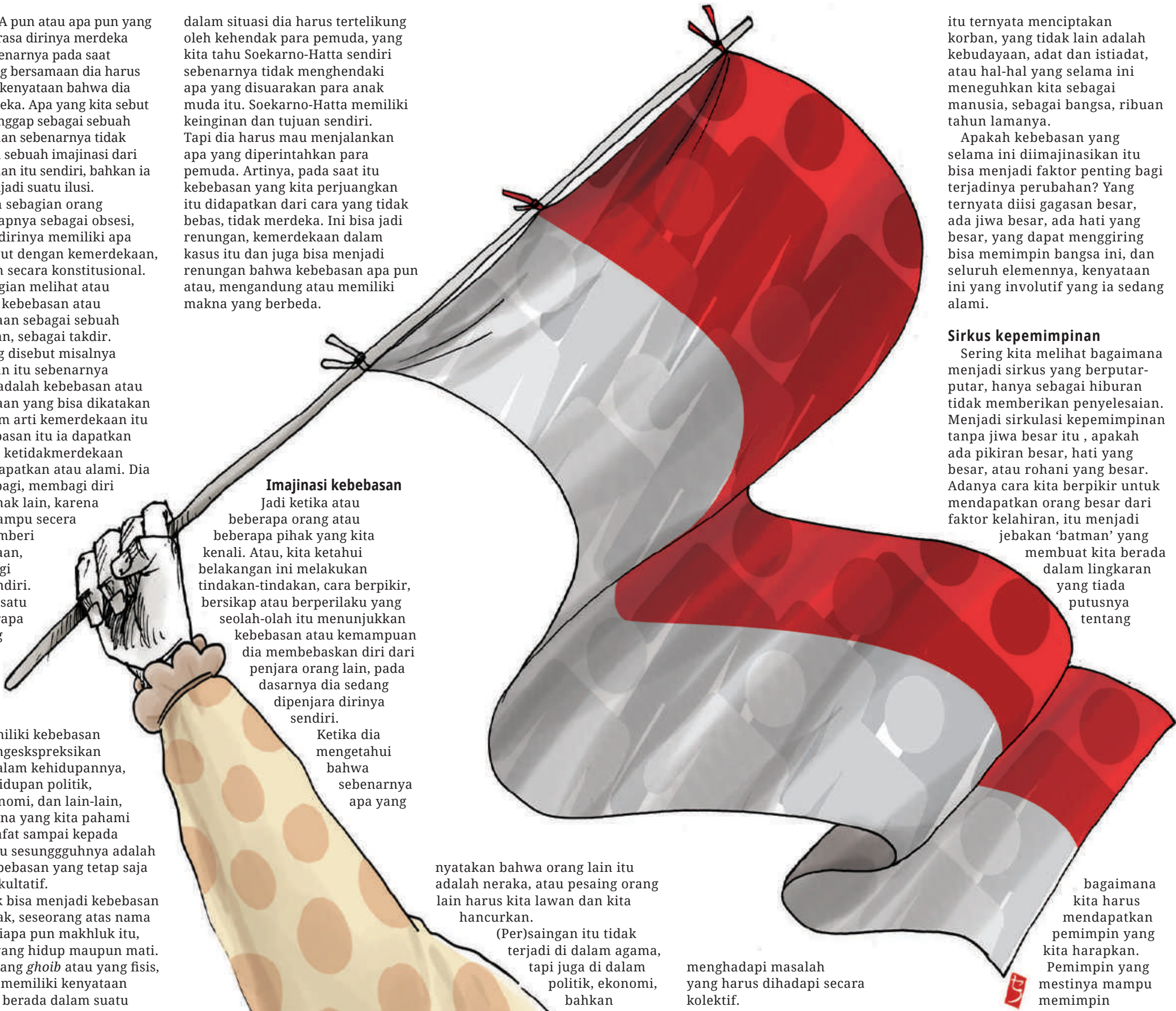
bagaimana kita harus mendapatkan pemimpin yang kita harapkan. Pemimpin yang mestinya mampu memimpin imajinasi

bangsanya, keluar dari ilusinya, dan yang mampu membuktikan kerja sebagai bangsa, sebagai manusia. Inilah pekerjaan kita yang utama di dalam kandungan kebebasan atau di dalam kemerdekaan ini bahwa sebuah bangsa yang merasa dirinya cukup laik untuk dianggap memiliki kebebasan dan kuat adalah bangsa yang bisa mendidik dirinya sendiri. Yang bisa berkembang mencapai tujuan-tujuannya, bangsa yang bisa memberikan pelajaran memberikan gagasan bangsa yang berani berkorban, dan lain-lain.

Semua itu mestinya terwujud dalam sebuah kualitas dari seorang pemimpin, yang itu dibangun oleh pengalaman, oleh pengetahuan, oleh katakanlah keilahian, sebenarnya sudah menjadi kodrat kemanusiaan kita.

Apakah kita mau bersama menciptakan suatu proses yang melahirkan pemimpin semacam itu? Bukan pemimpin yang muncul dengan cara yang selama ini kita anggap cara demokratis, yakni seseorang itu dipilih, atau ditempatkan, diposisikan berdasarkan jumlah kursi, atau berdasarkan jumlah suara, yang sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang kualitas, mutu, dari seorang pemimpin.

Semua itu kembali kepada seseorang yang mau tidak mau terjebak dalam ritus atau sirkus mainan sekelompok manusia yang merasa bisa memainkan. Kecuali, ia menjadi badut yang biasa menjadi peran utama dalam sirkus itu. Tapi siapa yang menjadi badut itu?



Benahi Bandara di Provinsi Termuda

Pembangunan infrastruktur terus dipacu di Kalimantan Utara. Koordinasi apik dengan pemerintah pusat menjadi kuncinya

JONGGI MANIHURUK
jonggi@mediaindonesia.com

PADA 22 April tujuh tahun lalu, Kalimantan Utara menjadi yang termuda dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam usia yang relatif muda, daerah ini harus mengejar banyak hal untuk bisa tumbuh setara dengan daerah lain.

Untuk itu, Irianto Lambrie yang memimpin daerah ini sejak awal berdiri, harus bekerja keras. Di antaranya dengan intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Hasilnya sudah terlihat. Dari sisi infrastruktur, banyak pembangunan digulirkan. Salah satunya di sisi perhubungan udara. Sejak 2014 misalnya, empat bandara kecil di Kaltara mendapat perhatian pemerintah pusat. Bandara dibangun. Kini keempatnya bisa didarati pesawat jenis ATR-2.

“Sebenarnya ada enam bandara yang menjadi prioritas pengembangan. Keenamnya ialah Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Bulungan, Bandara Kolonel RA Bessing di Malinau, Bandara Long Apung di Malinau, serta di Nunukan ada Bandara Nunukan dan Yuvai Semarang Krayan,” jelasnya.

Selama lima tahun, keenam bandara mengalami perubahan signifikan. Bahkan, empat bandara di antaranya telah memenuhi syarat untuk didarati pesawat besar, salah satunya ATR-72, yaitu Bandara Nunukan,

Bandara Tanjung Harapan, Bandara Malinau, dan Bandara Yuvai Semarang Krayan.

Sementara itu, Bandara Juwata Tarakan merupakan bandara internasional. Kondisinya semakin membaik. Pengembangan terus dilakukan.

“Saat Presiden ke kaltara, tahun lalu, saya kembali mengusulkan. Namun, karena tahun ini ada pandemi covid-19, rencana itu sedikit tertunda,” kata Irianto.

Rp1 triliun

Nunukan menjadi salah bandara yang pengembangannya berlangsung cepat. Dahulu bandara ini jauh dari standar internasional. Sampai 2016, panjang landasannya hanya 1.100 meter. Kini panjang *runway* mencapai 1.600 meter dengan lebar 30 meter.

Pekerjaan konstruksi di bandara ini dimulai pada 2017. Saat itu ada perpanjangan landasan 500 meter. Anggaran dikucurkan Rp35 miliar lebih.

Dua tahun kemudian kembali ada perpanjangan hingga 150 meter dengan dana Rp19 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid menambahkan, dengan panjang *runway* yang diverifikasi mencapai 1.600 meter, Bandara Nunukan bisa didarati ATR-72. Perubahan yang sama juga terjadi di Bandara Tanjung Harapan, Kolonel RA Bessing, dan Yuvai Semarang.

Gubernur Irianto mengakui peran besar yang diambil pemerintah pusat. Selama 2014-2018, pengembangan enam



DOK HUMAS PEMROV KALTARA

PENGEMBANGAN BANDARA: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana pengembangan bandara di Nunukan.

bandara mendapat kucuran dana dari APBN hingga lebih dari Rp1 triliun.

“Ini tidak lepas dari komunikasi dan sinergi yang baik yang kita lakukan secara intens dengan pusat. Tidak hanya dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hingga Budi Karya Sumadi, tetapi juga langsung kami lakukan ke Presiden,” katanya.

Dengan anggaran sendiri, Pemerintah Provinsi Kaltara juga membenai lapangan terbang di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Nunukan. Dana APBD 2020 dikucurkan sebesar Rp3 miliar.

“Kami membenahi *runway* yang sebelumnya berbelok

dan tidak lurus. Dari semula panjangnya hanya 440 meter dengan lebar 26 meter, dibenahi menjadi 500 meter x 26 meter dengan kondisi lurus,” tambah Taupan.

Empat koridor

Pada awal Agustus, kabar baik bertuip dari Beijing, ibu kota Tiongkok. Kalimantan Utara menjadi salah satu dari empat koridor percepatan pembangunan infrastruktur hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Komisi Reformasi Pembangunan Tiongkok.

Tiga koridor lain ialah Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Di Kalimantan Utara,

proyek yang disepakati ialah pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pertambangan.

“Kemenko Maritim dan NDRC segera menyelesaikan MoU Komisi Pelaksana Bersama untuk mendorong pembentukan tim perencanaan dan tim pelaksana proyek guna mempercepat proyek pembangunan di empat koridor tersebut,” kata Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun.

Keputusan itu diambil setelah para deputi dari Kemenko Kemaritiman dan Kemenko Perekonomian menemui Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Gao Yan dan sejumlah pejabat

lain di Beijing.

“Pertemuan ini merupakan implementasi dari hasil kunjungan Perdana Menteri Li Keqiang ke Indonesia beberapa waktu lalu,” ujar Djauhari.

Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Gao Yan menyambut positif peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. “Implementasi program kerja pembangunan infrastruktur di empat koridor sangat penting.” (N-2)

Gubernur Optimistis Perekonomian Kaltara Segera Membaik

GOVERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimistis Kaltara akan mampu melewati masa krisis akibat pandemi covid-19 dengan kondisi perekonomian yang tetap baik. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan guna memastikan pergerakan perekonomian dan tingkat konsumsi masyarakat tetap baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Provinsi Kaltara meski perekonomian terkontraksi, namun beberapa sektor masih tumbuh positif. “BPS mencatat, ekonomi Kaltara triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 terkontraksi 3,35% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan negatif didorong oleh hampir semua lapangan usaha, di mana tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar 19,27%. Sedangkan, dari sisi pengeluaran pertumbuhan negatif tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang terkontraksi sebesar 6,54%,” ucap Irianto.

Ekonomi Kaltara, katanya, pada semester I-2020 tumbuh meski tidak signifikan dibanding semester I-2019, yaitu tumbuh 0,81% (c-to-c).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,89%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen impor barang dan jasa yang tumbuh 7,45%. “Itu artinya, meski mengalami kontraksi, perekonomian Kaltara masih tetap tumbuh positif pada beberapa sektor. Bahkan, masih terhitung jauh dari resesi. Namun, kita jangan lengah dan jangan sampai turunnya negatif, sebab kalau turun lagi dan negatif maka akan resesi,” tutur Gubernur.

Pertumbuhan ekonomi yang masih baik itu, juga terasa hingga di wilayah perbatasan. “Jadi, pandemi ini memang belum berpengaruh besar



kepada pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Ini terbukti dengan masih baiknya tingkat konsumsi masyarakat, perdagangan lokal juga berjalan baik. Untuk ekspor-impor, atau perdagangan lintas batas, diawal-awal sempat terkenala namun dengan berbagai pendekatan akhirnya dapat berjalan lagi,” ulas Irianto.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan II-2020 (Y on Y) tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan 0,48%. Sementara secara Q to Q, sumber perekonomian tertinggi pada triwulan II-2020 adalah administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan sumbangannya 0,22%.

“Kalau dilihat dari struktur PDRB menurut pengeluaran triwulan II-2020, distribusi terbesar terhadap total PDRB Kaltara adalah net ekspor, PMTB, dan konsumsi rumah tangga,” beber Gubernur.

Upaya untuk perbatasan

Lebih lanjut Irianto mengungkapkan, Pemprov Kaltara melakukan berbagai upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Program itu, di antaranya pengembangan kerja sama Indo-

nesia-Malaysia lewat beberapa forum, penyediaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan udara ke wilayah perbatasan. “Untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan dilakukan lewat beberapa forum. Di antaranya, BIMP-EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area), Sosek-Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), Heart Borneo dan lainnya,” ucap Irianto.

Terakhir, Gubernur menuruti Ketua Menteri Serawak, Malaysia, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk membuka jalur keluar-masuk perbatasan Krayan, Indonesia-Serawak. “Ketua Menteri Serawak merespons positif Surat Gubernur Kaltara Nomor 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020. Ini penting, karena kaitannya dengan keperluan perdagangan antar kedua wilayah,” jelasnya.

Ketua Menteri Serawak, sebut Irianto, pada intinya meminta daftar barang yang dibutuhkan apa saja. “Usulan kebutuhan tersebut masih

terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas, yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan. Dalam waktu dekat penyusunan daftar kebutuhan ini akan rampung. Kalau selesai, segera dikirim ke Ketua Menteri Sabah.”

Gubernur juga menyampaikan, nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) pada 1970 sebesar 600 Ringgit Malaysia (RM) segera direvisi. “Informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo. Ini terkait nilai BTA yang nanti disepakati,” ungkapnya.



RA Bessing di Malinau, Bandara Long Apung di Malinau, serta di Nunukan ada Bandara Nunukan dan Yuvai Semarang Krayan. Kini, Bandara Nunukan, Bandara Tanjung Harapan (Bulungan), Bandara Malinau dan Bandara Yuvai Semarang, Krayan sudah dapat didarati ATR-72,” urainya

Pengembangan enam bandara itu, lanjut Gubernur, dijalankan dalam kurun waktu 2014-2018, dan mendapatkan dukungan penuh dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nilainya Rp1 triliun lebih. Dengan rincian, pada 2014 dianggarkan Rp263,8 miliar, pada 2015 sebesar Rp272,1 miliar, 2016 sebesar Rp152,8 miliar, 2017 sebesar Rp243,8 miliar, dan di 2018 sebesar Rp182 miliar,” jelasnya.

Untuk program SOA Barang sendiri, dijelaskan Gubernur bahwa pada tahun ini ada delapan rute yang menjadi titik penyaluran. “Anggaran pelaksanaan SOA barang tahun ini, sebesar Rp9 miliar,” ucap Irianto.

Kedelapan rute tersebut adalah Nunukan-Sebakis, Malinau-Mentarang Hulu dan Sungai Tubu, Tanjung Selor-Bahau Hulu, Tanjung Selor-Pujungan, Samarinda-Kayan Hilir, Nunukan-Tulin Onsoi, Mansalong-Lumbis Pansangan dan Lumbis Hulu, serta Nunukan Seimenggaris. “Penyalurannya melalui transportasi darat dan air,” ulasnya.

Di perbatasan juga tengah berproses rencana pemba-

ngunan PLBN. Dikatakan Irianto, ada empat PLBN akan dibangun di Kaltara. Yakni, PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Labang yang semuanya berada di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Satu PLBN lainnya, yakni PLBN Long Nawang, dibangun di Malinau, Kaltara. “Saat ini, PLBN Sei Pancang tengah dilakukan pembangunan. Anggaran pembangunannya dari APBN, sekitar Rp33 miliar.”

Sedangkan perihal Toko Indonesia, dijabarkan Gubernur bahwa pembangunannya yang dimulai sejak 2017 sudah rampung 100%, dan menunggu diresmikan. “Ditargetkan minggu kedua Agustus sudah diresmikan,” ucap Gubernur.

Untuk pembangunannya sendiri, pada 2017, dialokasikan APBD Provinsi sebesar Rp5 miliar untuk kegiatan konstruksi struktur toko. Lalu, anggaran sebesar Rp4 miliar dikucurkan pada 2018 untuk melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan.

Terakhir, 2019 dikucurkan dana APBD sebesar Rp6,5 miliar untuk kegiatan penyelesaiannya. “Pemprov Kaltara melalui, Disperindagkop dan UMKM juga menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta di APBD 2020 sebagai modal usaha masyarakat berjualan di Toko Indonesia. Bantuan modal usaha tersebut akan dibagi kepada sejumlah calon pelaku usaha atau pedagang yang kriterianya ditentukan oleh camat setempat,” tutup Irianto. (humas/S1-25)



Gadis Cantik Bernama PPU

Bupati membenahi sengketa lahan. Satu per satu bersama Kejaksaan dan Kepolisian.

JONGGI MANIHURUK
jonggi@mediaindonesia.com

PENAJAM Paser Utara terus bersolek. Setelah daerahnya ditetapkan sebagai wilayah ibu kota negara, Bupati Abdul Gafur Mas'ud sudah jauh-jauh hari bergerak. Salah satunya membenreskan masalah lahan. “Kami sudah membahas persoalan lahan antara pemerintah kabupaten dan instansi terkait. Khususnya untuk lokasi lahan di sisi kiri dan depan kantor bupati,” ujarnya. Penyelesaian sengketa lahan dilakukan untuk mempermudah proses sertifikasi lahan milik Pemkab Penajam Paser Utara. Pemerintah pusat sudah mengamanatkan agar pemkab segera melakukan pembebasan lahan pemerintah yang berstatus sengketa. Pemkab, lanjutnya, akan segera mengambil tindakan tegas untuk penyelesaian lahan sengketa. “Amanat pemerintah pusat menyangkut penyelesaian lahan sengketa seiring pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara.” Menurut Bupati, pemerintah pusat tidak mau masih ada sengketa lahan di lokasi ibu kota negara yang baru, khususnya lahan milik pemerintah kabupaten. Dia juga berharap ada dukungan dari kejaksaan negeri dan kepolisian resor, karena persoalan lahan cukup banyak. Selain di Kecamatan Penajam, persoalan yang sama juga membelit di kecamatan lain. Menjawab keinginan Bupati Abdul Gafur, Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara I Ketut Kasna Dedi mengaku siap mendukung. “Kami siap memberi bantuan hukum kepada pemkab.” Lahan sengketa di sekitar kantor bupati, tuturnya, sudah masuk tahap penyelidikan.



INFRASTRUKTUR JALAN: Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jalan nasional
Perlunya pembenahan infrastruktur jalan di Penajam Paser Utara dilontarkan Sariman, anggota DPRD. Ia menunjuk jalan nasional Trans-Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku-Kecamatan Samboja yang masih buruk. “Pemerintah pusat harus segera melakukan perbaikan jalan di poros ini. Jalan itu sudah lama rusak dan meresahkan warga,” tegasnya. Kerusakan terparah berada di titik Desa Sukaraja, Bukit Raya dan Pemaluan. Banyak lobang besar dan dalam yang bisa menjadi jebakan berbahaya kendaraan yang lewat. Sementara dari sisi pertumbuhan

ekonomi, Bupati Abdul Gafur Mas'ud sudah menyiapkan penataan kawasan industri kecil dan menengah. Pada Juni lalu, ia mengeluarkan keputusan menetapkan sembilan lokasi sentra industri kecil dan menengah. “Penataan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Embrionya sudah ada di lokasi masing-masing,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Alimuddin. Ke-9, lokasi itu ialah sentra industri kelapa dan kerajinannya, sentra kapal rakyat, sentra hasil laut dan sentra batik. Selain itu juga Sentra terasi, sentra tenun, sentra

rotan, sentra kerajinan bambu dan sentra gula aren. “Mulai tahun depan, sebagian senta harus terwujud. Sejumlah dinas dan badan akan berkolaborasi untuk mendukung kegiatan usaha rakyat,” tambah Alimuddin. Pembangunan Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara tinggal menunggu waktu. Bagaimana kue yang lezat, daerah ini mulai menarik pendatang baru untuk masuk. “Dalam satu bulan, rata-rata ada 300-400 warga pendatang yang mengurus surat pindah. Tahun ini ada tambahan 2.500 jiwa,” kata Kepala Dinas Kependudukan, Suyanto. (Ant/N-2)

Bupati Muda Penyayang Desa

USIA Abdul Gofur Mas'ud relatif muda, 32 tahun. Namun, ia sudah dipercaya warga Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai bupati. Predikat bupati milenial pun menempel pada dirinya. Meski muda, jangan ragukan soal perhatiannya terhadap pembangunan desa. Sejak 2019 lalu, ia mengunjungi 54 desa dan kelurahan di wilayahnya. “Untuk melihat langsung pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat,” ungkap Bupati yang dilantik pada September 2018 itu. Perhatian besarnya terhadap pembangunan desa membuat aparat di daerah ini juga bergiat. Hasilnya, nilai indeks desa membangun Penajam Paser Utara terpilih sebagai yang terbaik di Kalimantan Timur. “Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, nilai IDM Penajam Paser Utara berada di peringkat pertama. Pada tahun ini angkanya mencapai 0,758. Nilai itu juga menempatkan daerah kami pada posisi 60 besar di tingkat nasional,” kata Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Penajam Paser Utara, Sulfadli. Indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah status desa mandiri. Sebelumnya hanya satu bertambah menjadi tiga desa mandiri, yakni Desa Girimukti, Babulu Darat, dan Desa Sukaraja. “Status desa maju bertambah menjadi sembilan. Saat ini, dari 30 desa yang ada, status paling rendah ialah desa berkembang,” tambahnya. IDM merupakan produk kementerian desa. IDM digunakan untuk mengukur efesiensi dana anggaran pendapatan belanja desa untuk pembangunan desa. IDM mencakup tiga indeks alat ukur untuk menilai perubahan pembangunan desa yakni, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Data dan potensi desa di daerah ini juga sudah bisa dikumpulkan. “Langkah berikutnya ialah melakukan pengembangan ekonominya,” kata Pendamping Teknis Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri Penajam Paser Utara Syamsu Rais. (RD/Ant/N-3)



Aspeksindo Komit Bangun Kemaritiman dan Wilayah Pesisir



KETUA Umum Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) yang juga menjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menyampaikan sambutannya dalam peringatan hari ulang tahun ketiga Aspeksindo di Jakarta, Senin (10/8). Kegiatan itu juga dihadiri langsung Dewan Pakar Aspeksindo Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Aspeksindo. Selain seremonial ulang tahun, acara tersebut dilanjutkan dengan dengan Aspeksindo Award 2020, Launching Program Aspeksindo Education Scholarship, dan Program One Island One Product. Saat dimintai konfirmasi usai kegiatan tersebut, Abdul Gafur

mengatakan perayaan HUT ketiga Aspeksindo dan rangkaian kegiatannya itu dilakukan dengan sederhana dan sangat terbatas. Pasalnya, acara itu harus mengikuti protokol kesehatan akibat pandemi virus korona atau covid-19 yang masih melanda. Namun begitu, di usia yang ketiga atau tergolong masih muda, lanjut AGM, keberadaan Aspeksindo mampu membantu pemerintah pusat untuk menguatkan kemaritiman dan membangun wilayah pesisir. “Kami yang mengetahui persis wilayah kepulauan dan pesisir bukan hanya dari segi ekonomi yang harus diperhatikan tetapi juga dari segi kesehatan dan pendidikan. Di mana kita mengetahui bersama pendidikan bisa memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Bagaimana kita melihat bangsa kita menjadi besar kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, khususnya untuk masyarakat kita yang ada di

kepulauan dan pesisir,” kata AGM. Ia menambahkan, apa yang telah diprogramkan Aspeksindo benar-benar terwujud khususnya dalam menggali potensi daerah kepulauan dan pesisir beserta peluang investasi yang dapat dioptimalkan dengan baik untuk seluruh daerah yang masuk di dalam keanggotaan Aspeksindo. Karena Aspeksindo sejatinya terbentuk guna menangani permasalahan di daerah kepulauan dan pesisir, yang mana daeah tersebut memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya potensi wisata dan perikanan. “Banyak potensi yang bisa kita kembangkan ke depan agar wilayah kepulauan dan pesisir dapat terangkat dari sisi pembangunan khususnya peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan hari ini kami berharap terbangun

kerja sama dan harmonisasi antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir yang saling menguntungkan dalam rangka mendukung suksesnya jalan pemerintah daerah yang kuat sehingga mampu terwujudnya Indonesia yang besar dan menjadi poros maritim dunia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir yang berkeadilan,” lanjutnya. Selain itu, di hadapan para tamu undangan, Abdul Gafur menyampaikan bahwa Aspeksindo sempat mengunjungi Pulau Malamber di Sulawesi Barat. Kunjungan itu tidak lain ingin melihat kehidupan yang nyata bahwa masih banyak anak-anak di daerah tersebut yang buta huruf. Menurut dia, kondisi itu merupakan pukulan bagi kepala daerah selaku penanggung jawab yang diamanahkan masyarakat. “Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat welcome kepada Aspeksindo.

Insya Allah kami yakin dalam waktu lima tahun ke depan Indonesia dapat mencapai puncak kejayaan yaitu menjadi poros maritim dunia,” ucapnya. **Raih penghargaan** Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meraih penghargaan Aspeksindo Award 2020 sebagai daerah pesisir terbaik dari kategori penguatan daya saing sentra perikanan. Penghargaan yang diberikan Aspeksindo itu bekerja sama dengan KKP. “Penghargaan ini hanya diraih tiga daerah di Indonesia, dan Bangka Tengah salah satunya meraih itu,” kata Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, dengan bangga saat berada di Koba, Selasa (11/8). Ia menjelaskan bahwa penghargaan itu diserahkan dalam acara HUT ke-3 Aspeksindo di Jakarta, Senin. Menurut Saleh, penghargaan Aspeksindo Award

2020 yang diserahkan langsung oleh Menteri Edhy Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kerja nyata yang dilakukan Pemkab Bangka Tengah. Bupati mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan dalam dua tahun terakhir ini. “Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir, mengembangkan industri hilir perikanan dan terus menguatkan daya saing sentra perikanan,” katanya. Saleh menegaskan, pihaknya tidak hanya terus menggali potensi kelautan tetapi juga mengembangkan sektor budi daya ikan air tawar di wilayahnya. “Tentu saja penghargaan yang diraih ini karena upaya bersama, baik pemerintah maupun masyarakat yang terus bergerak untuk kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tandas Saleh. (S2-25)



Tambang untuk kemajuan Indonesia

Beragam produk hasil tambang yang sangat berguna untuk kehidupan manusia menjadi bukti bahwa MIND ID terus berupaya mewujudkan cita-cita mulia dalam membangun peradaban dan menyejahterakan Indonesia.



Berjuang Memulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Reformasi kebijakan ekonomi yang sebelum pandemi digaungkan tetap berlanjut.

M ILHAM AVRISENA
ilham@mediaindonesia.com

PANDEMI covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mampu bertahan melawan dampak negatifnya bagi perekonomian.

Krisis yang bermula pada bidang kesehatan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi krisis ekonomi yang dapat meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi rakyat.

Untuk itu, tidak ada dikotomi antara kesehatan dan ekonomi dalam rangka menuntaskan pandemi covid-19.

Berjuang melawan pelemahan ekonomi sembari melokalisasi penyebaran covid-19 dapat dikatakan menjadi ajang perjuangan baru dalam mengisi kemerdekaan ke-75 RI.

Sejak awal pandemi ini terjadi, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif. Pemerintah merombak serangkaian aturan guna memudahkan penanganan pandemi. Setelah mengeluarkan perppu yang disetujui untuk menjadi UU 2/2020, pemerintah lantas meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran yang disediakan mencapai Rp695,20 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan



ANTARA /NOVA WAHYUDI

PERTUMBUHAN EKONOMI: Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (11/6). Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bergerak positif.

PEN sebesar Rp607,65 triliun yang meliputi jaring pengaman sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, dukungan UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun.

Hari-hari ini pemerintah berupaya untuk mempercepat penyaluran dan realisasi program PEN. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bergerak positif. Salah satu upaya

yang dilakukan pemerintah ialah memperluas target penerima bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Selasa (11/8), menuturkan pemerintah akan memperluas bantuan sosial kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program kartu sembako. Dengan begitu, nantinya jumlah KPM dalam program kartu sembako akan mencapai 29 juta orang.

Pemerintah juga merancang bantuan kepada pekerja berpendapatan Rp5 juta ke bawah

berupa uang sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan selama 4 bulan dengan termin pencairannya per 2 bulan.

Dukungan ini menjadi upaya pemerintah mendorong daya beli dan meratakan bantuan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian nasional di triwulan III dan IV 2020.

Di saat yang sama, pemerintah juga tengah mematangkan dukungan kepada pelaku usaha ultramikro, mikro, dan kecil untuk mendapatkan dukungan agar bisa kembali memulai usahanya.

Pemerintah menargetkan sebanyak 13 juta pelaku usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta tiap orangnya. Uang tersebut merupakan pemberian pemerintah, bukan kredit maupun pinjaman, dan akan diluncurkan pada 17 Agustus nanti.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, belanja pemerintah ialah kunci untuk memulihkan ekonomi nasional dan menghindari masuknya pertumbuhan di zona negatif.

Akselerasi belanja pemerintah pada semester II itu akan beriringan dengan optimalisasi penyerapan program PEN yang pada Senin (10/8) baru terealisasi 21,8%.

Airlangga juga menyebutkan pemerintah akan melibatkan banyak pihak dalam implementasi program tersebut, meliputi perbankan, BUMN, dunia usaha, hingga masyarakat Indonesia melalui program Bangga Buatan Indonesia.

Implementasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, sedianya kebijakan dan stimulus yang diberikan pemerintah dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi terbilang baik. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut dinilai belum efektif.

“Rebound sangat tergantung pada stimulus pemerintah karena kemampuan pemodal dalam negeri terbatas,” ujar Shinta saat dihubungi, Sabtu (8/8).

Meski dukungan pemerintah di tengah pandemi amat krusial, Shinta mengharapkan agar reformasi kebijakan ekonomi yang sebelum pandemi digaungkan tetap berlanjut sebab itu dapat mendorong perbaikan iklim berusaha dan investasi di Tanah Air.

Perbaikan itu diyakini akan membawa hal positif berupa suburnya investasi di Indonesia.

Bila demikian, serapan tenaga kerja akan menjadi lebih besar dan dapat mendorong berkontribusi memulihkan ekonomi nasional.

“Kalau tidak diperbaiki, rebound ekonomi menjadi tidak solid (mudah terganggu faktor eksternal) dan recovery ekonomi akan berlangsung lama (bukan di triwulan III 2020) karena supply capital jauh lebih rendah daripada kebutuhan kapital di sektor riil. Itu akan mengakibatkan lapangan pekerjaan sulit atau lambat diciptakan kembali bagi pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya sepanjang covid-19,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya pada perekonomian sama dengan negara lain, yakni trade off antara kecepatan dan ketepatan.

“Kalau mau cepat, ya ketepatannya kurang dan kalau mau tepat bisa jadi pengimplementasiannya jadi lebih lambat. Jadi pemerintah harus mengukur kira-kira pos mana yang lebih butuh kecepatan mana yang lebih butuh ketepatan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/8).

Secara menyeluruh, kata Teuku, stimulus yang diberikan pemerintah melalui program PEN sejatinya bukan merupakan paket kebijakan yang hanya berlaku dalam waktu singkat. Realisasi ataupun pencairan anggaran dalam program itu tentu didasari pada kebutuhan dalam penanganan pandemi dan dampaknya.

Ia juga sepakat terkait dengan optimalisasi serapan anggaran PEN dilakukan melalui perbaikan proses birokrasi, penyaluran di lapangan, dan perbaikan data. Tujuannya agar stimulus yang diberikan pemerintah bisa berimplikasi pada pemulihan ekonomi seperti yang diharapkan. (E-1)

Anggaran Kemensos Terbesar, Efektif Ungkit Perekonomian



SERAHKAN BANSOS SEMBAKO: Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan bantuan sosial sembako bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jakarta, belum lama ini. Kemensos mengelola anggaran dengan akselerasi namun tidak memberi celah terhadap setiap penyelewengan.

ANGGARAN Kementerian Sosial terus meningkat dalam masa pandemi Covid-19 sejalan dengan keputusan pemerintah memperpanjang stimulan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Seiring dengan itu, Kemensos terus menjaga agar kinerja anggaran berkualitas, cepat dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Pagu Anggaran Kemensos pada TA 2020 awalnya sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penguasaan di bidang program perlindungan sosial sebagai bagian jaring pengaman sosial dampak Covid-19, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran menjadi Rp104,4 triliun, sebelum akhirnya saat ini menjadi Rp124,76 triliun. Sejak pekan ini, anggaran Kemensos kembali mendapat tambahan, sehingga menjadi Rp134,008 triliun.

Dengan anggaran jumbo, Kemensos tetap dapat mengelolanya dengan baik. Per tanggal 13 Agustus 2020, dengan anggaran Rp134,008 triliun, realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp75,583 triliun (56,40%).

“Kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri agar terus meningkatkan

realisasi atau serapan anggaran. Dengan demikian diharapkan dapat membantu menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian, di samping turut membantu masyarakat lebih khusus lagi memasuki kuartal III ini,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara (13/08).

Ia meminta kepada jajarannya untuk mendorong akselerasi dan menjaga realisasi anggaran tetap tinggi. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Mensos Juliari menginstruksikan seluruh jajaran Kemensos bekerja dalam suasana extra-ordinary dan memperhatikan protokol kesehatan.

“Terus bekerja keras, jaga dan dorong akselerasi realisasi anggaran. Namun dalam waktu bersamaan juga harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada para menteri, agar mempercepat realisasi anggaran untuk menopang belanja masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan menggerakkan perekonomian.

Presiden menyebutkan, realisasi anggaran terbesar adalah perlindungan sosial sebesar 39% dan pemberdayaan UMKM sebesar

25% dimana anggaran perlindungan sosial tersebut sebagian besar ada di Kemensos.

Pada Agustus minggu akhir ini, Mensos Juliari minta jajarannya untuk mencairkan Rp17 triliun lebih sebagai penguatan dan sekaligus memberikan kontribusi kepada pergerakan ekonomi.

Perekat Sosial

Ayah dua anak ini menyatakan, memasuki kuartal III, yang menjadi penentu recovery. “Percepatan penyaluran bansos ini, akan mengangkat ekonomi rakyat, karena bansos bisa menopang belanja konsumsi rumah tangga di masa krisis,” katanya.

Terutama pada bansos tunai, dimana dananya langsung diterima oleh keluarga, dan dibelanjakan ke warung-warung terdekat. Dengan BST Rp600 ribu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sementara bansos sembako juga mempunyai multiplier effect memberdayakan masyarakat. Sebab dalam pembuatan sembako bekerja sama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai dipasok atau mitra lokal. “Dalam kondisi pandemi, dimana semua sektor

terpukul, kekuatan fiskal negara menjadi harapan terakhir sebagai pengungkit,” katanya.

Sebagai bukti kerja extra ordinary, Kemensos juga menggendong komunitas dalam penyaluran bansos sembako, selain dengan pemerintah daerah. “Hal ini maksudkan agar menjangkau elemen masyarakat yang belum terjangkau bansos,” ia menambahkan.

Beberapa komunitas yang telah disapa Mensos Juliari adalah pekerja film, sinetron dan seniman. Kemudian juga Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAM-KI), perguruan tinggi, pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan, dan Forum Koordinasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPP), Pemuda Pancasila, dan sebagainya.

Menurut Sekjen Kemensos Hartono Laras, hal ini membuktikan, distribusi bansos juga ungkapan adanya terikatan sesama anak bangsa menghadapi pandemi. Mensos Juliari bersama-sama para tokoh membangun semangat dan optimis kolektif. Jadi bansos menjadi Perekat Sosial Berskala Besar (PSBB),” katanya.

Dengan anggaran yang besar, Kemensos juga menunjukkan kinerja yang baik. Kunci kinerja yang baik adalah pada pengelolaan anggaran cepat dan tidak memberi celah dan menindak dengan tegas setiap penyelewengan.

Pengelolaan anggaran Kemensos didampingi dan diawasi secara berlapis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan tentu melalui APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kemensos yaitu Itjen Kemensos dan sebagainya.

“Dengan kesediaan diawasi ini, kami ingin ada pelibatan publik dan terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. Alhamdulillah, hasil kerja

keras tersebut mendapat apresiasi. Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemensos untuk Laporan Keuangan (LK) Kemensos TA 2019.

Saat menyerahkan LHP LK Kemensos, Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan, Kemensos merupakan cerminan layanan publik dengan nilai anggarannya yang besar. Achsanul juga menyatakan, dengan opini WTP membuktikan Kemensos berkinerja baik.

Di lain pihak, kinerja kami dikonfirmasi oleh lembaga eksternal. Lembaga survei Alvara Research Center, Charta Politica dan juga lembaga survei lainnya juga senada menyatakan bahwa kinerja Kemensos memuaskan dan bansos semakin tepat sasaran, ada kepuasan, dan terus meningkat.

Memasuki Kwartal III tahun 2020, Pemerintah melanjutkan upaya-upaya mengurangi beban masyarakat dengan menyiapkan Bantuan Sosial Beras dan Bantuan Sosial Uang Tunai.

Bansos Beras diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat. Dan Bansos Uang Tunai diharapkan meningkatkan daya beli dan daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian, khususnya pada kuartal ketiga tahun 2020.

Bansos Beras akan disalurkan kepada 10 juta KPM PKH de-

ngan beras seberat 15 kg/bulan/KPM selama tiga bulan. Sementara Bansos Uang Tunai untuk 9 juta peserta Program Sembako (BPNT) non-PKH, dengan uang tunai senilai Rp500 ribu/KPM sekali salur.

Bansos Uang Tunai akan disalurkan melalui Himbara, khususnya bagi KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kantor Pos, selain juga salur langsung. Untuk Bansos Beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog.

Untuk mengatasi masalah data, Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020.

SKB ini di antaranya mengatur sanksi untuk pemerintah kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Dengan adanya sanksi, diharapkan pemerintah kabupaten/kota lebih tertib dan akurat memutakhirkan data. **



FOTO-FOTO: DOK KEMENSOS

BERSAMA TOKOH BAMUS BETAWI: Menteri Sosial Juliari P Batubara hadir di tengah para tokoh Bamus Betawi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Bansos tidak hanya didistribusikan untuk mengatasi dampak Covid-19, namun juga menjadi simbol membangun semangat dan optimisme bersama seluruh elemen bangsa menghadapi krisis.



Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019



Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 Kategori Rating Sosial Cerdas (*Smart Social*), Rating Pengembangan dan Pengelolaan Digital, Rating Kesiapan Pemerintahan Digital (*Digital Government Readiness*) dan Rating Kesehatan Integrasi (*Integration Readiness*).



Penghargaan Natamukti 2019.



Apresiasi Indonesia Awards 2019 Kategori Pemerintah Kota yang Konsisten dalam Pelayanan Publik.



Penganugerahan Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2019.

INDIKATOR kinerja pembangunan daerah memiliki target yang harus dicapai setiap tahunnya. Dengan adanya target pada indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya, setiap daerah (dalam hal ini Kota Tangerang Selatan) diharapkan dapat melaksanakan pembangunan yang semakin efektif dan efisien untuk mencapai target yang menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan.

Beberapa indikator pencapaian kinerja itu antara lain urusan pendidikan. Pada urusan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan mendapatkan alokasi anggaran 2019 sebesar Rp256.753.297.553 dengan realisasi belanja sebesar Rp243.126.402.009 atau 94,69%.

Dari sisi capaian 2019 untuk Harapan Lama Sekolah dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan anak usia dini (PAUD), masing-masing melampaui target yakni 100% dan 131,88%. Kemudian, program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Tercatat, untuk APM SD/MI 2019 mencapai 119,18% dari target program. Kinerja APM 13-15 tahun SMP/MTS dari target 97,20% juga mampu tercapai 109,30%. Program lainnya ialah program pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.

Indikator kinerja kedua yakni urusan kesehatan. Urusan kesehatan di Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Pada 2019, untuk urusan kesehatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp644.933.903.947 dan terealisasi sebesar Rp591.692.403.214 atau 91,74%.

Pencapaian lainnya adalah indikator akreditasi dan re-akreditasi puskesmas, dari target 9 puskesmas dapat terealisasi sesuai target sebesar 88,98%. Indikator persentase akreditasi unit Labkesda, sampai 2019 dari target 50% telah terealisasi sesuai target atau terpenuhi. Indikator

persentase ketersediaan reagen dan BMHP laboratorium di puskesmas dan labkesda, dari target 95% juga terealisasi sesuai target. Kemudian untuk jumlah bangunan posyandu yang dibangun, pada 2019 sebanyak 113 posyandu dapat terealisasi dari target 125 posyandu. Adapun untuk jumlah puskesmas yang dibangun pada 2019 mencapai 31 puskesmas dari target 33 puskesmas.

Indikator kinerja pembangunan daerah ketiga yakni urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, serta Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Pada 2019, mendapat alokasi anggaran Rp702.897.840.696 dan terealisasi Rp657.275.929.538 atau 93,51%.

Selanjutnya, indikator pembangunan keempat yakni urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pada 2019 mendapat anggaran Rp114.086.184.630 dan terealisasi sebesar Rp107.469.732.569 atau 94,20%.

Indikator pembangunan kelima yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Kamtibmas) dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, dan Satpol PP. Pada 2019 mendapatkan anggaran Rp24.844.164.336 dan terealisasi Rp24.296.864.790 atau 97,80%.

Sosial dan Ketenagakerjaan

Indikator pembangunan keenam yakni urusan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Tangerang Selatan dan Sekda Tangerang Selatan. Pada 2019, mendapatkan alokasi anggaran Rp2.673.400.000 dengan realisasi sebesar Rp2.607.793.770 atau sebesar 97,55%.

Indikator pembangunan ketujuh yakni, urusan ketenagakerjaan. Untuk tahun anggaran 2019, mendapatkan alokasi anggaran Rp3.835.607.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.756.473.000 atau 97,94%.

Indikator pembangunan kedelapan yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada 2019 mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp5.263.588.500 dan terealisasi Rp5.159.424.328 atau 98,02%.

Indikator pembangunan kesembilan yakni urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada 2019, mendapatkan alokasi anggaran Rp6.087.611.700 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.889.318.534 atau 96,74%.

Indikator pembangunan kesepuluh yakni urusan pangan. Pada tahun anggaran 2019, Tangerang Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.586.667.000 dan terealisasi sebesar Rp1.501.684.200 atau 94,64%.

Indikator pembangunan kesebelas yakni urusan pertanahan. Pada tahun anggaran 2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp215.352.824.667 dan dapat terealisasi sebesar Rp200.287.035.576 atau 93,00%. Selanjutnya, indikator pembangunan duabelas yakni urusan lingkungan hidup. Pada 2019, mendapatkan alokasi anggaran Rp104.443.484.138 dan dapat direalisasikan sebesar Rp96.297.868.294 atau 92,20%.

Indikator pembangunan ketigabelas yakni terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun anggaran 2019, mendapat alokasi anggaran Rp5.465.885.000 dan terealisasi Rp5.215.464.266 atau 95,42%.

Indikator pembangunan keempat belas yakni urusan administrasi kependudukan dan keluarga berencana (KB). Pada 2019 mendapat anggaran Rp4.511.072.500 dan terealisasi sebesar Rp4.333.922.400 atau 96,07%.

Indikator pembangunan keenambelas yakni urusan perhubungan yang pada 2019 mendapatkan alokasi anggaran Rp10.238.837.000 dan terealisasi sebesar Rp10.058.892.506 atau 98,24%.

Adapun indikator pembangunan keenambelas yakni urusan komunikasi dan informatika pada 2019 mendapatkan alokasi anggaran Rp47.295.302.800 dengan realisasi sebesar Rp44.920.164.191 atau 95,41%.

Penanaman modal

Untuk urusan lainnya, seperti Koperasi dan UKM pada 2019 menda-

pat alokasi anggaran Rp5.888.983.591 dan terealisasi Rp5.537.981.919 atau 94,04%. Urusan penanaman modal daerah pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp5.619.750.000 dan terealisasi Rp5.465.333.375 atau 97,25%.

Urusan kepemudaan dan olah raga, pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp10.134.695.626 dan terealisasi Rp9.797.159.106 atau 96,67%. Urusan Statistik pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp2.286.747.700 dan terealisasi Rp2.068.002.500 atau 90,43%.

Selanjutnya, urusan persandian pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp710.276.000 dan terealisasi Rp547.430.000 atau 77,07%. Urusan kebudayaan pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp2.550.000.000 dan dapat direalisasikan Rp2.414.190.200 atau 94,67%.

Kemudian, urusan perpustakaan pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp1.682.182.000 dengan realisasi Rp1.609.797.600 atau 89,64%. Urusan kearsipan pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp694.395.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp654.312.800 atau 94,23%. Urusan kelautan dan perikanan pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp982.857.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp928.174.190 atau 94,44%.

Selanjutnya, untuk urusan pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp7.580.838.077 dan terealisasi Rp7.044.261.484 atau 92,92%. Untuk urusan pertanian pada 2019 mendapatkan alokasi anggaran Rp1.641.951.496 dan terealisasi Rp1.448.573.050 atau sekitar 88,22%.

Kemudian, urusan perdagangan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, serta Dinas Pembangunan dan Penataan Ruang pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp7.183.065.900 dan dapat terealisasi Rp6.761.753.105 atau 94,13%.

Terakhir, urusan perindustrian pada 2019 mendapat alokasi anggaran Rp862.596.400 dan terealisasi Rp840.543.900 atau 97,44%. (Gan/ S3-25)



Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya Tahun 2019.



Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Banten atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019 yang kedelapan kali berturut-turut.



Tangsel Raih Juara Umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Banten Ke-XVI.



Penghargaan Top Digital Awards 2019.

Tangerang Selatan

Luas wilayah :
16.485,47
hektare

Populasi (2019) :
1.696.308
orang

Kepadatan :
11.524
orang/km2

Pendapatan dan Belanja Daerah (2019)

	Pendapatan	Belanja
■ Dianggarkan	Rp3,46 triliun	Rp3,9 triliun
■ Realisasi	Rp3,44 triliun	Rp3,63 triliun

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	79,38	80,11	80,84	81,17	81,84

Gambaran Perekonomian Daerah

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Laju pertumbuhan ekonomi	7,25	6,85	7,39	7,37	7,37
Inflasi	3,24	3,61	3,26	3,45	3,17

Prioritas Pembangunan Daerah (2019)

Pendidikan

■ Anggaran: **Rp256,75 miliar**

■ Realisasi: **Rp243,12 miliar**

	Realisasi (%)
■ Harapan Lama Sekolah	100
■ APM PAUD	131,88
■ APM SD/MI	119,18
■ APM SMP/MTS	109,30 (target: 97,20)

Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi
■ Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas (%)	88,98	88,98
■ Akreditasi unit Labkesda (%)	50	50
■ Ketersediaan reagen dan BMHP laboratorium di puskesmas dan labkesda (%)	95	95
■ Jumlah pembangunan posyandu (unit)	113	125
■ Jumlah pembangunan puskesmas (unit)	33	31

PUPR, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
■ Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan	88	97
■ Pembangunan pedestrian jalan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya ari lainnya.	Terealisasi sesuai target	
■ Ketersediaan informasi rencana rinci tata ruang	91	91
■ Layanan masyarakat dalam pengurusan peruntukan lahan	100	100

Sosial

■ Capaian kinerja: **tercapai sesuai target**

■ Rumah tangga/individu sasaran yang mendapatkan bantuan dan jaminan sosial.

■ Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Ketenagakerjaan

■ Capaian kinerja:

■ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): **67%**

■ Angka perselisihan industrial: **100%**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

■ Capaian kinerja:

■ Penanganan pengaduan oleh petugas terkait perempuan dan anak korban kekerasan: **100%**

■ IPG: **93,16%**

■ Jumlah kelurahan ramah anak: **87,5%**

Pangan

■ Capaian kinerja:

■ Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan: **95%**

■ AKG dan AKP: **94%**

Pertanian

■ Capaian kinerja:

■ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: **sesuai target**

■ Monitoring dan evaluasi tahapan pengadaan tanah: **sesuai target**

Lingkungan Hidup

■ Capaian kinerja:

■ Penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan: **100%**

■ Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan: **100% (target 90%)**

■ Pengangkutan sampah: **60% (target 71,2%)**

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

■ Capaian kinerja:

■ Penerbitan KK: **124% (target 90,52%)**

■ Penerbitan KTP elektronik: **89,07% (target 89,08)**

■ Penerbitan kutipan akta perkawinan: **72,06% (target 65,44%)**

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

■ Capaian kinerja:

■ Unmet Need: **100% (target 6,3%)**

■ Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang ber-KB: **100% (target 90,84%)**

■ Produk unggulan UPPKS: **100% (target 70,59%)**

Perhubungan

■ Capaian kinerja:

■ Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas: **100%**

■ Jumlah sarana prasarana lalu lintas: **71,92% (target 63%)**

■ Jumlah sarana prasarana transportasi massal: **100%**

Komunikasi dan Informatika

■ Capaian kinerja:

■ Penerapan keterbukaan sistem informasi publik: **100%**

■ Penyebaran informasi: **18,20% (target 20%)**

Koperasi dan UKM

■ Capaian kinerja:

■ Peningkatan jumlah SDM Koperasi yang dibina: **1.695 orang (target 1.790 orang)**

■ Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang/pembantu/kantor kas KSP: **221 koperasi (target 230 koperasi)**

■ Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM: **376 produk (target 275 produk)**

■ Pembinaan wirausaha UMKM dan calon wirausaha UMKM: **1.408 SDM UKM (target 1.390 SDM UMKM)**

■ Peningkatan akses pembiayaan UMKM: **434 UMKM (target 306 UMKM)**

Penanaman Modal Daerah

■ Capaian kinerja:

■ Jumlah investasi PMA & PMDN: **435 PMA dan 370 PMDN (target 47 PMA, 16 PMDN)**

■ Penerapan pelayanan dan perijinan satu pintu dan satu atap: **121 jenis ijin (target 50 jenis)**

Kepemudaan dan Olah Raga

■ Capaian kinerja:

■ Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga: **18 (target 15)**

■ Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga: **100%**

Kelautan dan Perikanan

■ Capaian kinerja:

■ Nilai tukar pembudi daya/pelaku usaha perikanan: **123,88% (target 101,75%)**

Pariwisata

■ Capaian kinerja:

■ Jumlah kunjungan wisatawan: **511% (target 100%)**

■ Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif: **250% (target 100%)**

Pertanian

■ Capaian kinerja:

■ Program pengembangan pertanian: **100%**

Perdagangan

■ Capaian kinerja:

■ Program peningkatan dan pengembangan ekspor: **60 produk (target 2 produk)**

■ Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola: **100%**

■ Jumlah rapat koordinasi TPID dan pendataan/pencacahan IHK: **100%**

Perindustrian

■ Capaian kinerja:

■ Program pengembangan industri: **100%**

Sumber: ILPPD Tangsel

Cinta bagi Warga Kepulauan



KUNJUNGI MASYARAKAT PULAU TERLUAR: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kedua kiri) mengunjungi warga yang bermukim di pulau terluar di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulsel, Minggu (2/8). Dalam kunjungannya, Nurdin Abdullah membagikan sembako dan masker kepada warga terdampak covid-19 serta penanaman bibit pohon sukun.

Nurdin Abdullah tidak melupakan warga di pulau terluar. Ia menyiapkan fasilitas untuk warga bisa hidup lebih baik.

LINA HERLINA
lina@mediaindonesia.com

DI Kabupaten Bantaeng, selama dua periode memimpin, Prof Nurdin Abdullah telah menyulap lahan gersang jadi hijau. Beragam pohon buah-buahan ditanam, mulai durian, apel, stroberi, hingga mangga. Rakyat terus diajak menanam. Kini, saat memimpin Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin juga terus mengajak warganya untuk menanam. Di tengah pandemi, awal Agustus

lalu, ia mengunjungi warga di dua pulau terluar, yakni Pulau Langkai dan Pulau Lanjukan, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar. Selain bantuan sembako dan masker, sang gubernur juga membawa bibit pohon sukun. Pohon sukun telah menjadi solusi terbaik untuk menghambat abrasi pantai. Tanaman pangan dengan gizi tinggi ini juga mampu menyimpan air dalam volume besar. Warga di pulau terluar itu menyambut gembira kedatangan sang pemimpin. Keluh kesah pun tertumpah. Sang Guru Besar pertanian pun sabar mendengar. Menjawab keluhan warga, Nurdin mengaku tengah menyiapkan sejumlah fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan masyarakat di pulau-pulau terluar yang ada di Sulsel. “Kami sedang menyiapkan fasilitas air bersih yang bisa langsung diminum warga pulau tanpa perlu lagi dimasak. Selain itu, listrik dan juga jaringan

telepon sedang kami bicarakan bersama PLN dan Telkom. Insya Allah dalam waktu tidak lama, warga di sini sudah bisa menikmati semua fasilitas layanan dasar ini,” janjinya. Doktor lulusan Universitas Kyushu, Jepang, itu juga mengaku sedang merancang fasilitas dermaga serta angkutan umum, di antaranya kapal roro yang berfungsi menghubungkan pulau-pulau. **Kapal fiber** Kemiskinan yang selalu identik dengan warga yang tinggal di pulau-pulau tidak membuat Gubernur Nurdin bisa tenang. Karena itu, ia menggandeng PT Industri Perkapalan Indonesia untuk kerja bersama menuntaskan kemiskinan di wilayah kepulauan. Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar, itu, menggagas bantuan kapal fiber sebanyak 20 unit untuk warga

kepulauan. Setiap kapal memiliki volume 17 gross ton. Ajakan itu dilontarkan Nurdin kepada Direktur Utama PT Industri Perkapalan Indonesia, Diana Rosa. “Saya tantang Dirut PT IKI yang baru. Saya bilang kita ini negara kepulauan, tapi kemiskinan masih ada di pulau di pesisir,” ungkap Nurdin. Kapal dibutuhkan warga kepulauan. Pasalnya, potensi ikan di daerah ini sangat tinggi dan bernilai ekonomi. Namun, para nelayan masih terkendala penguasaan teknologi penangkapan. Armada penangkapan juga masih standar. Selain untuk nelayan, kapal buatan PT Industri Perkapalan Indonesia juga bisa dimanfaatkan untuk mempermudah konektivitas antarpulau. “Kita ingin penangkapan ikan dengan ramah lingkungan. Kita juga akan bangun *longline* untuk penangkapan ikan,” tandas Nurdin. (N-2)

Terdampak, tapi Tetap Tumbuh

DI tengah gempuran pandemi, Nurdin Abdullah ialah salah satu gubernur yang tetap optimistis menghadapinya. Salah satu alasannya, ekonomi Sulawesi Selatan tetap tumbuh baik. “Pertumbuhan selama triwulan pertama 2020 sangat positif. Daya beli masyarakat dan perdagangan memang turun, tapi pertanian Sulsel justru tumbuh hingga 24%. Itu membuat ekspor kita juga naik,” tuturnya. Sejak Maret-Juni, di Sulawesi Selatan, pandemi mengalami puncaknya. Pembatasan sosial berskala besar dilakukan sehingga kegiatan ekonomi sangat terbatas. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengamini pernyataan sang gubernur. Kepala BPS Sulawesi Selatan Yos Rusdiansyah menyatakan Sulsel terus mengekspor di tengah wabah. Pada Juni, terjadi peningkatan 1,66% ketimbang bulan sebelumnya. Nilainya meningkat dari US\$91,63

juta menjadi US\$93,15 juta. Komoditas utama yang diekspor ialah nikel, garam, belerang, kapur, biji-bijian berminyak dan tanaman obat, ikan, udang, lak getah, dan damar. “Sebagian besar ekspor dikirim ke Jepang, Tiongkok, Filipina, Amerika Serikat, dan Taiwan,” tambah Yos. Gubernur Nurdin tidak menampik adanya kontraksi ekonomi di masa pandemi. “Wajar. Dari 34 provinsi, 32 daerah pertumbuhan ekonominya negatif.” Pertumbuhan ekonomi provinsi ini terkoreksi karena yang berkontribusi besar ialah bidang perdagangan dan konstruksi. Meski mengalami koreksi, proyeksi ekonomi Sulsel bakal tumbuh di angka 4%. “Saya optimistis akselerasi perekonomian di daerah ini lebih menggeliat pada kuartal III 2020. Sektor yang akan mendorong pertumbuhan ialah pertanian, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan,” tandasnya. (LN/N-2)



EKSPOR DI TENGAH WABAH: Kapal peti kemas melintas di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/3). BPS Sulawesi Selatan menyatakan Sulsel terus mengekspor di tengah wabah covid-19.

Sulsel Kunci Kemajuan di Indonesia Timur

langsung berhadapan dengan laut, yang memudahkan secara langsung kegiatan ekspor “Saya kira, ini amat penting sekali karena jika Sulsel maju, Indonesia timur juga maju. Sulsel ini jadi kunci pembangunan di timur,” lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode itu. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini, Presiden Joko Widodo, karena berkat Presiden Jokowi kini Sulsel sudah jauh lebih maju. Misalnya, saat ini sudah bisa direct call dengan keberadaan Makassar New Port di Sulsel. Dengan keberadaan new port yang baru itu, bisa terintegrasi dengan kawasan industri. “Dengan kondisi itu, mobilitas baik barang modal dan ekspor jadi satu kesatuan. Tidak perlu lagi keluar dan lewat Surabaya,” sebut Nurdin. Termasuk pula, dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Menurut Nurdin, hal itu tak hanya membuat bangunannya jadi istimewa, tetapi juga pemerintah pusat menjadikannya bandara tersebut sebagai bandara internasional yang membuka jalur penerbangan langsung keluar negeri, seperti Jepang dan negara-negara Eropa, serta berbagai negara Asia lainnya. “Sehingga kami yang di kawasan Timur ini, tidak perlu harus ke Bali atau ke Jakarta kalau mau ke luar negeri. Kita mau bandara kita, bisa mengurangi beban penumpang pesawat di bandara Jakarta atau Bali, dan terutama untuk

rute-rute penerbangan internasional,” sebut Guru Besar Universitas Hasanuddin ini. **Mimpi Gubernur untuk Sulsel dan Indonesia** Indonesia merupakan negara agraris serta negara kepulauan. Karena itu, Nurdin Abdullah menekankan dengan kondisi tersebut, Sulsel memiliki kontribusi yang ingin dicapai serta betul-betul fokus pada keunggulan daerah. “Mimpi saya sekarang ini 330 pulau di Sulsel harus menikmati fasilitas pembangunan seperti air bersih, listrik, transportasi yang aman dan nyaman, dan konektivitas antarpulau yang bisa terbangun. Yang lebih penting, mimpi saya bagaimana masyarakat pulau bisa sejahtera dari sumber daya laut yang ada,” kata Nurdin. Untuk itu, kata Nurdin, hal tersebut harus didukung dengan teknologi. Pasalnya, banyak hal yang bisa dilakukan Sulsel apabila infrastruktur pendukung dimiliki. Hal itu antara lain bisa dimulai dengan membangun dermaga penyeberangan yang memadai serta tentunya memiliki akses yang harus bagus. “Potensi di pulau-pulau itu sangat luar biasa, sangat potensial. Mimpi saya pada 2021 atau tahun depan, kami sudah bisa masuk untuk menghapus keterbatasan yang ada, perbaikan alat tangkap dan armada tangkap yang memadai, dan kapal-kapal besar bisa sandar di dermaga-dermaga kami. Terkait itu, sudah saya bahas dengan kepala balai

dan industri kapal Indonesia,” sebut Nurdin. Selain itu, terang Nurdin, pihaknya juga bakal mendorong masyarakat di pulau-pulau memiliki keahlian dan keterampilan tersendiri agar hasil tangkap mereka di sana tidak semua dibawa ke kota, melainkan bisa juga diolah dengan teknologi yang baik. **Negara agraris** Saat ini, diakui Nurdin, masa pandemi covid-19, memang berdampak pada resesi ekonomi dunia. Meski begitu, Nurdin berharap bangsa Indonesia tidak terlahap merasakannya, karena negara Indonesia merupakan negara agraris. “Mungkin kita bisa menunda untuk membeli mobil, membeli motor, serta peralatan elektronik, tapi tidak ada satu pun yang bisa menunda makan. Makanya, kita fokus pada sektor pertanian,” seru Nurdin. “Nah Indonesia akan muncul sebagai salah satu penyangga pangan dunia, termasuk Sulsel. Karena itu, apabila kondisi pandemi sekarang, belum juga ditemukan adanya vaksin, ya kita harus menjaga diri dengan betul-betul dalam menerapkan protokol kesehatan. Apabila krisis pangan, apa yang bisa dihindari coba? Orang lapar itu tidak bisa ditahan,” sambung Nurdin. Karenanya, dia sangat yakin Indonesia tidak terlalu terdampak resesi dunia, lantaran negara Indonesia bukan negara industri besar. “Kita ini kan negara agraris, sejengkal lahan pun harus bisa dimanfaatkan,” tutupnya. (LN/S3-25)



HARI Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi provinsi Sulawesi Selatan untuk menegaskan kembali sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia. “Kami berharap Sulsel ini menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di timur. Dan salah satu kuncinya adalah, kita harus bersama mendorong pembangunan infrastruktur,” ungkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Ia menjabarkan sebanyak 24 kabupaten/kota di Sulsel memiliki kegiatan ekonomi yang sangat potensial. Terlebih, Sulsel juga sebagai daerah

penyangga nasional. “Untuk itu, harapannya, kami sebagai pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, supaya daya saing kita terus naik, maka pemerintah pusat bisa mendukung dalam rangka mendorong infrastruktur terutama jalan. Kami sangat mendambakan pembangunan tol di kabupaten/kota,” ungkap Nurdin. Tidak hanya itu, Sulsel juga mendorong kawasan ekonomi baru di bagian wilayah selatan seperti kawasan industri Takalar dan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). KIBA misalnya merupakan kawasan strategis karena menjadi satu-satunya kawasan industri yang perbatasannya



Kerja Bersama Pulihkan Paru-Paru Dunia

Revolusi Hijau berarti gerakan menanam besar-besaran. Jadi kawalan Gubernur Sahbirin Noor sejak mulai menjabat.

DENNY SUSANTO
denny_susanto@mediaindonesia.com

ANCAMAN itu nyata. Bukan sekadar catatan di atas kertas bila banyak pihak mengumandangkan bahwa hutan di Kalimantan semakin menyusut. Dikenal sejak *baheula* sebagai paru-paru dunia, Kalimantan memiliki hutan hujan tropis seluas 40,8 juta hektare. Terpelihara? tidak. Faktanya, luas hutan di Borneo terus menyusut akibat deforestasi. Kementerian Kehutanan mencatat angka deforestasi pada kurun 2000-2005 mencapai 1,23 juta hektare. Greenpeace punya coretan yang lebih tragis lagi. Sampai 2010 lalu, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta hektare. Kalimantan Selatan, salah satu provinsi yang mengalami laju deforestasi cukup kencang. Sepanjang 2000-2009, pembabatan untuk berbagai alasan menghilangkan areal hutan seluas 319.835 hektare. Meski tidak sehebat periode lalu, deforestasi masih terus terjadi. “Perlu

komitmen bersama baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memulihkan kerusakan kawasan hutan dan degradasi lingkungan,” tutur Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Karena itu, dia mengulirkan program besar, Revolusi Hijau. Kerusakan hutan tidak bisa diselesaikan dengan program biasa, harus program revolusioner. Program ini menjadi salah satu terobosan pembangunan berbasis kehutanan. Selama beberapa tahun, program itu dikawal ketat dan berlangsung secara berkesinambungan. Revolusi Hijau adalah gerakan menanam. Pohon besar ditanam di kawasan yang sudah kritis. Kementerian LHK menilai gerakan ini telah menjadi solusi untuk menekan laju deforestasi.

Sejahteraan warga
Revolusi Hijau adalah gerakan penanaman pohon besar-besaran. Ia telah menjadi salah satu capaian utama keberhasilan pembangunan bidang kehutanan di provinsi

berjuluk Bumi Lambung Mangkurat itu. Kementerian LHK telah menjadikan program penghijauan ini sebagai proyek percontohan program pelestarian lingkungan secara nasional. Gerakan ini juga selalu dibawa dalam hubungan dengan dunia internasional. “Program ini mendapat apresiasi banyak pihak. Termasuk dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikannya dalam rapat koordinasi nasional kebakaran hutan dan lahan tahun lalu,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Hj Fatimahtuzzahra. Revolusi Hijau merupakan program yang dideklarasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan hidup. Upaya dilakukan melalui kegiatan penanaman dengan menggunakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan menyejahterakan



MI/DENNY SUSANTO

masyarakat secara berkelanjutan. “Tidak hanya sekadar menanam. Yang tidak kalah penting dari program Revolusi hijau ialah pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan,” tegas Gubernur Sahbirin Noor. Tujuan lain dari pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini ialah mengembalikan Kalsel sebagai salah satu paru-paru dunia. Sejalan dengan itu pula Pemprov Kalsel berupaya menerapkan pembangunan berbasis kehutanan yang disebut *forest city*. Konsep Gerakan Revolusi Hijau adalah membuat hutan dan potensi di dalamnya dapat menyejahterakan masyarakat, dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. “Gerakan ini juga berkaitan dengan mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup,” tambah Sahbirin.

Gerakan Revolusi Hijau menjadi komitmen utama Sahbirin sejak menjadi gubernur pada 2015. Ia sudah geregetan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kawalan ketat, sambutan dari masyarakat, membuat Revolusi Hijau memiliki catatan apik. Dinas Kehutanan mengklaim telah berhasil memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Dari posisi 29 pada 2015 naik menjadi posisi 19 dari 34 provinsi di Indonesia tahun ini. Bukti lain diperlihatkan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalsel. Jika pada 2016 luas lahan kritis mencapai 640.708 hektare, dua tahun kemudian bisa dikurur menjadi 511.594 hektare. Namun, catatan itu tidak boleh membuat Kalsel bertenang diri. Kawasan hutan yang kategorinya sangat kritis mencapai luasan 132.468 hektare dan kategori kritis seluas 379.126 hektare.

GERAKAN REVOLUSI HIJAU: Warga dari berbagai komunitas menanam mangrove dan pohon di daerah aliran sungai di Barito, Kalimantan Selatan, Kamis (19/3). Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menggencarkan gerakan Revolusi Hijau dengan melakukan penanaman pohon di 13 kabupaten/kota dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan menjadikan wilayah Kalsel sebagai paru-paru dunia.

Dukungan masyarakat
Sebelum disentuh dengan Gerakan Revolusi Hijau, program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalsel kurang maksimal. Pada periode 2012-2015, kegiatan rehabilitasi hanya menyentuh lahan seluas 8.700 hektare. Bandingkan dengan penanaman empat tahun terakhir, 2016-2020. Kalsel telah berhasil menghijaukan kembali lahan kritis dan lahan hutan seluas 86.000 hektare. Bukan sekadar proyek, tapi telah menjadi gerakan. Penanaman tidak dilakukan Sahbirin dan anak buahnya saja, tapi secara sukarela juga melibatkan semua elemen masyarakat, swasta, pemerintah, dan TNI-Polri. Dari 2016-2018, areal yang

dihijaukan terus meluas. Dari 5.559 hektare pada 2016 menjadi 16.188 hektare pada 2017 dan di 2018 seluas 29.591 hektare. Tahun lalu ada penanaman di lahan seluas 29.007 hektare dan tahun ini 7.697 hektare. Penanaman dilakukan di 13 kabupaten/kota, meliputi 183 daerah aliran sungai. Program Revolusi Hijau didukung Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito, yang menyediakan 2,5 juta bibit pohon per tahun. “Kami memiliki tiga lokasi persemiaan permanen. Kapasitas produksinya mencapai 2,5 juta bibit per tahun dan dibagikan ke masyarakat,” kata Ketua BPDASHL Barito, Zainal Arifin. (N-2)



IPM Kalsel Meningkatkan di Bawah Kepemimpinan Paman Birin

EMPAT tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan berhasil mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus meningkat dan mencapai angka 70,72, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) membaik dengan nilai 62,06. Karena itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengutarakan pada 2021 tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalsel mengangkat tema ‘Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi sebagai Gerbang Ibu Kota Negara’. Dirinya berharap pembangunan di wilayah ‘Banua’ –sebutan Kalsel– lebih berkembang, “Mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti pembangunan di Banua kita lebih berkembang dan lebih maju lagi,” kata dia, belum lama ini. Keberhasilan meningkatkan IPM tak lepas pula dari keberhasilan Pemprov Kalsel dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran pada 2019 sudah berada diangka 4,31%. Berdasarkan data statistik

tingkat pengangguran terbuka Kalsel pada 2018 tercatat sebesar 4,50%. Bila dibandingkan tingkat pengangguran 2019, berkurang sebanyak 19%. Pencapaian signifikan juga tampak pada angka kemiskinan di Banua yang terus menurun. Pada 2018, tingkat kemiskinan sebanyak 4,54%, dan 2019 mengalami penurunan menjadi 4,47%. “Angka kemiskinan di daerah kita, jauh berada di bawah rata-rata nasional,” kata pria yang akrab disapa Paman Birin. Pencapaian tersebut tak akan terwujud, menurut dia, tanpa sinergi dan kebersamaan dari seluruh stake holder maupun DPRD Kalsel. “Pencapaian yang telah diraih pada tahun anggaran 2019 berkat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan semua pihak, khususnya dengan DPRD Kalimantan Selatan. Kita meraih beberapa keberhasilan dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar dia. **Kesejahteraan meningkat** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Provinsi Kalsel berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat pada beberapa bidang pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan

rakyat yang berdasarkan data statistik di atas rata rata nasional. Anggota VI BPK, Harry Azhar Aziz menyatakan selama 2019, ada empat indikator kesejahteraan yang meningkat di Kalsel. Yaitu, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan pengendalian inflasi. “Berdasarkan data BPS tahun 2019 beberapa indikator kesejahteraan meningkat di antaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68%. Ini menunjukkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9%,” katanya Harry pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan secara virtual, Kamis (18/6). Menurut Harry, tingkat pengangguran terbuka 2019 di Kalsel sebesar 4,31% jauh lebih baik di rata rata nasional 5,28%. Tingkat kemiskinan pada 2019 di angka 4,55%, jauh lebih baik dari rata-rata nasional 9,22%, angka gini ratio 0,334 lebih baik di banding nasional 0,380. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,72, masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92. Sedangkan inflasi di Kalsel pada April 2020 mencapai 1,49%

jauh lebih baik dibanding nasional 2,60%. Kondisi tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. “Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya. Terkait raihan opini WTP 2019, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut sejak 2012. Harry Azhar Aziz mengaku bersyukur karena telah merampungkan pemeriksaan selama dua bulan dalam kondisi pandemi dan dapat diserahkan hasilnya kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel. Perolehan opini WTP, berdasarkan penilaian profesional tim auditor, antara lain penyajian/penyusunan LKPD Kalsel berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis Akruar. “Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Harry. Gubernur mengaku



Sahbirin Noor
Gubernur Kalimantan Selatan

bersyukur atas perolehan WTP juga mengajak jajarannya agar mempertahankan opini tersebut. Orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu bertekad memperbaiki kinerja jajarannya serta akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap LKPD 2019. **Bantu untuk UMKM** Untuk mendukung pembangunan perekonomian, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran SKPD agar membantu sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu agar sektor perekonomian Kalsel segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. “Kita harus bangkit, kita bantu perusahaan, serta UMKM agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan, kita dorong para pemilik modal untuk berinvestasi di Kalsel, sehingga perekonomian di daerah kita bisa tumbuh dan

kembali stabil,” serunya. Sejak pandemi covid-19 melanda lima bulan terakhir, sektor perekonomian ‘Banua’ terpuruk. BPS Kalsel mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau minus 2,61% dibandingkan dengan triwulan II-2019 (yoy). Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, terpuruknya perekonomian Kalsel pada triwulan II-2020 dipengaruhi oleh covid-19 yang mewabah di dunia. “Belum teratasinya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian secara global, bukan hanya Kalsel,” katanya melalui *channel Youtube* BPS Kalsel. Di sisi lain, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Pemprov Kalsel, Awang Pramila menyatakan, dari data mereka sejak 10 tahun terakhir baru tahun ini pertumbuhan ekonomi Kasel terjadi kontraksi atau

tumbuh negatif. Dia memprediksi, jika pandemi masih berlangsung lama maka kontraksi kemungkinan akan tetap terjadi pada kuartal selanjutnya. “Kecuali permintaan komoditas unggulan Kalsel ke negara tujuan ekspor kembali normal, mungkin ekonomi Kalsel masih bisa tumbuh,” katanya. Menurutny, secara umum pemerintah dan masyarakat telah berupaya untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Selama itu tidak dipatuhi maka penyebaran akan meluas, sehingga anggaran yang pada awalnya untuk menggerakkan ekonomi menjadi tertunda karena fokus untuk mencegah maupun membiayai kesehatan masyarakat,” ujarnya. (Gan/S1-25)



Peradaban Butuh Jalan Perubahan

Survei NRC merekomendasikan lima jalan untuk menciptakan peradaban Indonesia ke arah yang lebih baik.

ADE ALAWI
alawi@mediaindonesia.com

USIA 75 tahun bagi ukuran manusia ialah usia lanjut saat orang akan memasuki periode akhir kehidupan. Kepribadian seseorang pada usia itu akan semakin matang atau justru kekanak-kanakan karena mengalami kepikunan.

Namun, bagi Indonesia setelah memasuki usia 75 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang, peradaban yang dimilikinya bukanlah semakin matang, melainkan hanya pada tingkat biasa-biasa saja, bahkan cenderung rapuh.

Setidaknya, hal itu terungkap dari hasil survei daring News Research Center (NRC) Media Group News yang bertema *Refleksi 75 tahun peradaban Indonesia*. Survei menggunakan *web* atau *online* dengan target *multiplatform user* Media Group News. Mereka adalah para pembaca *Media Indonesia*, *Metrotvnews.com*, *Medcom.Id*, dan *Lampung Post*. Selain itu, untuk memperluas jangkauan, NRC juga menggunakan jaringan koresponden/kontributor Media Group News dan media sosial lainnya.

Survei yang dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*. Survei dilakukan pada 24 Juli-6 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 553 orang.

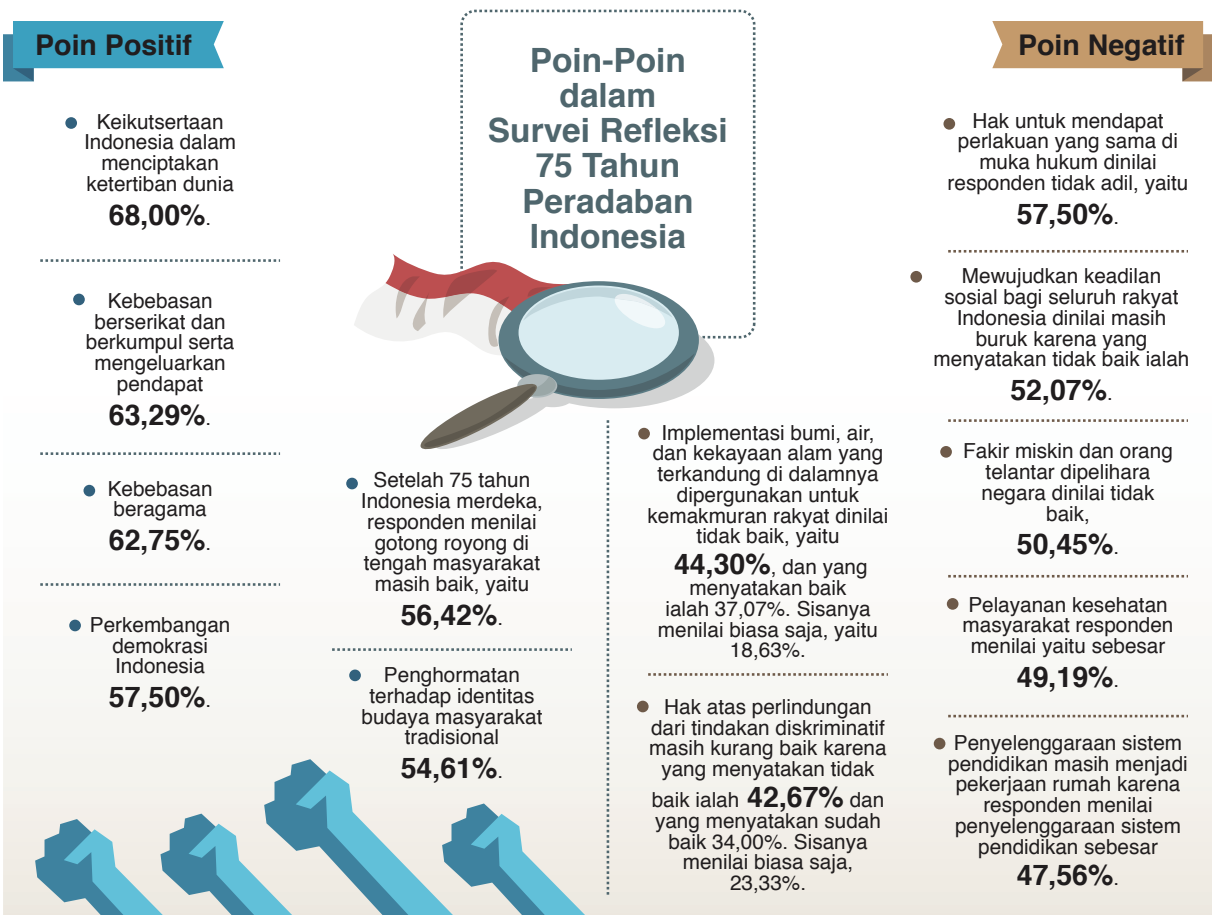
Kepala Penelitian dan Pengembangan *Media Indonesia* Irwansyah mengatakan survei NRC ingin membangun kajian tentang kemajuan peradaban Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan selama 75 tahun. “Peradaban tinggi bisa menjaga keagungan manusianya, memberikan kepuasan terhadap fisik, estetika psikis, dan kreativitas manusianya. Peradaban bagi sebuah negara pada usia 75 tahun bisa saja masih muda atau bisa sangat bijak atau matang,” kata Irwansyah yang juga supervisor NRC Media Group News pada Webinar Kemerdekaan Refleksi 75 Tahun Peradaban Indonesia yang digelar secara daring pada Selasa (11/8).

Ikut hadir pada webinar itu, Menko Polhukam Moh Mahfud MD (*keynote speaker*), Wakil Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, pakar komunikasi politik Karim Suryadi, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, dan peneliti senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Webinar dimoderatori Head of NRC Media Group News Ade Alawi.

Menurut Irwansyah, peradaban Indonesia yang dipotret dalam survei tersebut berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dari 13 pertanyaan tertutup, hasilnya, kata dia, terdapat 8 hal yang positif, dan 5 yang negatif (lihat grafis).

Sementara itu, dari 1 pertanyaan terbuka ke responden diperoleh 15 saran. “Namun, hanya lima besar saran dari responden agar peradaban Indonesia semakin baik,” ungkap pakar komunikasi UI itu.

Pertama, lanjutnya, perlu Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, sistem pendidikan harus semakin baik.



Ketiga, menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, menegakkan hukum secara adil, dan kelima, keteladanan pemimpin sebagai anutan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Moh Mahfud MD mengatakan peradaban adalah bagian yang bagus dari kebudayaan. “Peradaban muncul dalam bentuk etika, estetika, sopan santun, kejujuran, sportivitas, dan sebagainya. Menurut Cak Nur (Cendekiawan Nurcholish Madjid), masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab,” jelasnya.

Masyarakat madani, lanjutnya, adalah masyarakat semasa Nabi Muhammad SAW di

Madinah, yakni masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, menghormati perbedaan, termasuk agama dan egaliter.

Menurutnya, para pendiri bangsa membangun negara dengan merumuskan peradaban, yakni membangun negara yang demokratis. “Hal itu tertuang dalam konstitusi dan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Berperadaban maju, sambung pakar hukum tata negara ini, jika manusia memiliki keunggulan budaya, seperti memiliki sifat kebersamaan, gotong royong, bermusyawarah, dan menjaga keadilan. “Kita melakukan reformasi untuk memperbaiki system ketatanegaraan sebagai bagian peradaban. Apakah

peradaban kita semakin bagus? Bisa iya, bisa tidak,” katanya.

Mahfud mengakui kini korupsi semakin marak. Pasalnya, demokrasi, kata dia, hanya terjadi pada satu tahun kepemimpinan reformasi, karena setelah itu praktik kenegaraan berubah menjadi oligarki.

Alhasil, banyak kebijakan yang dihasilkan bukan dilakukan secara demokratis, melainkan oligarkis.

“Saya berharap webinar ini bisa memberikan solusi bagaimana kita menggeser situasi ke arah yang lebih demokratis,” pungkasnya.

Pakar komunikasi politik Karim Suryadi mengatakan, jika melihat hasil survei NRC, kondisi peradaban Indonesia pada usia 75

tahun berjalan statis.

“Kondisinya stagnan, terlebih lagi kalau kita melihat hasil survei tentang sikap kegotongroyongan masyarakat bernilai positif, tapi tidak besar angkanya (56,42%),” katanya.

Menurutnya, peradaban membutuhkan jalan perubahan. “Kita harus memperkuat *linkage* (keterkaitan) antara demokrasi dan kesejahteraan sosial. Politik harus memelihara harapan bersama dan menghadirkan perbaikan. Penguatan pendidikan juga sangat penting untuk menutrisi proses politik dan pilihan politik,” kata Guru Besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Bandung, Jawa Barat, itu.

Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati menyetujui lima saran responden seperti hasil survei NRC untuk menciptakan peradaban yang lebih baik.

“Satu lagi, rontokkan oligarki,” katanya.

Senada, pakar hukum tata negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan kekuatan oligarkis sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini.

“Oligarki tidak perduli siapa yang memimpin negara. Yang dia perdulikan itu bagaimana modal, kekuatan ekonomi kapitalnya terakumulasi secara aman. Makanya dia akan memilih siapa pun untuk menjadi boneka,” tandasnya.

Dalam pandangan Wakil Kepala BPIP Hariyono, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur, namun dalam realitasnya banyak yang harus diperbaiki.

“Temuan survei NRC bisa kami jadikan pertimbangan bagaimana mengembangkan Pancasila secara struktural dan kultural. Pancasila sebagai dasar negara harus mengatur regulasi dan kebijakan negara,” ujarnya. (Saikhu Baghawi/X-10)

PKBM : Mengejar Pendidikan di Wilayah 3T

Peserta didik memanfaatkan komputer di PKBM Bina Warga, Nunukan.

PKBM di Wilayah 3T

75 tahun sudah Indonesia merdeka, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi negara atau sesama warga walau sekecil apapun juga. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang karena berbagai hal belum seberuntung anggota masyarakat yang lain untuk merasakan atau mengakses fasilitas pendidikan formal.

Seperti yang dialami oleh masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya yang tinggal dekat perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Mereka menghadapi tantangan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dikarenakan jumlah sekolah formal yang sedikit, prasarana sekolah yang masih kurang, kurangnya jumlah tenaga pengajar, serta kondisi geografis (alam).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah sebenarnya sudah membuat program pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan umum atau sekolah formal melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Satuan pendidikan tersebut adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang secara kurikulum menerapkan kurikulum K13, sama seperti kurikulum di sekolah formal pada umumnya. Bahkan capaian kompetensinya terbilang sama dan setara.

Perbedaan yang paling mencolok antara PKBM dengan sekolah formal ialah adanya fleksibilitas proses pembelajaran. Dimana pada pendidikan formal, kegiatan belajar mengajar baku dilaksanakan selama 5 atau 6 Hari dengan jam pelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan di PKBM terdapat fleksibilitas kegiatan belajar mengajar dengan menggabungkan pola pembelajaran Tatap Muka Langsung, Tutorial, dan atau Mandiri. sehingga PKBM dapat mengatur jam dan metode pembelajaran yang digunakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, PKBM dapat didirikan oleh perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum. Sehingga PKBM juga memiliki batas kemampuan yang tidak sama dengan sekolah formal. Meskipun begitu, PKBM memiliki tujuan yang mulia, yakni berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencerdaskan Masyarakat Perbatasan

PT Askrindo sebagai salah satu anggota holding perasuransian dan penjaminan melalui Program Askrindo Peduli Pendidikan menarik perhatian pada upaya PKBM yang ada di wilayah 3T yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh aksesibilitas pendidikan. PKBM di wilayah 3T memiliki lokasi dan tempat belajar yang relatif sederhana, memiliki murid dan jumlah pengajar yang terbatas, serta sarana dan prasarana belajar mengajar serba seadanya. Berkaitan dengan itu, Askrindo membantu menyediakan sarana pendukung kegiatan belajar, yakni komputer.

Dengan adanya sarana komputer di PKBM, tidak hanya bermanfaat untuk mengenalkan peserta didik terhadap teknologi dan kesiapan bekerja di perusahaan, akan tetapi juga bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar dan menjelaskan melalui dunia internet. Apalagi, saat ini ujian akhir kesetaraan sudah berbasis komputer dan dilaksanakan secara *online*. Tidak hanya itu, di saat pandemi seperti ini yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah, keberadaan

komputer semakin dirasa penting oleh pengajar PKBM dan murid.

Makna Merdeka Bagi PKBM

Pada Januari 2020, Askrindo memberikan bantuan ke beberapa PKBM di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia di Propinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada Juli 2020, Askrindo kembali memberikan bantuan komputer kepada tiga PKBM di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Ketiga PKBM tersebut adalah PKBM Bina Warga di Nunukan, PKBM Al-Aziz Prima Peduli Bangsa di Sebatik Timur dan PKBM Al-Firdaus di Sebatik Utara.

Salah satu Kepala PKBM penerima bantuan, Jumadil, yang merupakan Kepala PKBM Al-Aziz Prima Peduli Bangsa mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu PKBM dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, terlebih di era *new normal* seperti saat ini. “Momen-pas sekali, dalam kondisi wabah *corona* ini, mengikuti surat edaran (dinas pendidikan), kegiatan belajar mengajar dilakukan via *online*. Kami bisa mempersiapkan materi ajar melalui komputer untuk kemudian di *share* ke warga belajar”, ujar Jumadil.

Jumadil juga menambahkan bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya pengisian Dakodik (Data Pokok Peserta Didik) dari dinas pendidikan. Pengisian Dakodik dilakukan secara *online* melalui aplikasi yang di-install ke dalam komputer dan menurutnya, bantuan komputer tersebut sangat membantu dalam proses pengisian Dakodik.

Senada dengan Jumadil, Maulin, Kepala PKBM Al-Firdaus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan komputer tersebut memang sangat dibutuhkan saat ini dalam proses belajar mengajar via *online* yang sedang gencar dilakukan. “Saya dan pengurus PKBM mengucapkan terima kasih atas bantuan komputer yang diberikan Askrindo kepada kami. Kami sempat bingung bagaimana melaksanakan kegiatan belajar dan mempersiapkan materi ajar karena tidak adanya komputer di PKBM kami. Dengan bantuan komputer dari Askrindo, kami merasa lega, seperti bebas, merdeka dari keterbatasan yang kami miliki. Pas sekali momennya bagi kami yang memang saat ini membutuhkan sarana komputer untuk kegiatan belajar *online* ke warga belajar kami,” ucap Maulin. *

Pandemi dan Inovasi Anak Bangsa

BERBAGAI penyakit, sebut saja hepatitis, tetanus, difteri, dan campak, di Indonesia pada 1990-an telah merenggut ribuan nyawa. Peristiwa kelabu itu masih diingat oleh Prof Kusnandi Rusmil.

Sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, ia juga ingat bagaimana kerja keras para peneliti kesehatan memerangi penyakit yang mematikan saat itu. Hasilnya, tidak lama berselang, berbagai bakteri dan virus tadi mulai teratasi.

“Itu semua dilakukan dengan ketekunan dan kecerdasan serta dukungan penuh pemerintah. Kami bahu-membahu untuk menemukan vaksinnnya,” kenang Kusnandi.

Keyakinan, kemampuan akan kemandirian bangsa dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat itu yang menyemangati. Maka tak salah jika Presiden Joko Widodo menunjuk Kusnandi Rusmil sebagai Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19. Menurut Guru Besar FK Unpad yang hampir 30 tahun meneliti vaksin ini, penanganan covid-19 memerlukan upaya lebih keras.

Kusnandi kini memimpin uji klinis tahap ketiga terhadap vaksin CoronaVac buatan Sinovac Biotech, Tiongkok, bekerja sama dengan PT Bio Farma (persero). Semua berharap tahapan ini sukses dan vaksin bisa segera disuntikkan.

Belajar dari bagaimana bangsa ini menghadapi virus yang mematikan tadi dan sukses, Kusnandi pun optimistis vaksin covid-19 segera didapat. Jangan sampai covid-19 memorak-porandakan kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa ini.

Sebagai gambaran, pada pertengahan Agustus 2020 atau sembilan bulan sejak virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok, WHO mencatat lebih dari 20,5 juta manusia di dunia terpapar covid-19. Sekitar 13,5 juta orang dinyatakan sembuh dan 745 ribu meninggal dunia.

Di Indonesia, sejak covid-19 dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020, dengan cepat virus ini menyebar ke 34 provinsi. Jadi, tak ada alasan lain, vaksin harus segera ditemukan.

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang ditunjuk pemerintah untuk memimpin konsorsium pengembangan vaksin covid-19, Merah Putih, diharapkan juga sukses.

Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio mengungkapkan ada empat tugas besar dalam penanganan covid-19, yaitu diagnostik, pengembangan vaksin, memimpin konsorsium plasma konvalesen, dan mengidentifikasi virus yang beredar di Indonesia (*whole genome sequencing*).

Tentang vaksin Merah Putih, Eijkman optimistis bisa membuatnya dan berharap masyarakat bersabar karena dalam pengembangan vaksin ada tahap-tahap yang tidak bisa dipercepat. Sembari menunggu vaksin Merah Putih dibuat, Amin berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

Peran perguruan tinggi juga tak kalah penting. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) kini sedang mengembangkan metode pelumpahan covid-19.

Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Unair, dr Purwati,

menjelaskan pihaknya tengah mengembangkan *hematopoietic stem cell* sebagai *natural killer cell* yang dapat menonaktifkan atau melumpuhkan 80% sampai 90% virus.

Dia pun berharap upaya tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, terutama dalam penanganan covid-19 yang masih mewabah.

Kiprah para ilmuwan di Tanah Air dalam penanggulangan covid-19 juga tak diragukan. Mereka berlomba mencari cara terbaik agar vaksin yang tepat segera di tangan.

Salah satu terapi yang menjanjikan ialah terapi plasma konvalesen. Terapi ini melibatkan pemberian plasma dari donor pasien yang sembuh kepada pasien covid-19 yang masih terpapar.

Ahli genetika dan biologi molekular FK Universitas Kristen Maranatha, Theresia Monica Rahardjo, bersama timnya berinisiatif menjalankan penelitian agar terapi ini dapat segera dilakukan di Indonesia. Terapi tersebut kini tengah diujicobakan di wilayah Jawa dan Bali.

Bahu-membahu

Perang dengan covid-19 masih berlangsung. Semua pihak kini yakin bahwa kunci keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi pandemi ialah tekad yang kuat dan kesediaan untuk bahu-membahu mencari solusi.

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN, Ali Gufron Mukti, membenarkan adanya kerja-kerja profesional para ilmuwan Indonesia dan pemerintah. (BY/Aiw/Ata/Fer/Ifa/H-1)

ASI Eksklusif Penting di Tengah Pandemi Covid-19

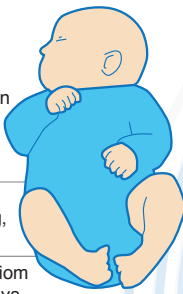
Pekan Menyusui Sedunia

Fakta ASI

- ASI mengandung nutrisi lengkap yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan perkembangan kecerdasannya.
- ASI mengandung kolostrum yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh si Kecil.
- ASI mengandung kalori dan komposisi zat gizi sesuai kebutuhan bayi, sehingga dapat memenuhi aspek pertumbuhan si Kecil. (Kandungan energi ASI berubah dinamis menyesuaikan usia, jadi kurang tepat jika disebutkan 65 kkal/100 mL)
- Kandungan lemak ASI memiliki peran penting dalam perkembangan sel otak bayi, berkat asam lemak rantai panjang, DHA, AA, dan EPA yang mudah diserap tubuh bayi.
- ASI menyiapkan kekebalan usus bayi baru lahir dengan mikrobiom dan immunoglobulin A dalam kolostrum, sejak awal kehidupannya.
- ASI memberikan perlindungan terhadap infeksi dan alergi. Juga, akan merangsang pertumbuhan sistem kekebalan tubuh si Kecil.

Peran Ayah Persiapan Ibu Menyusui

- Membantu ibu perawatan payudara saat kehamilan.
- Memutuskan kelahiran di fasilitas kesehatan.
- Memastikan anak mendapatkan IMD (inisiasi menyusui dini).
- Aktif bertanya pada bidan/nakes mengenai menyusui.
- Mendorong Ibu hadir di kelas ibu menyusui.
- Dukung Ibu dengan perhatian dan kasih sayang.
- Membantu melakukan pijat ASI (oksitosin) agar ASI keluar melimpah.
- Menyiapkan yang dibutuhkan untuk produksi ASI.
- Membantu Ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Ikut bangun saat Bunda memberikan ASI malam hari.



Beberapa Makanan yang Dibutuhkan Ibu Menyusui Agar Produksi ASI Melimpah

Kacang Hijau

Kaya vit B1, zat Besi dan sumber asem folat



Daun Katuk

Mengandung laktagogum, Vitamin A,B,C ; protein ; lemak, karbohidrat, dan zat besi



Kacang-kacangan

Kaya antioksidan dan lemak



Bayam

Mengandung Enzym phytoestrogens, tinggi zat besi pencegah anemia



Pare

Kandungan vitamin C tinggi, menurunkan gula dalam darah dan menormalkan tekanan darah



Labu Siam

Memenuhi kebutuhan asam folat



Ikan Kembung

kaya akan protein albumin



Papaya

Memenuhi kebutuhan kalium pencegah depresi, vitamin A dan C



Kurma

Kaya kandungan kalsium dan asam amino esensial tryptophan



ASI Eksklusif Cegah Stunting

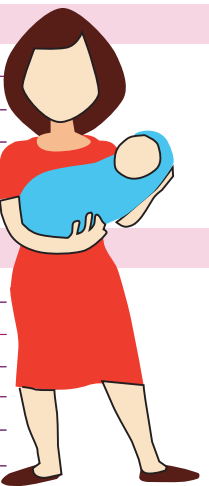
- Berikan ASI saja pada bayi usia 0-6 bulan.
- Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan (kolostrum).
- Jangan berikan makanan dan minuman (termasuk air dan madu) selain hanya ASI.
- Berikan makanan pendamping ASI (MPASI) untuk anak usia 6 bulan hingga 2 tahun dan ASI tetap diberikan sesering mungkin untuk mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan.
- Berikan imunisasi lengkap dan vitamin A.
- Pantau pertumbuhan balita dengan rutin ke posyandu.
- Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Penyakit yang Bisa Dicegah dengan ASI

Ibu

- Diabetes tipe 2, sindrom metabolik
- Hipertensi, penyakit jantung coroner
- Osteoporosis, osteoarthritis
- Kanker payudara, indung telur, leher rahim
- Depresi post partum, dementia)



Bayi/anak

- Infeksi saluran nafas bawah (pneumonia)
- Infeksi saluran cerna (diare)
- Infeksi telinga tengah
- Alergi dan asma
- Karies gigi
- Gangguan mental, emosi dan perilaku

Makanan Pendamping ASI (MPASI)

Merupakan makanan lokal yang tersedia (dari dapur, kebun atau pasar) yang tepat digunakan ketika ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bagi. Mulai berikan MPASI saat anak berusia 6 bulan.

• Usia 6 bulan

Mulai diberikan bubur LUMAT dari beragam bahan makanan lokal sumber PROTEIN (telur, hati ayam, daging, ikan, tahu/tempe, kacang-kacangan, dll) dan KARBOHIDRAT (beras, kentang, ubi, jagung, dll), dimasak hingga matang dan lumat.

• Usia 6-9 bulan

Makanan berprotein penting untuk bayi. Berikan 2 atau 3 porsi makanan utama, ditambah 1-2 kali makanan selingan (buah atau camilan bertekstur lumat) mohon jangan ada SELAI KACANG jadi MPASI.

• Usia 9-12 bulan

Berikan makanan yang lebih bertekstur, bubur SARING KASAR atau CINCANG, porsi setengah mangkuk 3 sampai 4 kali dalam sehari. Tambahkan makanan selingan 1-2 kali. Lanjutkan menyusui.

• Usia 12-24 bulan

Anak sudah bisa makan apa yang dikonsumsi keluarganya. Pastikan asupan protein juga ragam maknannya. Berikan makanan ¾ mangkuk atau lebih, 3 sampai 4 kali dalam sehari. Jangan lupa snack 2 kali dalam sehari, bisa berupa buah atau jajanan yang sehat. Teruskan ASI.

Sumber : Kumpulan Resep Makanan Pendamping ASI dan Makanan Ibu Hamil, Millenium Challenge Account – Indonesia 2018

Kebijakan Pemerintah terkait ASI Eksklusif

Pengaturan mengenai pemberian air susu ibu ("ASI") eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") yang berbunyi:

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Selanjutnya, dalam Pasal 129 UU Kesehatan diatur bahwa:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemberian ASI eksklusif juga telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja ("Peraturan Bersama"). Dalam Peraturan Bersama tersebut antara lain disebutkan bahwa Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya a pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun

MEMPERINGATI pekan menyusui dunia pada 1-7 Agustus 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF meminta pemerintah mempertahankan akses dan layanan untuk memungkinkan para ibu tetap menyusui selama masa pandemi covid-19.

Sebab, proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif amat membantu anak-anak bertahan hidup dan membangun antibodi agar terlindungi dari berbagai penyakit yang sering terjadi pada masa kanak-kanak seperti diare dan pneumonia.

Berdasarkan bukti di lapangan, menunjukkan anak yang mendapatkan ASI lebih baik pada tes inteligensi, kemungkinan mengalami obesitas dan kelebihan berat badan lebih kecil, serta risiko diabetes pada dewasa lebih rendah. Peningkatan angka ibu menyusui secara global berpotensi menyelamatkan nyawa lebih dari 820.000 anak usia balita dan mencegah penambahan 20.000 kasus kanker payudara pada perempuan setiap tahunnya.

Namun, di Indonesia, hanya 1 dari 2 bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, dan hanya sedikit lebih dari 5% anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 23 bulan. Artinya, hampir setengah dari seluruh anak Indonesia tidak menerima gizi yang mereka butuhkan selama dua tahun pertama kehidupan.

Sebab, ternyata lebih dari 40% bayi diperkenalkan terlalu dini kepada makanan pendamping ASI, yaitu sebelum mereka mencapai usia 6 bulan, dan makanan yang diberikan sering kali tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi. Apalagi, dengan kondisi pandemi covid-19, akses kepada layanan esensial seperti konseling menyusui di rumah sakit, klinik kesehatan, dan melalui kunjungan ke rumah terganggu. Bahkan, informasi tidak tepat yang beredar tentang keamanan menyusui menurunkan angka ibu menyusui karena para ibu takut menularkan penyakit kepada bayi mereka.

"Saat ini ketika layanan kesehatan masyarakat terhambat, kita sangat perlu memahami manfaat luar biasa dari ASI dan interaksi ibu dan bayinya dalam mencegah penyakit yang sering terjadi di masa kanak-kanak serta mempro-



"Andil organisasi masyarakat sipil di berbagai pelosok negeri ikut melengkapi upaya promosi menyusui yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan jajarannya."

Prof Widodo Muktiyo

Dirjen IKP Kominfo

mosikan kesehatan dan perkembangan anak," ungkap Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr Paranietharan.

Tak hanya itu, selama pandemi belum berakhir, ibu yang terkonfirmasi positif mengidap pasien covid-19, UNICEF dan WHO meminta agar tetap mendukung ibu melanjutkan menyusui tanpa memisahkan ibu dari bayinya. Tentunya, ini dilakukan sambil memperhatikan langkah pengendalian penularan yang tepat.

Hingga saat ini, belum ada data yang cukup menyimpulkan bahwa covid-19 ditularkan secara vertikal dari ibu ke anak melalui menyusui. Di sisi lain, penghentian pemberian ASI dan pemisahan ibu dari bayinya bisa menimbulkan konsekuensi signifikan. Dengan demikian, manfaat pemberian ASI tampak melampaui potensi risiko penularan secara substansial.

"Sepanjang pandemi covid-19, kita harus terus mempromosikan menyusui sebagai cara penting menjaga kesehatan dan keselamatan anak dan ibu," kata dia.

Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini mengatakan dukungan keluarga untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab bersama. Guna mendukung praktik-praktik menyusui secara berkesinambungan dan optimal, UNICEF dan WHO mengimbau pemerintah dan para pemangku kepentingan agar meningkatkan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi dan mendukung pemberian ASI.

Selain itu, pemerintah pun punya kewajiban memprioritaskan layanan dan program untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI sebagai komponen kesehatan dan gizi yang amat penting dalam merespons pandemi covid-19. Mereka juga harus melanjutkan dukungan kepada ibu menyusui melalui peningkatan konseling yang berkualitas dan penyediaan informasi yang akurat tentang gizi ibu, bayi, anak, serta memperkuat layanan rumah sakit.

Pemerintah juga harus mengakhiri promosi produk pengganti ASI agar ibu dan pengasuh bisa membuat keputusan yang terbaik mengenai pemberian makan kepada bayi. Lebih jauh, WHO, UNICEF, dan para mitra baru-baru ini mengimbau produsen produk pengganti ASI agar berkomitmen untuk patuh secara penuh kepada Kode Pemasaran Internasional untuk Produk Pengganti ASI dan resolusi terkait yang diadopsi oleh Sidang Majelis Kesehatan Dunia (Kode) untuk memastikan semua bayi dan anak di seluruh dunia mendapatkan ASI secara optimal dan mengonsumsi makanan sehat.

Selama 6 Bulan

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyampaikan di Indonesia, pengaturan mengenai pemberian ASI eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang berbunyi: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif se-

jak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Selanjutnya, dalam Pasal 129 UU Kesehatan diatur bahwa (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian ASI eksklusif juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja (Peraturan Bersama). Dalam Peraturan Bersama antara lain disebutkan bahwa Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 tahun (Pasal 1 angka 2).

Kemudian, berdasarkan Peraturan Bersama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (Pasal 3 ayat [2] huruf a).

ASI Eksklusif Meningkat

Widodo menambahkan pencapaian dua indikator menyusui yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan peningkatan dari data Riskesdas 2013 dan 2010. Bayi baru lahir yang mendapat kesempatan

"Banyak manfaat yang diperoleh bayi melalui IMD di antaranya ialah, meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum."

dr Wiyarni Pambudi, SpA, IBCLC

Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

kontak kulit dengan kulit (skin to skin) segera setelah lahir atau IMD naik menjadi 58,3% pada 2018 dari 34,5% pada 2013. Adapun ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif hingga enam bulan meningkat menjadi 37,3% pada 2018 dari 30,2% pada 2013.

Kedua indikator ini bagian dari delapan indikator utama Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yang disyaratkan WHO (2007). Peningkatan capaian dua indikator tersebut tentu merupakan hal yang melegakan.

Semakin banyak persentasi bayi yang merasakan IMD dan disusui secara eksklusif hingga waktu yang tepat untuk memulai MPASI. "Namun capaian ini masih di bawah target ASI Eksklusif 60%. Karena itu upaya promosi, perlindungan, dan dukungan menyusui harus dipacu sekuat tenaga dalam lima tahun ke depan dengan melibatkan semua sumber daya," ujar Widodo di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Widodo, promosi, perlindungan, dan dukungan menyusui menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, dan masyarakat termasuk penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan kesehatan. "Bahkan termasuk menjadi tanggung jawab produsen susu formula bayi dan produk bayi lainnya," kata Widodo.

Widodo pun mengakui selama dasawarsa terakhir, promosi menyusui

bisa dianggap mengalami kemajuan yang sangat membanggakan, terutama sejak berdirinya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) pada 2007 melalui beragam kegiatan inovatif dan inspiratif yang terus membawa perubahan paradigma keluarga muda Indonesia bahwa menyusui adalah hak setiap ibu dan menyusui memenuhi kebutuhan gizi terbaik untuk bayi.

Promosi menyusui makin menyenangkan dan seru sejak aktifnya komunitas AyahASI yang dalam waktu singkat berhasil mendapat penggemar berjuta mamah muda dan para ayah Indonesia. "Andil organisasi masyarakat sipil di berbagai pelosok negeri ikut melengkapi upaya promosi menyusui yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan jajarannya," lanjut Widodo.

IMD Sukseskan ASI Eksklusif

Menurut dr Wiyarni Pambudi Sp.A IBCLC dari Satgas Air Susu Ibu Ikatan Dokter Anak Indonesia (ASI IDAI), tiap bayi baru lahir dijamin haknya mendapatkan kesempatan IMD dari ibunya, sesuai Pasal 9 ayat 1 PP No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Apalagi, banyak manfaat yang diperoleh bayi melalui IMD. Di antaranya ialah, meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. Kolostrum adalah tetes ASI pertama ibu yang kaya nutrisi dan membantu mencegah penyakit. Kemudian, mendukung keberhasilan ASI eksklusif. IMD bakal menunjang keberhasilan ASI eksklusif hingga setidaknya bayi berusia 4 bulan. Pemberian ASI eksklusif dianjurkan hingga bayi berusia 6 bulan, namun boleh dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Yang juga penting manfaat IMD bagi bayi ialah memperkuat hubungan ibu dan bayi.

Wiyarni menjelaskan proses IMD pun sederhana. IMD hanya meletakkan bayi dalam posisi tengkurap kontak kulit ke kulit di dada atau perut ibu mereka, segera setelah lahir, dibiarkan selama setidaknya satu jam.

Jika bayi berhasil menyusui pertama kali dengan diri sendiri (baby self attachment) sangat membantu mereka mengingat hal ini (imprinting) pada saat menyusui berikutnya sehingga membuat proses menyusui lebih mudah. (Gan/S3-25)



EDISI KHUSUS KEMERDEKAAN

BANGKIT UNTUK INDONESIA MAJU

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 ♦ HALAMAN B12

MEDIA
INDONESIA

Wujudkan Mimpi Besar Garuda Muda

Penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih merupakan pertanda Indonesia akan berbicara banyak di level dunia dan lolos ke perempat final Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.

RAHMATUL FAJRI

rahfaj@mediaindonesia.com

SEPAK bola Indonesia mencatatkan sejarah. Setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kini Indonesia diapuk menjadi tuan rumah event berskala lebih besar, yakni Piala Dunia U-20 pada 2021.

Itu merupakan kesempatan nan langka bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah, publik sepak bola Indonesia akan dimanjakan dengan tim dari Eropa dan Amerika Selatan yang gudangnya bibit pesepak bola berbakat dunia.

Publik bisa menonton pemain Barcelona Ansu Fati yang membela Spanyol atau striker Manchester United Mason Greenwood yang berseragam timnas Inggris secara langsung. Belum lagi dua pemain berbakat milik Arsenal yang mencuat musim ini, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Bisa saja akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup.

Bagi tim nasional, ini akan menjadi momentum sejauh mana pasukan 'Garuda Muda' bisa berbicara banyak di level dunia. Memang agak muluk jika berbicara level dunia. Terlebih Indonesia baru dua kali tampil di Piala Dunia 1938, saat itu masih bernama Hindia Belanda. Indonesia kalah 0-6 dari Hongaria dan langsung tersingkir. Lalu, Indonesia juga pernah ambil bagian pada Piala Dunia Junior 1979 di Jepang. Kini, 42 tahun berselang, kejuaraan



DOK. PSSI

BERI MOTIVASI: Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia M Iriawan memberi salam kepada para pemain timnas Indonesia U-19 yang tengah berlatih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, awal bulan ini. Timnas U-19 dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U-20 2021.

junior FIFA singgah di Indonesia dan lebih spesial menjadi tuan rumah. Momentum ini layak menjadi fokus PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia menggantungkan mimpi untuk terus eksis di kancah dunia.

Keinginan sukses pada Piala Dunia U-20 2021 ditunjukkan PSSI dengan mendatangkan pelatih kaliber internasional. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong diapuk menjadi nakhoda timnas U-19 yang akan tampil di Piala Dunia tahun depan. Di pundak Shin Tae-yong digantungkan mimpi dan harapan besar. Pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 Rusia itu ditargetkan lolos ke perempat final. Incaran yang membutuhkan perjuangan keras.

Namun, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan tak gentar. Menurutnnya, penunjukan Shin Tae-yong merupakan pertanda Indonesia akan berbicara banyak di level dunia dan lolos ke perempat final.

"Kita punya obsesi, kita berkeinginan dari grup, lalu lolos 16 besar, paling tidak 8 besar. Memang target tinggi, tapi justru itu kita hire (pilih) dia untuk prestasi timnas kita," kata Iriawan.

Tambah jam terbang

Karena pandemi covid-19, program dan timeline yang telah dibuat terpaksa dirombak ulang menyesuaikan kondisi terkini. Setelah lima bulan, akhirnya Shin Tae-yong kembali mengumpulkan para

pemain menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 8 Agustus lalu.

Latihan pun dimulai dan PSSI bersama Shin Tae-yong mulai merencanakan membawa timnas U-19 keluar negeri. Korea Selatan menjadi destinasi utama untuk meningkatkan kemampuan para pemain.

Sejumlah negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, atau Jerman, menjadi tujuan berikutnya. Hal ini guna merasakan kekuatan negara Eropa yang juga akan berlaga di Piala Dunia.

"Kita juga sedang jajaki ke Belanda. Yang jelas, Shin Tae-yong menginginkan keluar negeri, baik ke Korea Selatan maupun negara Eropa," kata Iriawan.

Shin Tae-yong sadar bahwa ia butuh

membawa anak asuhnya keluar negeri guna menambah jam terbang pemain. Namun, keinginan itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Aturan karantina 14 hari dan kondisi Indonesia yang masih dalam zona merah membuat kedatangan pemain Indonesia juga tak mudah. PSSI pun terus bergerak guna merealisasikan latihan di 'Negeri Ginseng' itu.

Panggil Elkan Baggott

Persiapan yang disusun sedemikian rupa juga harus diiringi dengan pemanggilan pemain yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Saat tampil di ajang Piala Dunia U-20, pemain harus memiliki fisik yang mumpuni dan jam terbang tinggi.

Shin memanggil lima pemain yang merumput di Eropa. Mereka ialah Witan Sulaeman yang bermain di Liga Serbia bersama FK Radnik Surdulica, Elkan Baggott yang berkecukupan Ipswich Town U-18, Khairul Imam Zakiri yang merumput di Spanyol bersama Polillas Ceuta. Lalu, Brylian Aldama dan David Maulana yang tergabung dalam program Garuda Select di Inggris dan Italia.

Satu nama yang menarik perhatian ialah Elkan Baggott. Pemain berdarah Inggris-Indonesia telah dipantau langsung oleh Shin Tae-yong untuk mengisi pos lini belakang. Dengan postur 194 cm, Baggott memiliki modal menjadi palang pintu dan menambah kekuatan bola atas yang kerap menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. "Memang dari kemarin mencari orang berdarah Indonesia di luar negeri, seperti Belanda dan Inggris. Setelah lihat ada Elkan, postur tubuhnya tinggi, bagus. Maka itu, saya pilih dia," ujar Shin Tae-yong.

Sementara itu, Elkan mengaku tak akan menyia-nyaikan pemanggilan pertama ke timnas dalam perjalanan kariernya selama ini. Ia bertekad membawa tim nasional Indonesia meraih juara di Piala Asia U-19 di Uzbekistan pada 14 hingga 31 Oktober mendatang. (R-2)

Harapan Menpora Pada Peringatan Hari Pramuka Ke-59

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali menyampaikan harapannya pada Peringatan Hari Pramuka ke-59. Ia berharap anggota pramuka Indonesia untuk terus berperan aktif menyampaikan rasa optimis kepada masyarakat saat pandemi covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

"Kita harus tetap waspada, menjaga diri dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker jika beraktivitas di luar, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, minum vitamin, dan jangan lupa untuk berolahraga agar

anggota pramuka untuk memiliki kepedulian nasional dengan mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi.

Lebih jauh, Menpora juga meminta seluruh anggota Gerakan Pramuka Indonesia untuk menjadi pelopor. Menurut dia, pramuka memiliki peran yang sangat besar untuk pengembangan generasi yang akan datang serta membawa masyarakat menjadi semakin maju.

"Pramuka adalah generasi muda untuk kemajuan bangsa. Saling menghargai dan saling membantu adalah sikap dari pramuka. Terima kasih pramuka Indonesia,

"Anggota pramuka harus bisa membangkitkan rasa optimis di tengah masyarakat. Menjadi gerakan terdepan untuk menyampaikan pesan-pesan baik, dengan tujuan keadaan menjadi sejuk, tenang, dan tetap beraktivitas di tengah pandemi,"

tubuh tetap bugar," kata Menpora.

Zainudin mengutarakan, keluarga besar pramuka juga harus bisa menjadi garda terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan baik kepada masyarakat. Anggota pramuka harus mampu membangkitkan rasa optimisme dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat tetap aktif dan produktif.

"Anggota pramuka harus bisa membangkitkan rasa optimis di tengah masyarakat. Menjadi gerakan terdepan untuk menyampaikan pesan-pesan baik, dengan tujuan keadaan menjadi sejuk, tenang, dan tetap beraktivitas di tengah pandemi," ujar Menpora. Di samping itu, ia juga mengajak

yang turut bersinergi dalam penanggulangan covid-19," jelas Menpora.

Tahun ini, Peringatan Hari Pramuka ke-59 dilangsungkan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (12/8). Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan amanatnya kepada anggota pramuka. Menpora Zainudin Amali turut hadir mendampingi presiden dan mengamini amanat tersebut.

Sementara, Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso beserta para peserta upacara lainnya mengikuti kegiatan melalui konferensi video. Seluruh rangkaian tersebut menerapkan protokol kesehatan. (S1-25)



Saling menghargai dan saling membantu sesama adalah sikap Pramuka, sebagaimana adik-adik telah turut membantu bersinergi dalam penanggulangan covid 19.

SELAMAT HARI PRAMUKA KE 59 TAHUN 2020, PRAMUKA ADALAH GENERASI MUDA UNTUK KEMAJUAN BANGSA."

Zainudin Amali
MENPORA RI

PEMUDA MAJU OLAH RAGA JAYA

www.kemenpora.go.id

@kemenpora @KEMENPORA_RI





MUSANTO

BAHAS RUU CIPTA KERJA: Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Willy Aditya memimpin rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan Dewan Pers di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Willy mengatakan DPR melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja secara intensif agar hasilnya dapat segera digunakan pascapandemi berakhir. Dengan begitu, keterpurukan ekonomi dapat diminimalisasi.

Mencegah Stagnasi UU di Tengah Pandemi

DPR tidak bisa hanya mendorong dan menunggu pemerintah menjalankan berbagai program penanganan pandemi. Namun, DPR harus turut andil secara nyata.

PUTRI ROSMALIA
putri@mediaindonesia.com

KINERJA DPR dan pemerintah dalam membahas dan menghasilkan undang-undang atau produk legislasi banyak terpengaruh pandemi covid-19. Pembatasan fisik sebagai upaya pencegahan penularan covid-19 harus dilakukan dalam setiap kegiatan rapat dan sidang.

Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga saat ini, kehadiran anggota dewan berbagai rapat di DPR masih dilakukan secara terbatas. Umumnya rapat dilakukan dengan menggabungkan antara kehadiran secara fisik dan virtual.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan situasi pandemi tidak bisa diremehkan. Semua unsur negara harus lebih dulu fokus dalam upaya penanganan penyebaran dan dampak pandemi.

Lucius mengatakan peran DPR dalam situasi pandemi ini sangat penting. DPR tidak bisa hanya mendorong dan menunggu pemerintah menjalankan berbagai program penanganan pandemi. Namun, DPR harus turut andil secara nyata dalam pembuatan produk UU yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan pandemi.

“Begitu juga halnya dengan fungsi anggaran dan pengawasan. Saya kira dia fungsi ini sangat penting untuk memastikan ekonomi rakyat tak terjungkal. Anggaran untuk rakyat harus didesain seserius mungkin agar tepat sasaran. Untuk memastikan sumbangan yang sudah disediakan bisa diterima oleh pihak yang tepat, saya kira peran pengawasan DPR menjadi sangat penting,” ujar Lucius.

Melalui fungsi legislasi, sumbangsih DPR diharapkan dengan menggumuli persoalan krisis yang harus direspons regulasi demi mendorong penanganan cepat atas pandemi. Pandemi ini juga

harus direspons DPR dengan mulai mengembangkan paradigma berpikir di kala krisis. Saat ini, belum ada kesiapan di tubuh DPR dalam menghadapi situasi pandemi atau krisis lainnya.

“Usul membuat RUU soal bencana nonalam dan penanganannya yang hanya berlaku terbatas untuk pandemi ini saya kira harus dipikirkan DPR. RUU itu khusus untuk merespons situasi saat ini dan bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkan,” ujar Lucius.

Lucius menekankan, RUU yang berdampak langsung pada rakyat yang dilanda krisis, itu yang harusnya diupayakan. Ia mengatakan banyak RUU sektoral yang perlu diselesaikan yang terkait dengan DPR. Hal itu harus dimulai dengan upaya DPR untuk kembali menyisir daftar RUU mana yang paling penting untuk diselesaikan di situasi pandemi.

Fungsi legislasi

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan di tengah situasi pandemi, DPR bersama pemerintah telah melakukan pelaksanaan fungsi legislasi dalam penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Selama masa pandemi, ada beberapa RUU yang telah disahkan.

Pada penutupan masa sidang III, DPR telah mengesahkan UU Minerba. Pada masa sidang IV, DPR telah mengesahkan UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Lalu, UU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*),” ujar Puan.

Tak hanya itu, UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) telah selesai dibahas.

Di samping itu, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI telah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2020 dengan mengurangi 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas. Selain itu, terdapat tiga RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas 2020 serta dua RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2020. Dengan demikian, jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebanyak 37 RUU.

“Evaluasi tersebut tidak dapat dihindari karena proses pembahasan RUU sedikit banyak terdampak akibat adanya pandemi covid-19 saat ini. DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan RUU menjadi UU sebagai tugas konstitusional dalam fungsi legislasi,” ujar Puan.

Krusial

Pembahasan RUU krusial juga terus dilakukan DPR di tengah masa pandemi. Salah satunya RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja terus dilakukan DPR meski tengah memasuki masa reses.

Hal itu dilakukan karena RUU Cipta Kerja dinilai sangat penting keberadaannya untuk mengatasi dampak ekonomi buruk akibat pandemi, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

“Pandemi ini bukan berarti kita jadi tidak bekerja, justru kita ini harus terus bekerja agar bisa membantu mengatasi dampak pandemi,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya.

Willy mengatakan, DPR melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja secara intensif agar hasilnya dapat segera digunakan pascapandemi berakhir. Dengan begitu, keterpurukan ekonomi dapat diminimalisasi.

“DPR tetap berupaya menghasilkan UU dengan transparan dan melibatkan publik meski di tengah pandemi. Untuk menghindari kontroversi klaster ketenagakerjaan juga ditunda pembahasannya,” ujar Willy.

Sementara itu, Nkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pada prinsipnya pemerintah dan DPR sependapat dalam hal penyelesaian RUU di tengah pandemi. Pemerintah tak ingin memaksakan penyelesaian penyusunan UU di tengah pandemi.

“Seperti berkenaan dengan evaluasi Prolegnas 2020, dengan melihat dinamika pelaksanaannya serta situasi dari covid-19, pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Badan Legislasi DPR untuk melakukan penyempurnaan Prolegnas dari segi substansi ataupun kuantitas yang lebih realistis,” kata Yasonna. (P-1)

Aksi Jalanan Bergeser ke Ruang Sidang

AKSI-AKSI demonstrasi atau seringkali disebut sebagai parlemen jalanan sejak masa reformasi menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat hingga kritik kepada penyelenggara negara. Bahkan, bila ditarik sedikit ke belakang, aksi demonstrasi yang dimotori pelajar dan mahasiswa lah yang menjadi tonggak lahirnya era Reformasi.

Sejak itu, unjuk rasa masih kerap dipakai sebagai ajang menyampaikan aspirasi yang menghadapi sumbatan. Namun, mahasiswa sebagai bagian dari kaum terpelajar mulai melirik saluran lain.

Seusai perhelatan pesta demokrasi tahun lalu, semakin banyak mahasiswa yang beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau di depan Istana Negara.

Mereka memilih memperjuangkan kritik atas isi undang-undang yang dinilai merugikan rakyat dengan mengujimaterikan terhadap amanat konstitusi. Kendatipun, kesiapan mereka kurang maksimal.

Berdasarkan catatan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) fenomena mahasiswa melakukan pengujian undang-undang (UU) di MK sebetulnya bukan hal yang baru. Sepanjang periode 2003-2019, setidaknya terdapat 102 permohonan yang diajukan mahasiswa.

“Lingkup isunya pun beragam, mulai dari penegakan hukum, politik dan peme-

rintahan, kepemiluan, pendidikan, ekonomi, perpajakan, kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya,” ucap Koordinator bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif Viola Reininda, saat dihubungi, Rabu (5/8).

Viola menilai fenomena bergesernya parlemen jalanan ke ruang sidang merupakan bentuk kesadaran berkonstitusi yang positif. Para mahasiswa memanfaatkan jalur konstitusional untuk mengoreksi ketentuan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi hingga memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar akibat keberlakuan suatu undang-undang.

“Tentu hal ini perlu disambut dan didukung dengan baik, sebab peristiwa ini menjadi satu cara yang menginspirasi dan mengedukasi publik secara umum tentang bagaimana warga negara mempertahankan atau memulihkan hak-hak konstitusionalnya, dan bagaimana warga negara mengadvokasikan legislasi yang sejalan dengan UUD 1945 melalui jalur yang konstitusional pula,” sebut Viola.

Namun demikian, Viola mengatakan kesiapan mahasiswa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu catatan penting. Edukasi tentang beracara di MK perlu digalakkan. MK dapat bekerja sama dengan universitas menyampaikan materi kelembagaan MK dan hukum acara MK.

Menurut Viola, pembelajaran juga bisa dilakukan secara mandiri, misalnya mempelajari UU MK dan peraturan MK tentang tata cara beracara. Mahasiswa juga dapat menyaksikan persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun *streaming via Youtube*.

Viola menyampaikan, ada sejumlah hal lain yang perlu diperhatikan dalam beracara di MK selain mempelajari dengan baik tata cara beracara di MK.

“Penyusunan permohonan, terutama *legal standing* harus diperhatikan. Mahasiswa perlu pandai-pandai menguraikan kepentingannya, kerugian konstitusional yang dirasakan, dan hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional dan pasal

Mahasiswa perlu pandai-pandai menguraikan kepentingannya, kerugian konstitusional yang dirasakan, dan hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional dengan pasal yang diujikan.

yang diujikan,” jelasnya.

Keseriusan dan kesungguhan dalam pengujian juga menjadi penting, sebab menurut Viola, undang-undang bersifat mengikat umum. Implikasi yang ditimbulkan sangat luas.

Oleh karena itu, setiap pengujian yang dilakukan mahasiswa harus dilakukan secara matang, baik secara substansi maupun kesiapan dalam bersidang.

Hak konstitusional

Ketua MK Anwar Usman menyambut baik upaya para mahasiswa yang memilih memperjuangkan hak konstitusinya di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai hal tersebut merupakan kesadaran berkonstitusi yang positif.

Anwar pun menyebutkan Mahkamah Konstitusi sangat membuka ruang hukum bagi siapa saja yang ingin memperjuangkan haknya ketika merasa dirugikan akibat dari kebijakan hukum.

“Fakikat keberadaan MK ialah memberikan ruang hukum bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat dari kebijakan hukum yang dilahirkan keputusan politik, dalam hal ini kebijakan hukum dimaksud ialah undang-undang,” ucap Anwar.

Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ruben Saputra yang pernah melakukan persidangan di MK mengungkapkan alasan memanfaatkan ruang sidang MK. Ia merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara terganggu oleh Pasal 107 Ayat (2) dan Pasal 293 Ayat (2) Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada intinya ia menggugat aturan menyalakan lampu siang hari bagi sepeda motor. Meski pada akhirnya gugatannya tidak diterima, Ruben mengaku puas menempuh langkah tersebut.

Ia menceritakan, selama persidangan dirinya diterima dengan baik oleh MK, dan tidak merasa dipersulit. Ruben mengaku tidak menghadapi kendala dalam proses persidangan.

“Paling dalam penyusunan berkas saja agak rumit, karena memang saya dengan teman menyusun berkas secara independen, tanpa ada mentor, dan yang paling penting suara kami diterima dengan baik di MK,” papar Ruben.

Lembaga bantuan

Berdasarkan pengalamannya, Ruben menilai perlunya sebuah edukasi terkait beracara di MK. Ia berharap ada sebuah lembaga bantuan hukum konstitusi yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum beracara di MK.

Dikatakan Ruben, mengadvokasikan gagasan, baik melalui pengujian UU di MK maupun dengan demonstrasi, sama-sama konstitusional. UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak warga negara untuk menyalurkan aspirasi melalui dua jalur tersebut.

“Ya intinya saya mengajak teman-teman mahasiswa mungkin dapat menentukan jalur-jalur yang dapat dipilih dalam mempertahankan dan atau memperjuangkan keadilan,” tegasnya. (Rif/P-2)

Dicari, Abdi Negara Adaptif

Belum semua aparaturn sipil negara siap mengaplikasikan sistem digital yang turut meminimalkan praktik pungutan liar.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

PANDEMI virus korona baru yang menimbulkan covid-19 mengubah pola kerja masyarakat, tidak terkecuali aparaturn sipil negara (ASN) sebagai penggerak birokrasi. ASN dituntut untuk lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja fleksibel dari rumah. Namun, tidak semua ASN mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Hal itu dikemukakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.

Trubus mengatakan pemerintah perlu mendorong semangat reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu pun sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Tujuannya, lanjut Trubus, memangkas birokrasi yang berbelit-belit melalui digitalisasi. Hal itu sekaligus meminimalkan adanya maladministrasi serta praktik pungutan liar.

Hanya, ia menilai belum semua ASN siap dengan perubahan itu. Trubus merujuk pada data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro) yang menyatakan ada 1,6 juta atau 20%

dari total 4,3 juta ASN berkinerja tidak produktif dan akan dialihkan ke tugas lainnya seperti tenaga penyuluh desa.

Kendati Menpan Rebiro Tjahjo Kumolo menyatakan pengalihan tugas itu tidak ada kaitannya dengan perubahan kerja ASN selama pandemi, Trubus melihat adanya keterkaitan.

“Ketika pemerintah ingin birokrasi beralih ke digital, mereka belum siap. Di luar 1,6 juta pun saya rasa belum siap,” ucap Trubus, pekan lalu.

Untuk mengatasi hal itu, menurut Trubus, diperlukan pembenahan rekrutmen ASN, terutama di daerah. Ia mengungkapkan rekrutmen pegawai pemerintahan di daerah kerap kali tidak diikuti dengan sistem yang merit. Kepala daerah, imbuhnya, punya kewenangan mengangkat ASN sebab Badan Kepegawaian Daerah umumnya dikepalai oleh kepala daerah. Mereka yang menandatangani surat keputusan pengangkatan pegawai.

“Dengan kondisi adanya pandemi dan memasuki revolusi industri 4.0, pegawai pemerintah yang tidak produktif ini malah menjadi beban negara. Paling banyak memang di daerah, terutama kabupaten/kota pemekaran. Kalau di Jabodetabek misalnya Tangerang Selatan,



ANTARA/GALIH PRADIPTA

TES PEGAWAI NEGERI: Peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar untuk calon pegawai negeri sipil di Jakarta, Senin (17/2). Menurut Menpan dan Rebiro Tjahjo Kumolo, Kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah perlu dihitung kembali. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menjadi pegawai yang sangat diperlukan ketimbang ASN.

layanan publiknya tidak optimal,” tuturnya.

Masalah ketidaksiapan ASN beradaptasi dengan pola kerja masa pandemi, sempat pula digarisbawahi oleh Menpan Rebiro. Salah satu penyebab ketidaksiapan itu ialah rendahnya literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mengatasinya, menurut Tjahjo, perlu perumusan ulang sistem manajemen ASN. “Kita harus mengubah sistem perencanaan dan pengadaaan ASN. Sistem perencanaan pegawai ASN, baik pegawai negeri maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus disesuaikan,” terang Tjahjo melalui siaran pers di Jakarta, pada Kamis (25/6).

Perumusan ulang itu antara lain dengan mengubah susunan formasi kebutuhan kompetensi ASN dalam rekrutmen. Abdi negara yang direkrut harus seusia

dengan kebutuhan pemerintah, yakni ASN yang piawai mengelola dokumen-dokumen berbentuk digital, memiliki mobilitas yang tinggi, dan kemampuan dalam berkomunikasi.

Selain itu, menurut Tjahjo, jumlah kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah perlu dihitung kembali. PPPK akan menjadi pegawai yang sangat diperlukan ketimbang ASN. Untuk itu, perlu adanya fleksibilitas rekrutmen pegawai kapan pun pemerintah membutuhkan.

Pola kerja

Dalam kaitan ASN kurang produktif di masa pandemi, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan mestinya pelayanan publik tetap berjalan normal. ASN yang bertugas dapat mengikuti pola kerja sif atau bergiliran.

Selain itu, pekerjaan administrasi dilakukan secara

daring. Ia juga mengingatkan ASN menjadi golongan yang rentan terpapar virus covid-19 apalagi ketika berkantor di zona daerah dengan risiko tinggi.

“Kami mengimbau ASN tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun kerja sif dan menaati protokol kesehatan covid-19. Pemerintah juga memberikan subsidi masker,” tutur Suaedy.

Penerapan pola kerja yang fleksibel bagi ASN selama pandemi diakui bisa berdampak pada pelayanan publik. Oleh sebab itu, menurut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan Rebiro Diah Natalisa, pihaknya mengevaluasi dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat.

Evaluasi di tengah pandemi disesuaikan dengan menerapkan teknologi serta sistem *desk evaluation* dan observasi lapangan untuk wilayah tertentu. *Desk evaluation* adalah evaluasi dengan

Sektor Pertanian Penggerak Perekonomian Nasional

PRESIDEN Joko Widodo pada setiap kesempatan selalu menitikberatkan masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tiga sektor strategis, yakni yakni sektor pangan, sektor energi dan sumber daya air.

Pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 ini, membangun Indonesia sebagai negara yang besar masih menempatkan sektor pertanian untuk memperkuat ekonomi dan pertahanan nasional. Apalagi saat ini pun, negara industri maju seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Jepang, menjadikan pertanian sebagai sektor andalan untuk menopang ekonomi mereka.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sangat menyadari betul hal ini. Pada berbagai kesempatan menegaskan bahwa urusan pangan adalah tugas utama negara sebab negara berkewajiban untuk menyediakan makan rakyat 267 juta jiwa. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa SYL ini telah mence-tuskan moto ‘pertanian yang maju, mandiri dan modern’ agar pertanian Indonesia dalam tantangan apapun tetap berproduksi dan turut menyediakan pangan untuk negara-negara lainnya sehingga pertumbuhan perekonomian nasional ditopang dari sektor pertanian.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan pertanian yang maju, mandiri dan modern, langkah awal yang dilakukan SYL ialah membangun koordinasi dan konsolidasi dengan semua kementerian/lembaga agar saling menunjang atau tidak adanya ego sektoral dalam membangun pertanian dan kesejahteraan petani itu sendiri. Kemudian, peran Kementerian Pertanian harus selalu hadir di sisi para petani dan mendorong daerah untuk meningkatkan produksi pangan.

SYL juga membangun Agricultura War Room (AWR) untuk memudahkan dan mempercepat melakukan monitoring dan menyelesaikan persoalan pertanian di lapangan.

SYL pun menyadari betul keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan penggunaan benih dan teknologi. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) didorong berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menggunakan seluruh kekuatannya menemukan hasil riset baru, varietas-varietas baru, dan cara-cara bertani baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. “Dengan teknologi dan inovasi terbaru, pertanian bisa lebih efektif dan efisien, bahkan didorong untuk menopang kebutuhan pangan, ekspor, dan industri pertanian yang terus bergerak maju,” demikian tegas SYL di Jakarta.

Alhasil, walaupun pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 dihadapkan pada tantangan besar, yakni pandemi covid-19, kebijakan dan program pembangunan perta-



DOK KEMANTAN

nian mampu menorehkan capaian gemilang. Bahkan, sektor pertanian menjadi sektor penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya terhadap PDB kuartal II 2020 sangat tinggi, di tengah PDB nasional dan sektor lainnya justru turun.

Padahal, hampir semua negara di dunia merasakan begitu hebatnya dampak pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan. Bahkan, sampai muncul isu akan terjadinya krisis pangan akibat terbatasnya aktivitas produksi dan distribusi karena adanya pembatasan sosial. Namun demikian, tidak berpengaruh terhadap penyediaan pangan di Indonesia.

Pertama, kebijakan dan program yang dijalankan Menteri SYL berhasil menggenjot produksi 11 komoditas pangan strategis. Berdasarkan data Kementan-BPS tentang perkiraan ketersediaan pangan pokok nasional, ketersediaan 11 komoditas pangan nasional hingga akhir 2020 untuk beras putih 192.808 ton, cabai besar 16.791 ton, cabai rawit 38.128 ton, daging sapi/kerbau 242.360, daging ayam 282.140, gula pasir 1,5 juta ton dan minyak goreng tersedia 7,3 juta ton.

“Untuk mempertahankan kecukupan stok beras sampai Desember 2020, Kementan telah melakukan akselerasi tanam padi musim tanam II sebesar 5,6 juta hektar dengan menggerakkan seluruh komponen sumber daya yang didukung oleh ketersediaan air yang cukup di sentra produksi dan wilayah lainnya,” kata Syahrul.

Kedua, BPS mencatat inflasi pada Mei 2020 berada pada posisi rendah yakni angka 0,07%. Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi permintaan pangan untuk Hari Raya Idul Fitri menjadi kunci penentu penurunan inflasi tersebut.

Ketiga, di masa pandemi covid-19 pun

sektor pertanian mampu meningkatkan daya beli petani. BPS mencatat Nilai Tukar Pertanian (NTP) pada subsektor peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,27% atau 96,66 pada Mei 2020. Padahal sebelumnya, NTP subsektor peternakan tercatat hanya 96,40. Selanjutnya pada Juli 2020, NTP kembali mengalami kenaikan yang cukup tajam, bahkan angkanya mencapai 100,09 atau naik 0,49% jika dibanding dengan NTP sebelumnya.

Keempat, BPS mencatat nilai ekspor produk pertanian pada April 2020 tumbuh sebesar 12,66% dan nilai ekspor pada Juni tumbuh tingi sebesar 18,9% dibanding dengan NTP sebelumnya.

Selama, BPS mencatat ekspor pertanian April 2020 sebesar US\$0,28 miliar atau tumbuh 12,66% dibanding periode yang sama pada 2019 (YoY). Selanjutnya, sektor pertanian tetap mencatatkan kinerja cemerlang dengan menorehkan pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor lainnya pada kuartal II 2020.

Pada kuartal II 2020, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan pencapaian 16,24% (q to q) dan secara *year on year* (y-o-y) sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%. Padahal, pandemi covid-19 belum juga usai dan sejumlah sektor lain pun masih cenderung terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sampai 4,19% (q to q) dan 5,32% (y-o-y). Capaian sektor pertanian tersebut ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23% (yoy).

“Kalau begitu, untuk bisa *survive* dan menghadapi manusia di dunia adalah kita harus memajukan pertanian. Tentu saja (pertumbuhan positif) kita tidak akan berakhir di triwulan kedua, jangan sampai triwulan kedua

naik, triwulan ketiganya bisa anjlok ke bawah,” ungkap SYL.

Ia mengatakan di kuartal ketiga selain tetap melakukan penguatan subsektor tanaman pangan, pihaknya juga akan mendorong penguatan pada subsektor hortikultura. Subsektor yang berhubungan dengan sayur dan buah-buahan ini diyakini bisa menopang kinerja positif lantaran kebutuhannya di masyarakat masih tinggi. Ia pun mendorong agar ekspor hortikultura juga meningkat.

“Selain itu, juga mendorong subsektor perkebunan yang akan menjadi penyokong (*back up*) seperti tanaman kopi, coklat, kelapa, kakao dan produk turunannya. Demikian juga subsektor peternakan yang diharapkan pada kuartal keempat akan lebih baik kinerjanya,” jelasnya.

Kontribusi cemerlang sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini mendapat apresiasi dari mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih. Pasalnya, berturut-turut di 2020, yakni pada kuartal I dan II, pertumbuhan PDB sektor pertanian positif, bahkan pada kuartal II menjadi satu-satunya sektor di antara lima lapangan usaha penopang PDB yang tumbuh positif. Menurutnya, pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 2,19% (y-o-y) menandakan adanya dampak positif di sisi hulu, hilir, bahkan jasa penunjang pertanian.

“Kalau agroindustri pertanian juga harus dikelola secara terintegrasi, mulai dari hulu, *on farm*, sampai hilir. Jika ini bisa dilakukan dengan baik maka pembangunan pertanian akan mampu menyumbang dan berdampak sangat besar terhadap pembangunan perekonomian nasional dan terutama penyediaan pangan. Pertanian adalah sektor yang sangat-sangat penting, bukan hanya pada saat covid ini, tapi saat *post* (setelah) covid juga,” jelas Bungaran.

Sementara itu, pengamat ekonomi dan kebijakan pertanian, Prof Pantjar Simatupang menilai pertumbuhan PDB subsektor tanaman pangan 9,23% ini merupakan tertinggi selama tiga tahun terakhir, juga karena pergeseran musim dan sekaligus menunjukkan pangan Indonesia kuat disaat pandemi covid 19.

Ia pun menekankan Kementan sangat memahami dampak pandemi covid-19 pada tatanan pembangunan pertanian, terutama terhadap petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. “Dimasa pandemi covid-19, Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menjalankan program dan kebijakan berorientasi pada kesejahteraan petani khususnya di masa panen harga yang diterima petani selalu di pantau,” kata Prof Pantjar. (S1-25)



MIS/SUSANTO

PELIBATAN PASUKAN TNI: Prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut mengawal Kapal Landing Craft Utility (LCU) KRI dr Soeharso yang mengangkut awak kapal World Dream untuk menjalani observasi kesehatan terkait dengan covid-19 menuju dermaga Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (28/2).

Militer Melawan Teroris hingga Wabah Penyakit

PERAN TNI semakin besar. Pada masa pandemi pun TNI sampai dikerahkan untuk ikut mendisiplinkan warga agar patuh menaati protokol kesehatan.

Bukan itu saja, di saat yang sama TNI segera mendapatkan kewenangan menangani terorisme, mulai dari pencegahan. Namun, seperti biasa, pelibatan TNI di bidang-bidang yang dianggap di luar ‘bisnis inti’ kerap menimbulkan kontroversi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan seluruh penugasan TNI selalu berdasarkan payung hukum yang kuat. Itu demi memastikan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal yang menyalahi ketentuan.

“TNI itu menurut konstitusi tugasnya dalam bidang pertahanan. Namun, banyak tugas selain perang juga ada yang diatur dalam bingkai hukum. Tidak bisa ada tugas selain perang yang tidak diatur dalam bingkai hukum. Oleh sebab itu, kita persiapkan aturan-aturan yang bisa menjamin tidak terjadi eksektivitas dalam pelaksanaannya,” kata Mahfud kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Mahfud menjelaskan TNI diperintahkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 untuk membantu kepolisian menangani terorisme. Pemerintah pun telah merampungkan peraturan presiden (perpres) yang berisi pemberian kewenangan TNI untuk terlibat menangani aksi terorisme.

“Rancangan perpres pelibatan TNI dalam aksi terorisme itu sudah dibahas, sudah mendengarkan semua. Kita sudah mendengarkan semua *stakeholders* dan kita sudah mengambil kesimpulan,” ungkapnya.

Mahfud menekankan TNI hanya akan turun tangan untuk penanganan aksi

terorisme. Adapun penegakan hukumnya tetap dilakukan kepolisian.

Dalam hal pelibatan TNI untuk pendisiplinan protokol kesehatan, Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019 pun diterbitkan.

Mahfud mengatakan titik tekan dari penerbitan Inpres 6/2020 hanya untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pasalnya, kendati pemerintah telah berupaya keras dengan berbagai kebijakan, penularan covid-19 masih terus meningkat akibat disiplin rendah.

Dua tugas baru TNI tersebut menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil. Dalam penyusunan perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme, misalnya, pemerintah kurang membuka ruang dialog.

Aturan itu dikhawatirkan akan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. “Jsi poin perpres ini nantinya memberikan kewenangan yang luas dan berlebihan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk membahas rancangan perpres tersebut secara terbuka,” kata Direktur Imparsial AI Araf.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun mengkritik pendisiplinan mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan militer. Pemerintah dipandang lebih memilih pola pendisiplinan-represif ketimbang menggunakan kebijakan berbasis saintifik ilmu kesehatan masyarakat.

Atas kekhawatiran sikap represif TNI tersebut, DPR menjanjikan akan mengawasinya dengan ketat. (Cah/P-2)



Mengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN

REPUBLIK INDONESIA

KE-



INDONESIA
MAJU



Sesuai Standarisasi
YY 0469-2011 Medical Surgical Masks



MENUJU INDONESIA MAJU

Mengurai Macet dengan Teknologi

Apabila masyarakat mampu mengubah kebiasaan dan beralih menggunakan transportasi umum, niscaya Jakarta akan terbebas dari belenggu macet.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

BUKAN menjadi rahasia lagi menyebut macet sebagai masalah klasik di Ibu Kota. Seperti halnya prinsip kausalitas, faktor utama penyebab kemacetan ialah kapasitas ruas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan volume kendaraan.

Para pemangku kepentingan sejatinya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Contohnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang terus melaksanakan patroli rutin serta memetakan titik-titik rawan macet untuk menempatkan personel.

Namun, metode konvensional itu justru belum cukup bagi kota sebesar Jakarta. Oleh sebab itu, penanganan kemacetan juga perlu menggunakan teknologi modern yang selanjutnya terejawantahkan ke dalam ruang Traffic Management Center (TMC).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan TMC merupakan pusat komando, kendali, komunikasi, dan informasi (K3I). “Di TMC itu ada CCTV, kemudian ada media sebagai pusat informasi, menerima informasi dari anggota dan masyarakat, serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat,” ujar Sambodo di Markas Polda Metro Jaya, Sabtu (8/8).

Dengan memanfaatkan CCTV yang ada, operator di ruang TMC dapat memonitor kemacetan sehingga penerjunan petugas ke lapangan jadi lebih efisien. Selain itu, Ditlantas PMJ juga menampung informasi soal titik kemacetan yang berasal dari masyarakat melalui kanal media sosial.



M/FRANCISCO CAROLIO HUTAMA GANI

TEKNOLOGI E-TLE: Petugas *back office* e-TLE Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menganalisis pelanggaran roda dua di Gedung Regional Traffic Management Center (TMC), Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (28/1). Dengan teknologi kamera *electronic traffic law enforcement* (e-TLE) kemacetan lalu lintas dan pelanggaran dapat terpantau secara akurat dan efektif.

Informasi mengenai kondisi lalu lintas yang diterima polisi kemudian kembali disebarkan ke masyarakat. Sejauh ini, terang Sambodo, ada 10 stasiun radio yang telah bekerja sama dalam menyiarkan situasi arus lalu lintas terkini.

Selain TMC, ada pula teknologi *electronic traffic law enforcement* (e-TLE). Meski dikenal sebagai terobosan dalam penegakan hukum, tanpa disadari e-TLE ikut berkontribusi untuk mengurangi kemacetan. “E-TLE itu fungsinya untuk meningkatkan disiplin masyarakat, sehingga terjadi pengurangan pelanggaran lalu lintas. Dengan berkurangnya pelanggaran, tentu kemacetan dan kecelakaan berkurang.”

Merdeka dari kemacetan bukanlah satu hal utopis. Sederhananya, Jakarta dapat terbebas dari macet apabila masyarakat mampu mengubah kebiasaan menggunakan transportasi umum. Menurutnya, tetap diperlukan pelbagai langkah revolusioner untuk merealisasikan tujuan tersebut.

“Misalnya, biaya parkir yang mahal, pajak yang mahal, sehingga orang lebih memilih menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi. Dengan syarat kendaraan umum sudah sangat bagus dan menjangkau seluruh pelosok di Jakarta,” ujar dia.

Program pengendalian

Sejak September 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor polisi di 25 ruas jalan. Kebijakan ganjil genap (gage) tersebut cukup efektif mengurai macet, khususnya pada jam sibuk di pagi dan sore hari.

“Kalau dari sisi penguraian kemacetan sangat efektif. Dengan adanya gage volume lalu lintas bahkan turun sampai 42%,” ungkap Sambodo.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan kebijakan gage tidak hanya untuk mengendalikan macet. Tujuan lain ialah membatasi pergerakan warga di masa pandemi guna mencegah

wabah korona meluas.

Selain gage, lanjut Syafrin, Pemprov DKI terus berupaya melaksanakan program lain untuk mengurangi macet, seperti penambahan armada Trans-Jakarta, penataan sembilan kawasan stasiun guna mengintegrasikan angkutan KRL dan angkutan lainnya, serta pengembangan jalur sepeda.

Secara terpisah, pengamat transportasi Djoko Setidjowarno menilai program pengendalian kemacetan di Jakarta masih terbaik se-Indonesia. “Saat ini Jakarta program pengendalian kemacetannya yang terbaik. Selain penataan angkutan, integrasi antar modanya juga sangat diperhatikan,” tukas Djoko.

Di sisi lain, imbuhnya, program pengendalian kemacetan dari pembatasan kendaraan pribadi seharusnya tidak lagi dengan aturan ganjil genap. Program jalan berbayar atau *electronic road pricing* (ERP) paling efektif. Polisi tidak perlu kucing-kucingan mengawasi pelat motor. (Put/J-2)

Layanan Transportasi Umum Membaik

RENCANA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menargetkan adanya integrasi pembayaran antarmoda transportasi di Ibu Kota pada tahun depan dinilai tepat. Demikian dikatakan Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andriano, Rabu (12/8). Menurutnya, wajah transportasi umum di Jakarta jauh lebih baik dan ada peningkatan selama setahun belakangan. Layanan Mikrotans Jak Lingko, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pun bisa jadi alternatif untuk berpindah dari transportasi pribadi.

“Pandangan kami sudah ada perbaikan jauh lebih baik, bahkan Jak Lingko sudah bagus. Banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi dari tahun ke tahun,” kata Wibi.

Jak Lingko telah dipercaya untuk mengelola pengintegrasian tarif dan tiket empat moda transportasi di Jakarta, yaitu MRT, Trans-Jakarta, KAI, dan LRT.

Terpisah, Direktur Operasional PT Trans-Jakarta Prasetya Budi menuturkan pihaknya berupaya melakukan upaya seoptimal mungkin untuk mengurai antrean penumpang di masa pandemi.

“Kami mengoptimalkan armada yang ada seperti dengan tidak lagi terpengaruh terhadap standar pelayanan minimum (SPM). Misalnya, agar bisa melayani penumpang dengan baik dan mengikis antrean penumpang karena *physical distancing*, waktu kedatangan bus bisa dipercepat.”

Saat ini ada 1.941 armada yang diterjunkan untuk mengangkut penumpang termasuk di koridor, rute pengumpan, dan untuk melayani rute-rute mikrotans. Program untuk memancing minat masyarakat berpindah ke angkutan umum seperti bus listrik juga sedang tahap uji coba.

Senada disampaikan Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin. Ia membeberkan PT MRT terus menambah pelayanan dan menciptakan integrasi yang baik di setiap wilayah Ibu Kota. “Tentu kami optimistis bahwa MRT menjadi moda transportasi masa depan,” ujarnya.

Seluruh jalur MRT sepanjang 16 kilometer tersambung antara jalur layang hingga bawah tanah dari Lebak Bulus-Bunderan HI. (Ins/Put/Sru/J-2)

Bimas Hindu Kemenag Utamakan Komunikasi dan Pembangunan SDM

JUMLAH umat Hindu di Indonesia memang tidak besar tetapi umat Hindu diyakini bisa memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat sekitar dan negara. Karena itu, ke depan Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama (Kemenag) bakal menekankan moderasi beragama yang berkualitas.

Demikian disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kemenag Tri Handoko Seto saat memaparkan visinya kepada Media Indonesia, Rabu (12/8). Tri Handoko Seto dilantik Menteri Agama Fahcrul Razi menjadi Dirjen Bimas Hindu menggantikan I Ketut Widnya di Kemenag, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Tri, tingkat toleransi umat Hindu sangat baik, meski pada saat yang sama masih dapat ditingkatkan dengan mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ada sejumlah tantangan guna menciptakan umat Hindu berkualitas seperti tingkat pendidikan umat Hindu yang masih rendah.

“Akses pendidikan umat Hindu belum begitu besar dan kita juga masih perlu meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Hindu yang masih rendah,” kata Tri.

Tantangan lainnya ialah pembinaan umat di wilayah Indonesia yang amat luas. Dengan jumlah umat Hindu yang tidak banyak dan tersebar di berbagai wilayah, membuat pembinaan bukan hal mudah. “Jadi, butuh kerja keras dan harus diperjuangkan ke depannya,” tutur dia.

Dalam kaitan isu gesekan antarumat beragama, Tri melihat persoalan itu berakar pada komunikasi dan pemahaman masyarakat atas praktik keagamaan Hindu. Menurutnya, Hindu merupakan agama yang berkaitan erat dengan budaya sehingga seringkali umat hindu melaksanakan



DOK BIMAS HINDU

Dirjen Bimas Hindu, DR Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc.

ritual yang tidak banyak diketahui umat lain dan akhirnya memunculkan gesekan.

“Karenanya kita harus mensosialisasikan budaya-budaya dalam Hindu agar masyarakat mengetahui apa saja terkait agama Hindu dan praktik keagamaannya. Tentu bila diperlukan kami akan memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan. Saya rasa pendekatan terbaik ialah komunikasi yang baik untuk menyelesaikan persoalan,” terang Tri.

Begitu juga untuk pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah harus sesuai ketentuan dan prosedur yang ada. Hal pertama yang harus dikaji ialah tingkat kebutuhan dan sejauh mana urgensi kebutuhan dari rumah ibadah itu. Terkait rumah ibadah yang sudah dibuat dan akan direnovasi atau ditingkatkan kapasitasnya, juga perlu dilakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar terlebih dahulu.

“Kita harus tunjukkan keberadaan tempat ibadah bukan ancaman. Tantangan

besar umat Hindu ialah menunjukkan keberadaan umat Hindu bukan ancaman bagi umat lain, tapi justru bermanfaat,” terang Tri.

Karena itu, pihaknya membuat program kegiatan berbasis masyarakat sekitar seperti kegiatan bakti sosial dan kegiatan masyarakat lainnya.

Hal lainnya yang juga diperhatikan dalam pendirian rumah ibadah ialah kelengkapan dari perizinannya untuk memberikan rasa aman. “Jangan sampai perizinannya tak lengkap sehingga memunculkan celah,” ujar Tri.

Tri meyakini umat Hindu memiliki value yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada masyarakat Bali sebagai contoh. Umat Hindu di Bali dapat berkontribusi hingga level dunia dengan kebudayaannya.

Kebudayaan yang kuat, filosofi kehidupan yang menarik hingga toleransi yang tinggi mengundang berbagai turis dari mancanegara. Mereka datang ke Bali bukan hanya menikmati keindahan alam, tapi juga menikmati kebudayaan Bali dan kedamaian

yang diberikan. “Ini harus kita tiru agar daerah lain juga menonjolkan budaya, toleransi dan perilakunya. Ini diharapkan jadi kontribusi dari umat Hindu,” terangnya.

Ia juga menghimbau agar umat Hindu tolong menolong dan bahu membahu menyelesaikan permasalahan umat secara bersama. “Umat Hindu pun harus pandai mengakses sumber daya alam untuk memberikan kemakmuran diri sendiri dan masyarakat,” ucap Tri.

Berlandaskan nasionalisme

Dalam hubungan antar umat beragama, khususnya dengan pemuka agama lain, Tri meyakini hal itu harus dibangun dengan berlandaskan rasa nasionalisme. Hubungan dengan umat beragama lain merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindarkan, terutama dengan kondisi Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya meyakini tokoh-tokoh umat beragama di Indonesia memiliki pemahaman nasionalisme yang sangat baik. Nasionalisme itu salah satu intinya adalah toleransi, sehingga saya meyakini para tokoh keagamaan lain memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa,” tutur Tri.

Untuk itu, komunikasi yang baik harus dibangun dengan efektif. Salah satunya dengan memanfaatkan forum-forum lintas agama. Ia yakin dengan sering membahas isu nasionalisme dan kebangsaan akan membuat semua pemuka agama memiliki satu visi sama untuk membangun bangsa.

“Bila semua sudah ada dalam rel sama, tentu perbedaan kecil tak perlu dibesar-besarkan. Justru semua harus sibuk membangun kebersamaan karena tentu setiap agama memiliki persamaan,” tutup Tri. (Dro/S3-25)

Beralih Kendaraan Lebih Nyaman

RIFI Faris, 26, kapok menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi menuju kantornya di bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Ia mengaku penat karena saban hari harus menembus macet yang menguras energi.

Solusi pun ditemukan. Warga Taman Sari, Jakarta Barat, itu luluh dan memilih transportasi umum untuk menjalankan rutinitasnya. Sejak September 2018, Rifi menjadi pelanggan setia bus Trans-Jakarta dan Kereta Moda Raya Terpadu (MRT).

Dari rumahnya, ia hanya butuh waktu lima menit berjalan kaki menuju Halte Sawah Besar, kemudian turun di Halte Bundaran HI dan berpindah ke MRT tujuan Stasiun Cipete. “Sekarang dari rumah ke kantor paling cuma 45 menit. Dulu waktu awal-awal naik motor bisa satu jam-an,” kata Rifi kepada *Media Indonesia*, Rabu (12/8).

Waktu seolah menjadi mata uang baru bagi kelas pekerja seperti Rifi. Pria yang bekerja di sebuah perusahaan agensi itu mengaku dengan memanfaatkan transportasi publik, pekerjaannya semakin dimudahkan.

“Di MRT saya bisa sambil kerja. Membalas *e-mail* ke klien atau *kelarin* kerjaan yang belum rampung. Kalau naik motor, enggak mungkin,” ujarnya.

Meski demikian, Rifi tidak dapat mengelak apabila ongkos yang dikeluarkan lebih banyak ketimbang naik sepeda motor. “Yang

penting saya sampai ke kantor enggak stres duluan sih di jalan. Artinya, enggak masalah kalau *ngeluarin* uang lebih,” kata dia.

Rifi berharap pembangunan MRT Koridor 1 menuju Ancol dapat terealisasi dengan cepat. Ia sudah membayangkan bagaimana mudahnya berangkat dari rumah menuju kantor.

Keputusan menggunakan transportasi umum sebagai pilihan pertama juga diambil Wening, 35. Tak ada alasan yang kuat bagi perempuan asal Bekasi itu untuk tetap menggunakan sepeda motor atau mobil ke Jakarta. “Belum sampai Jakarta saja macetnya sudah enggak karuan,” tutur Wening.

Baginya, ada dua pilihan transportasi umum ke Jakarta, yaitu bus dan kereta rel listrik (KRL). Namun, ia lebih memilih KRL karena jadwal keberangkatannya sudah jelas.

Sebelum 2017, Wening harus pergi ke Stasiun Bekasi apabila ingin menggunakan KRL. Kini, ia tidak perlu lagi repot-repot menuju ke sana karena PT Kereta Commuter Indonesia telah mengoperasikan Stasiun Bekasi Timur seiring perluasan jangkauan hingga ke daerah Cikarang.

Ke depan, terang dia, diharapkan jarak tempuh KRL dari Stasiun Bekasi Timur lebih dipersingkat. Selain itu, Wening juga menginginkan adanya alternatif lain untuk menuju Jakarta. (Tri Subarkah/J-2)



M/SUSANTO

TRANSPORTASI MODERN: Para penumpang berada di gerbong moda raya terpadu (MRT) di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Keberadaan MRT sangat membantu aktivitas warga Jakarta dengan lebih cepat dan mampu mengurangi kemacetan.



Karpet Merah buat Pelaku UMKM

Kadin mencatat, 85,42% dari 59,2 juta pelaku UMKM di Indonesia diprediksi hanya mampu bertahan selama satu tahun di tengah pelemahan ekonomi akibat covid-19.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PELAKU usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 17 Agustus 2020, atau bertepatan dengan HUT ke-75 RI, bakal mendapat bantuan produktif untuk modal kerja sebesar Rp2,4 juta.

Tak tanggung-tanggung, penerima bantuan untuk tahap awal akan mencapai 9,1 juta pelaku UMKM. Anggaran Rp22 triliun pun disiapkan pemerintah.

'Karpas merah' memang layak diberikan buat pelaku UMKM mengingat sektor itu selama ini menjadi tulang punggung

perekonomian Indonesia. Sektor itu pula yang terbukti 'tahan banting' saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 dan 2008.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan kementeriannya telah menyiapkan sejumlah program agar UMKM tetap bisa bertahan dalam menghadapi krisis.

"Pertama, program stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Kedua, Program Belanja di Warung Tetangga guna memastikan bahan pokok tersedia dengan harga normal yang bekerja sama dengan sembilan BUMN klaster pangan. Program ini juga bekerja sama dengan *digital platform* agar proses pemesanan dapat diakses dengan mudah dan pengiriman pesanan yang mengedepankan *physical distancing*," ujar Teten, Rabu (8/4).

Lebih lanjut, program ketiga ialah restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Selanjutnya yang keempat ialah restrukturisasi kredit khusus bagi koperasi melalui LPDB-KUMKM. Program kelima ialah mendorong penyediaan masker untuk

tenaga medis dan masker kain untuk masyarakat umum melalui koperasi dan UMKM.

"Ini untuk mendukung gerakan penggunaan masker di masyarakat. Kemenkop dan UKM mengajak koperasi dan UMKM di daerah untuk memproduksi masker hingga mempertemukan dengan *offtaker*," sambung Teten.

Keenam, lewat Program Kartu Prakerja, Kemendiknas dan UKM memasukkan sektor mikro sebagai penerima insentif untuk pekerja harian. Ketujuh, bantuan langsung tunai. Program terakhir ialah relaksasi pajak bagi koperasi dan UMKM yang mencakup PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, dan restitusi pertambahan nilai.

Serapan dana PEN

Berdasarkan catatan Kemenkop dan UKM, realisasi penyerapan penempatan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan UMKM hingga 11 Agustus 2020 sudah mencapai Rp43,74 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 35,4% dari total pagu anggaran Rp123,46 triliun, atau naik 13,6%

jika dibandingkan dengan periode 6 Agustus 2020.

"Penyerapan anggaran itu melalui enam program, yaitu subsidi bunga KUR dengan nilai Rp845,23 miliar (13,87% dari Rp35,28 triliun), kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp42,13 triliun (53,47% dari total dana Rp78,78 triliun). Lalu ada belanja imbal jasa penjaminan (IJP) senilai Rp138,9 miliar (6,38% dari total dana Rp5 triliun)," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan.

Dua program lainnya ialah penjaminan untuk modal kerja dengan total dana Rp1 triliun dan program PPH final yang ditanggung pemerintah. Dua program itu akan diluncurkan dalam waktu dekat setelah selesainya proses pembuatan kerja sama dan identifikasi wajib pajak.

"Lalu untuk pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah berjalan sebesar Rp457 miliar (45,70% dari pagu Rp1 triliun)," kata Rully. (E-2)

Perjuangan Merah Putih untuk Kemerdekaan Palestina

Indonesia mengecam keras dan menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.

HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com

KEMERDEKAAN Palestina masih dan akan terus menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Isu ini terus dibawa Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Diplomasi Indonesia diuji agar tetap konsisten untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tengah dinamika yang tidak menentu di DK PBB.

Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi. Pemerintah menyatakan penyelesaian masalah Palestina harus berlandaskan prinsip 'solusi dua negara' yang menghormati hukum internasional dan parameter yang telah disepakati dunia internasional.

Dalam sebuah pernyataan mengenai perkembangan terkini di Palestina, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintahan Indonesia mendorong dihidupkannya kembali dialog yang melibatkan para pihak demi tercapainya stabilitas dan perdamaian abadi.

Indonesia mengecam keras dan menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut," ujar Kemenlu dalam sebuah pernyataan resmi yang dilansir di situs web kementerian.

Selanjutnya, di hadapan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara anggota untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak tindakan aneksasi Israel.

"Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara *de facto* ataupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima," tegas Retno dalam Konferensi



DOK. KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

KONFERENSI OKI: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara di Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung secara daring, Rabu (10/6). Menlu mengajak OKI bersatu menolak rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel dan menegaskan bahwa aneksasi wilayah Palestina oleh Israel, baik secara *de facto* maupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima. Konferensi yang dipimpin Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI, membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.

Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI yang dipimpin Arab Saudi, Juni lalu.

Sebelum pelaksanaan KTM-LB, Indonesia menggalang dukungan internasional untuk Palestina, di antaranya melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel.

Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan DK ini di tingkat menteri guna membahas rencana aneksasi Israel. Retno menekankan terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel, yakni seluruh pihak berdiri sejajar.

"Ini waktu yang tepat untuk memulai proses kerangka dalam rangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati," ia

menegaskan.

Menlu Retno juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, termasuk pengungsi Palestina.

Indonesia bersama Tunisia berhasil mendorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas di New York, 11 Februari.

"Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak dan memengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani. Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan OKI.

Keadilan bagi Palestina

Pada pertemuan, Indonesia sampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.

Indonesia menyuarakan pembelaan dan dukungan bagi Palestina dalam debat terbuka DK PBB secara virtual pada April untuk membahas kondisi terkini di kawasan Timur Tengah.

Dubes Djani mendesak DK PBB segera menghentikan rencana Israel untuk lakukan aneksasi formal wilayah Palestina dan kegiatan pembangunan permukiman ilegal yang merupakan bentuk aneksasi senyap Israel terhadap tanah Palestina di tengah merebaknya covid-19.

Djani juga ingatkan kewajiban Israel sebagai *occupying power* sesuai hukum internasional ialah untuk melindungi dan

Diplomasi Ekonomi Menunjang Peluang Investasi

KEMENTERIAN Luar Negeri RI beserta perwakilan-perwakilan di luar negeri terus berupaya melakukan diplomasi ekonomi demi menarik minat investor luar negeri. Adanya kendala pandemi salah satunya diatasi dengan memanfaatkan media virtual sebagai sarana promosi.

Wakil Menlu Mahendra Siregar mengatakan peluang mendatangkan investor dan memperluas jangkauan industri dalam negeri terbuka luas selama pandemi. Pasalnya, rantai pasok barang dunia tidak dapat terpusat di satu negara karena terlalu berisiko.

"Sebelum pandemi, perusahaan dan negara hanya mengandalkan rantai pasok dunia pada basis efisiensi dan daya saing. Akibatnya, banyak rantai pasok bertumpu pada satu negara. Pandemi covid-19 membuktikan struktur rantai pasok seperti itu sangat berisiko," ungkap Mahendra, beberapa waktu lalu.

Ditambahkannya, Indonesia harus memanfaatkan kebutuhan pelaku industri yang ingin mendiversifikasi atau membangun tempat usaha agar tidak terpusat di satu negara. Indonesia bisa meningkatkan posisinya agar lebih strategis untuk rantai suplai industri global ke depan.

Sementara itu, staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemenlu, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, mengatakan upaya menarik investasi asing juga terus dilakukan seluruh perwakilan RI di luar negeri. Bersama mitra strategis di masing-masing negara, perwakilan RI terus mempromosikan peluang investasi di Tanah Air. "Dubes kita di luar negeri jelas karena mereka juga bagian dari usaha kita menarik investor asing itu," ungkapnya.

Kemenlu sudah membentuk Tim

Peluang mendatangkan investor dan memperluas jangkauan industri dalam negeri terbuka luas selama pandemi. Pasalnya, rantai pasok barang dunia tidak dapat terpusat di satu negara karena terlalu berisiko.

Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) yang bertugas memetakan potensi dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah pandemi. TPPE menekankan pada kecepatan proses, terutama dalam urusan birokrasi, agar peluang ekonomi di masa sulit ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Khusus terkait dengan industri kesehatan, TPPE diharapkan dapat bergerak cepat untuk mendukung industri dalam negeri menjadi pemain global selama pandemi.

Promosi peluang

Promosi terkait dengan peluang investasi di Tanah Air, misalnya, dilakukan Kedutaan Besar RI untuk Inggris di London. Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI London, Adam M Tugio, mengatakan pihaknya terus berupaya meyakinkan investor dan calon investor di Inggris terkait dengan situasi ekonomi dan politik Indonesia. Begitu pula dengan potensi yang akan diperoleh investor dari berbagai peluang dan



ANTARA/RAISAN AL FARISI

INVESTASI UEA DI PLTS CIRATA: Foto udara bendungan Waduk Cirata di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (3/1). Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan pengembang energi terbarukan asal Uni Emirat Arab (UEA) dan Masdar akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung pertama di Indonesia di Waduk Cirata dengan kapasitas 145 megawatt yang digadang-gadang akan menjadi PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara.

kemudahan investasi yang ditawarkan Indonesia di masa pandemi ini.

KBRI London juga terus menjaga komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan konsisten berkomunikasi melalui *e-mail* ataupun tatap muka. Kegiatan daring atau virtual menjadi fitur utama kegiatan promosi investasi yang dilakukan KBRI bersama Indonesia

Investment Promotion Center (IIPC) London.

"Aktivitas promosi, seperti forum dan misi bisnis, *business matching*, dan *one-to-one meeting* terus diupayakan dilakukan secara daring dengan skala yang lebih luas, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan *stakeholders* strategis di Inggris," kata Adam.

menyediakan peralatan dan fasilitas serta akses kesehatan bagi warga Palestina, termasuk menghentikan blokade terhadap Jalur Gaza.

Kepedulian lainnya ada pada pengungsi Palestina. Ada lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang tinggal di beberapa negara. Ada satu badan PBB yang ditugasi untuk mengurus para pengungsi ini yang disebut United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Namun, pada perkembangan terakhir ada beberapa negara yang menurunkan dukungan finansialnya kepada UNRWA ini.

Indonesia berusaha untuk memberikan kontribusi lebih kepada UNRWA. Pemerintah pun memberikan kontribusi 20 kali lipat lebih banyak dari kontribusi awal yang sudah diberikan. Ini betul-betul merupakan satu sinyal yang kuat, mengenai Indonesia. 'Merah Putih' jelas untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Indonesia terpilih kembali menjadi Wakil Ketua Komite Palestina PBB/ CEIRPP (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People) untuk periode 2020.

Dukungan masyarakat Indonesia untuk masyarakat Palestina juga terus mengalir. Misalnya, lembaga medis global asal Tanah Air MER-C membangun rumah sakit di Gaza. Majelis Ulama Indonesia menekan kesepakatan dengan pemerintah Kota Hebron untuk membangun rumah sakit di sana.

Apresiasi dukungan Indonesia

Rakyat dan pemerintah Palestina sangat mengapresiasi sikap Indonesia yang aktif dan konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan. Bahkan, Indonesia memutuskan tetap tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, menyatakan Indonesia menunjukkan posisi yang jelas dalam bersikap, termasuk masalah aneksasi yang akan dilakukan Israel.

Ia mengaku sangat senang dan terharu melihat totalitas dukungan luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkait dengan semua isu yang berkenaan dengan Palestina.

"Ikatan persahabatan Palestina dan Indonesia merupakan ikatan yang sangat erat, ikatan ukhuwah yang sampai kapan pun akan terus terjalin dan diperkuat," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertajuk Pernyataan Bersama Anggota Parlemen Berbagai Negara Menentang Aneksasi Israel terhadap Wilayah Palestina di Media Center MPR/DPR, awal Juli lalu.

Ia mengaku dirinya merasakan dukungan yang diberikan Indonesia sampai ke pelosok Tanah Air.

Dukungan yang diberikan selama ini oleh pemerintahan Indonesia dinilai berarti bagi pemerintahan dan warga Palestina, terutama di tengah upaya terbaru Israel untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat. (I-1)

Menata SDM Unggul melalui Merdeka Belajar

Fondasi pendidikan nasional yang telah diletakkan Bapak Bangsa harus digali lagi setelah lama terpendam kepentingan politik praktis yang membelenggu.

SYARIEF OEBAIDILLAH
oebay@mediaindonesia.com

ADANYA anggapan bahwa prestasi pendidikan nasional berjalan di tempat perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti. Sejarah memang mencatat, prestasi dunia pendidikan Indonesia yang pernah berada di urutan teratas di antara negara-negara tetangga kini tidak lagi.

Salah satu penyebabnya ialah pemerintah selama ini tidak berani membuat terobosan yang mampu melompati prestasi pendidikan lebih jauh. Wajar jika negara-negara tetangga menyulapnya.

Begitu dilantik di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim langsung mencanangkan program Merdeka Belajar. Jika merunut ke belakang, konsep Merdeka Belajar sudah dijalankan Bapak Pendidikan Ki Hadjar Dewantara saat mengelola Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta, sebelum Indonesia merdeka (1922).

Menghidupkan kembali napas pendidikan di era kekinian tidaklah mulus. Ada pro dan kontra. Tentu itu sebagai hal yang wajar saja.

Merdeka Belajar diyakini sebagai awal

untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton.

Merdeka Belajar menjadi salah satu program yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru.

Dalam kaitan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan Merdeka Belajar pada dasarnya adalah tema besar transformasi pendidikan yang dicanangkan Kemendikbud dan berfokus memerdekakan para pelaku pendidikan, seperti guru, siswa, mahasiswa, dan sekolah.

“Benang merah dari pokok-pokok kebijakan tersebut ialah berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran itu sendiri yang mungkin selama ini terhambat masalah birokrasi, administrasi, dan lain-lain,” ungkap Hetifah kepada *Media Indonesia*, Rabu (12/8).

Hetifah mengutarakan visi utama yang dikejar adalah profil pelajar Pancasila, yakni siswa tidak hanya cakap dalam literasi dan numerasi, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai Pancasila, serta terbangun mewujudkan sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul pemilik masa depan Indonesia.

“Saya mengapresiasi Kemendikbud yang terlepas dari segala keterbatasan ini dapat bergerak sangat cepat menyesuaikan



ANTARA/APRILIO AKBAR

MERDEKA BELAJAR: Pelajar mengamati globe di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (18/2). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang di dalamnya memuat kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

dengan keadaan dan melakukan upaya-upaya agar pembelajaran yang kreatif dan inovatif tetap berjalan baik,” cetusnya.

Dicontohkan, langkah positif yang dilakukan Kemendikbud seperti terus mengadakan webinar-webinar di saat pandemi covid-19 ini bagi para guru-guru di seluruh Indonesia. Tujuannya agar dapat mengajar dengan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan lebih baik.

Otonomi pendidikan

Program Merdeka Belajar ini seharusnya selaras dengan semangat otonomi daerah yang diatur di UU No 33 Tahun 2004. Sektor pendidikan yang kini merupakan

kewenangan penuh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa sejalan dengan program pusat.

Hal itu tentu saja memerlukan dukungan *political will* yang kuat dari pimpinan daerah agar rutinitas yang terbukti telah membelenggu perjalanan pendidikan nasional bisa berakhir.

Peluang itu secara alamiah terjadi saat awal 2020 pandemi covid-19 melanda dunia. Di tengah suasana yang tidak menentu tersebut tentu ada hikmah yang bisa diambil di dunia pendidikan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyebut banyak hikmah yang bisa diambil, termasuk pembentukan karakter dalam program Merdeka Belajar yang

diusungnya.

“Hikmah dari pandemi ini menjadikan kita karakter yang adaptif, inovatif, dan kreatif. Perubahan struktural ini akan mendorong percepatan filsafat Merdeka Belajar,” kata Nadiem, belum lama ini.

Menurut dia, karakter itu akan mengantarkan dunia pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Nadiem menegaskan pendidikan harus menjadi sebuah pengalaman menyenangkan untuk mencapai kemerdekaan belajar yang sesungguhnya.

Di tengah pandemi virus korona ini, dia pun berharap semangat Merdeka Belajar menjadi sebuah solusi pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul. (H-1)



ANTARA/MAULANA SURYA

CEGAH STUNTING: Anggota Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Solo menyiapkan bingkisan berisi telur saat sosialisasi kepada warga di Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/8). Sosialisasi yang diisi praktik memasak dan pembagian telur tersebut bertujuan edukasi warga mengenai makanan bergizi guna mendukung pemerintah dalam pencegahan *stunting* dan gizi buruk anak terutama saat pandemi covid-19.

Perang Melawan Stunting di Masa Pandemi

TARGET pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* hingga 14% pada 2024 menemui tantangan di masa pandemi covid-19 ini. Inovasi dan intervensi di aspek-aspek krusial harus segera dilakukan untuk menghadapinya.

Berdasarkan Riskesdas 2018, angka *stunting* di Indonesia ada di kisaran 30,8%. Jika skenario intervensi yang dilakukan masih biasa-biasa saja, analisis Kebijakan Ahli Utama Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Siswanto mengkhawatirkan angkanya malah naik.

“Untuk menjadi 14%, skenario luar biasa harus dilakukan, yakni dengan tingkat penurunan *stunting* sebesar 3% per tahun,” cetusnya dalam webinar berjudul *Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Era Pandemi Covid-19*, belum lama ini.

Ia menjelaskan ada lima pilar yang menjadi kunci percepatan penurunan *stunting*. Yang menjadi pilar pertama ialah komitmen pimpinan tertinggi seperti presiden dan pimpinan daerah.

Pilar kedua dan ketiga ialah strategi perubahan perilaku dan konvergensi kementerian/lembaga. Selanjutnya, pilar keempat ditentukan penjaminan ketersediaan pangan dan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dan pilar kelima ialah penguatan pemantauan dan evaluasi.

Dari lima pilar itu, Siswanto mengungkapkan, pilar keempat dan kelima paling terdampak pandemi. Oleh karena itu, peluang intervensi dan inovasi harus

difokuskan pada aspek tersebut.

Untuk menjaga asupan gizi ibu hamil dan balita misalnya, ia menyarankan agar daerah bisa melakukan program pembagian telur. “Karena *stunting* berkaitan dengan pertumbuhan linier yang mana berhubungan dengan asupan protein,” kata Siswanto.

Senada dengan Siswanto, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo juga menyoroti pentingnya gizi para ibu hamil.

“Selama masa kehamilan, seorang ibu harus rajin mengonsumsi asam folat, *zinc*, dan vitamin karena kekurangan asam folat bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan,” ujar Hasto yang juga dokter kandungan itu.

Selain gizi, inovasi lain yang bisa dilakukan untuk mempercepat penurunan *stunting* ialah memantau tumbuh kembang, termasuk pemberian imunisasi dasar di masa pandemi.

Pemantauan balita bisa dilakukan lewat aplikasi yang dilaporkan ke kader posyandu. Cara lain, ialah posyandu tetap buka, kemudian dibikin antrean sehingga mengurangi kerumunan.

Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Catharine Mayung Sambo menegaskan, anak harus diimunisasi walaupun risikonya kecil. “Sebab, apabila anak menerima imunisasi lengkap secara usia, dia bisa melindungi anak di sekitarnya,” kata Mayung. (Ifa/Ata/H-2)

LIVE via **zoom**

WORKSHOP ONLINE

#TETAPPRODUKTIF

MEDIA INDONESIA

SEKOLAH JURNALISME MEDIA INDONESIA

PUBLIC SPEAKING

(BELAJAR LANGSUNG DENGAN AHLINYA)

Usman Kansong – Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* & Yohana Margaretha – News Anchor Metro TV

Pukul 11.00 – 13.00

Rabu

26 AGUSTUS 2020

SOCIAL MEDIA MARKETING

Kris Wijayanto – Sr Manager Multimedia Metro TV
Ketua Umum Indonesian Digital Association (IDA)

Pukul 14.00 – 16.00

Kamis

27 AGUSTUS 2020

TEKNIK STORYTELLING WISATA

(ABADIKAN PERJALANANMU DENGAN CERITA)

Usman Kansong – Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* & Bintang Krisanti – Redaktur *Media Indonesia*

Pukul 11.00 – 13.00

TEKNIK FOTOGRAFI PERJALANAN

(TIPS & TRIK MENGHASILKAN FOTO PERJALANAN BERKUALITAS)

Hariyanto – Kepala Divisi Artisik & Foto *Media Indonesia*
Ramdani – Fotografer *Media Indonesia*

Pukul 14.00 – 16.00

FASILITAS

- Pelatihan online selama 2 jam
- Materi presentasi
- E-sertifikat
- Layanan konsultasi via whatsapp group

INVESTASI

Rp 500.000/materi

Khusus mahasiswa/pelajar

Disc 50%

(mencantumkan kartu pelajar/mahasiswa)

Narahubung:

Firmansyah 0812-2052-6700

Email:

mikomunitas@mediaindonesia.com

<https://bit.ly/SJMIOOnline-4>

PJJ Jadi Model Adaptasi Pembelajaran Masa Depan

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan melakukan reorientasi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman.

SYARIEF OEBAIDILLAH
oebay@mediaindonesia.com

PROTOKOL kesehatan di masa pandemi covid-19 mengharuskan sekolah meninggalkan kegiatan belajar mengajar secara normal. Salah satu pilihan yang logis sejak Maret 2020 ialah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terlepas pro dan kontra, model pembelajaran tersebut menjadi pilihan di jenjang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) meski pada umumnya sekolah menganggapnya sebagai model pembelajaran yang relatif baru. Banyak sekolah di Tanah Air yang belum siap, baik dari sisi peralatan pendukung, sumber daya manusia, maupun kemampuan ekonomi orangtua siswa, termasuk akses jaringan internet. Hingga akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama lintas kementerian mengeluarkan Surat Keputusan

Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembelajaran di masa pandemi mencakup belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Belum menurunnya kurva pandemi hingga tahun ajaran baru tiba menimbulkan masalah tersendiri. Tidak sedikit orangtua dan siswa merasakan kejenuhan saat PJJ diterapkan di sekolah. Keluhan PJJ tidak efektif, hanya memindahkan tugas dari guru, menambah beban orangtua di rumah, dan sebagainya menjadi keluhan yang lazim serta banyak dijumpai di media-media sosial. Pemerintah dan masyarakat serta dunia pendidikan kini menghadapi pilihan yang dilematis. Atas masukan dan usulan berbagai pihak, SKB 4 Menteri direvisi diiringi penerbitan kurikulum darurat. Ada semacam kelonggaran kepada daerah atau sekolah untuk menentukan jenis pembelajaran. Namun, tentu saja kepatuhan terhadap protokol kesehatan

Manfaat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)



- Aman dari bahaya virus korona.
- Pelajaran bisa dilakukan kapan saja dengan persetujuan dari kedua belah pihak di awal masa pembelajaran.
- Materi dapat diakses pelajar di mana pun dan kapan pun.
- Pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai, seperti mendengarkan musik, tiduran, makan, dan sebagainya.

SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Terkait Zona yang Diperbolehkan Pembelajaran Tatap Muka

- Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Revisi: Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dan kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Sumber: Kemdikbud/Dokumentasi Mi/Riset Mi-NRC

dan kesediaan orangtua melepas anaknya untuk belajar di sekolah menjadi syarat mutlak. Prinsip kehati-hatian dalam menghadapi pandemi covid-19 kembali ditegaskan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Meski sekolah bisa dibuka untuk yang berada di zona hijau dan kuning, pendidikan jarak jauh masih tetap dilaksanakan. “Meski sekolah sudah bisa dibuka, bukan berarti PJJ tidak terjadi di sekolah yang sudah tatap muka. Karena sesuai protokol kesehatan, maksimum kapasitas sekolah hanya 50%,” ujar Mendikbud. Kendati pemerintah pusat memperbolehkan membuka sekolah di zona kuning, bukan berarti hal itu berlaku untuk

semua daerah di zona kuning dan hijau. Pemerintah pusat memberikan relaksasi, ujar Mendikbud, tapi keputusan pembukaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orangtua. Faktor kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas pembelajaran saat pandemi.

Salah paham

Adanya keluhan selama PJJ, menurut Rektor Universitas Terbuka Prof Ojat Darajat, terjadi karena salah kaprah dalam penyelenggaraannya. Faktor guru, menurut Ojat, harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan PJJ yang tepat. Di antara kelemahan guru

yang masih menonjol, yakni tidak memiliki keahlian interaksi akademik. Guru kesulitan melakukan pembelajaran yang biasanya dari ruang kelas, kemudian dipindahkan ke kelas daring. Ojat menambahkan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama insan pendidikan bagaimana mengonversi bahan ajar di kelas ke pelaksanaan PJJ tidak lagi diartikan negatif. Di tengah keterbatasan pilihan, model pembelajaran di masa pandemi, PJJ masih layak dipertahankan bagi sekolah yang telah siap. Alasannya, model pembelajaran daring pada saat pascapandemi dapat menjadi alternatif yang saling melengkapi

dengan pembelajaran luring (*offline*). Beberapa pembenahan harus tetap dikerjakan untuk mewujudkan PJJ yang maksimal. Menurut praktisi pendidikan M Nur Rizal, setidaknya ada tiga perbaikan yang mendesak dilakukan selama PJJ di masa pandemi. Pertama, memperluas akses internet dengan tujuan mewujudkan pemerataan pendidikan ke depan. Kedua, membuat acuan bagi daerah dan guru untuk mengurangi beban materi ajar dan kurikulum yang tepat. Terakhir, menjadikan pandemi covid-19 ini sebagai titik tolak perubahan orientasi kebijakan politik pendidikan agar lebih adaptif dan produktif. (H-1)

Kolaborasi antara peneliti dari perguruan tinggi, LPNK, dan lembaga litbang di satu sisi, pemerintah, dan industri di sisi ketiga, atau triple helix, menjadi fondasi bagi Indonesia agar menjadi negara berbasis riset dan inovasi.

ATIKAH ISMAH WINAHYU
atikah@mediaindonesia.com

TRANSFORMASI dari negara berbasis sumber daya alam menjadi berbasis riset dan inovasi ialah keniscayaan bagi Indonesia agar dapat mewujudkan negara mandiri, maju, dan sejahtera. Riset dan inovasi berperan penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya untuk pembangunan negara. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang luar biasa sehingga terbiasa dengan *resources driven economy*. “Kita menganggap ekonomi kita akan berjalan baik kalau harga komoditas tinggi, harga minyak, batu bara, dan CPO tinggi. Padahal kalau kita lihat persaingan masa kini, teknologi itu semakin berkembang, *resource driven economy* menjadi tidak *sustainable*,” kata Bambang dalam acara Inovasi Teknologi dan Manajemen Penanganan Covid-19, Senin (10/8). Bambang menuturkan, guna mendukung agar Indonesia menjadi negara yang berbasis riset dan inovasi, perlu diimplementasikan konsep *triple helix*, yakni kolaborasi antara peneliti baik dari perguruan

Mendorong Triple Helix untuk Wujudkan Negara Mandiri



ANTARA/WIDODO S JSUF

INOVASI: Seorang dosen Universitas Indonesia (UI) mengamati mobil listrik hasil inovasi dan karya dari dosen dan mahasiswa UI yang dipamerkan pada acara Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan di Jakarta.

tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), dan lembaga litbang di satu sisi, pemerintah, dan industri di sisi ketiga. Indonesia telah memiliki potensi nasional berupa litbang, SDA, SDM, dan lainnya, tetapi hingga saat ini penerapan riset dan inovasi masih belum maksimal. “Kita sudah mempunyai semua elemen dalam *triple helix*, tetapi yang belum bisa berjalan dengan baik, dengan mulus, ialah hubungan atau komunikasi atau

kolaborasi di antara ketiganya,” imbuhnya. Menurutnya, interaksi antara peneliti dan industri seharusnya berlangsung secara terus-menerus dan merupakan kewajiban pemerintah untuk mendekatkan industri dengan para peneliti. “Pemerintah bertugas memfasilitasi komunikasi dan sinergi yang lancar. Pemerintah juga nantinya yang bisa membuat industri tertarik untuk masuk ke dunia litbangirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan) karena pemerintah adalah regulator,” jelasnya. Di samping itu, infrastruktur dan SDM Indonesia menjadi kunci dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah perlu mendukung infrastruktur iptek agar semakin banyak tersedia dan hasil penelitian juga semakin canggih dan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Bambang menuturkan riset yang maju dapat menciptakan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, Bambang memastikan

implementasi Prioritas Riset Nasional (PRN) tetap berjalan tahun ini meski di tengah pandemi covid-19 dan anggaran riset yang terbatas akibat pemangkasan. “Ini merupakan implementasi dari rencana induk riset nasional 2017-2045. Ini adalah PRN pertama untuk periode 2020-2024. Kita ingin memulainya dengan kombinasi anggaran dari LPDP, kementerian/lembaga, dan LPNK yang terlibat dalam PRN. Jadi, memang sifatnya kontribusi bersama,” kata Bambang dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional PRN 2020, kemarin.

Diseminasi

Sebelumnya, Bambang mengakui bahwa riset di Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan Indeks Inovasi Global atau *Global Innovation Index* (GII) 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia dengan skor 29,8. Di ASEAN, peringkat inovasi Indonesia berada di posisi kedua terendah. Menurutnya, hal ini disebabkan masih kurangnya perhatian kepada SDM, fasilitas, dan infrastruktur riset, serta anggaran yang masih kecil. Bambang menambahkan, penghiliran, diseminasi, dan sinergi menjadi kunci keberhasilan riset yang dilakukan perguruan tinggi. “Perguruan tinggi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas riset dan kualitas publikasi yang dihasilkan dan harus benar-benar inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” imbuhnya. Para peneliti wajib mendiseminasikan hasil riset mereka melalui berbagai kegiatan ilmiah dan publikasi baik di dalam dan di luar negeri agar manfaatnya diketahui

masyarakat luas sekaligus turut menyumbang peningkatan daya saing bangsa. Sementara itu, dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) 2020 dalam kategori *world university impact ranking*, tiga perguruan tinggi di Indonesia masuk 100 besar dunia. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia di peringkat ke-47, Universitas Gadjah Mada ke-72, dan IPB University ke-77. *World university impact ranking* merupakan satu-satunya pemeringkatan yang menilai kinerja universitas berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Rektor UI Prof Ari Kuncoro melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu mengatakan hal itu merupakan pencapaian besar dan menunjukkan UI semakin dikenal masyarakat global dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia. “Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini sebagai dampak dari pandemi covid-19, UI tetap berkomitmen menghadirkan solusi atas permasalahan covid-19 melalui aktivitas inovasi, riset, dan pengabdian masyarakat,” kata Ari. Sementara itu, dalam *Science and Technology Index* (Sinta) *series 1* 2020, terdapat empat perguruan tinggi paling produktif secara institusi, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan IPB University. UI paling produktif dengan 12.579 publikasi. Formula pada pemeringkatan ini berdasarkan indikator jumlah artikel jurnal terindeks di *Scopus*. (H-3)